



LAPORAN KINERJA

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNO**

TAHUN 2024



JL. A. YANI NO. 100 TANJUNGPANDAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat terlaksana.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung ini bertujuan untuk melaporkan akuntabilitas sekaligus melaporkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang menjadi tolok ukur kebertanggungjawaban suatu instansi dalam upaya mencapai tujuan serta kemajuan menjalankan misi organisasi.

Dengan telah terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini, kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung di Tahun Anggaran 2024 dan untuk menjadi acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ditahun 2025 yang akan datang.

Tanjungpandan, 4 Maret 2025

Kepala Dinas,



KASIMIN, S.IP., MAB

Pembina Utama Muda/ IV/c

NIP 196908241990031004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	10
1.4 Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Target Kinerja Tahun 2024 - 2026	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	40
3.2 Kinerja Lainnya	140
3.3 Akuntabilitas Keuangan	153
BAB IV PENUTUP	175
4.1 Kesimpulan Umum	175
4.2 Langkah Perbaikan ke depan	177
LAMPIRAN	179

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026 tujuan dari DSPPPA adalah untuk mendukung tujuan pembangunan Bupati Belitung yaitu Tujuan pembangunan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan di Kabupaten Belitung, oleh karena itulah perlunya penjabaran rencana program dan kegiatan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 Tujuan dan 3 sasaran yang memuat 3 indikator Tujuan dan 3 Indikator sasaran pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Pencapaian dari 6 Indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2024 ini secara garis besar berhasil mencapai target. Adapun untuk jumlah program dan kegiatan, tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan 13 program, 26 kegiatan dan 55 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.314.852.053,- dan Realisasi Anggaran Rp. 9.521.256.875,- atau 92,31% yang bersumber anggaran DAU, Fiskal dan DAK Non Fisik PPA.

Faktor pendukung dari pelaksanaan program/ kegiatan yaitu adanya sarana dan prasarana pendukung dan anggaran yang memadai serta adanya koordinasi yang baik dengan OPD terkait. Adapun Faktor penghambat yaitu data yang belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan, pelaksanaan program/ kegiatan/ kebijakan, serta faktor kuantitas dan kualitas SDM di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Beberapa langkah-langkah yang harus lebih ditekankan pada masa-masa mendatang, diantaranya :

1. Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi baik fungsional maupun Struktural.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan publik.

Pencapaian kinerja saat ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2024 ini juga merupakan bagian evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan di bidang keuangan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipimpinnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah mengatur tatacara tentang bagaimana Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu yang akan datang.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah.

c. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi ASN, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat lihat melalui bagan struktur organisasi berikut ini:

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 80 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SUPARNO, S.H.
 NIP. 19800315 200903 1 003

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah/negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, bencana lainnya serta pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;

- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- g. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalah-gunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, administrasi, koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

- pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - h. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, mengoordinasikan, memfasilitasi, mensosialisasikan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan serta penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. Pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Jumlah pegawai pada Tahun 2024 sebanyak 39 orang terdiri dari 28 orang PNS, 11 Orang tenaga honorer.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Pendidikan
Per 31 Desember 2024

NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI						JUMLAH	
		PNS		PPPK		HONORER		L	P
		L	P	L	P	L	P		
I	TENAGA SARJANA								
1	S2 Manajemen Ekonomi Publik	1	0					1	0
2	Sarjana Sosial / Kesejahteraan Sosial / Kessos Umum	0	1	1	1			1	2
3	Sarjana Sistem Informasi	1	0					1	0
4	Sarjana Agama Islam	1	0					1	0
5	Sarjana Administrasi Negara	1	0					1	0
6	Sarjana Manajemen Keuangan	0	1					0	1
7	Sarjana Sosiologi	0	1					0	1
8	Sarjana Pekerjaan Sosial	0	1					0	1
9	Sarjana Pendidikan	1	0					1	0
10	Sarjana Teknik Kimia	0	1					0	1
11	Sarjana Perikanan	1	0					1	0
12	D – IV Pekerja Sosial	3	0					3	0
13	Sarjana Psikologi	2	2	0	1			2	3
14	Sarjana Hubungan Internasional	1	0					1	0
15	D4 Manajemen Informatika					0	0	0	0
16	Sarjana PGSD / Penjas					1	0	1	0
Total		12	7	1	2	1	0	14	9

II	TENAGA SARJANA MUDA /AKADEMI/D3								
1	D3 Manajemen Informatika	0	2					0	2
2	D3 Perpajakan	0	1					0	1
3	D3 Akuntansi	0	1					0	1
4	D3 Manajemen Administrasi Perkantoran			1		0	0	1	0
Total		0	4	1	0	0	0	1	4

III	SEKOLAH MENENGAH ATAS								
1	SMA/ SMU	0	0			4	2	6	3
2	SMEA/ SMK	0	0			1	1	1	1
3	STM	0	0					0	0
4	SMKK	0	1					0	1
5	SMP	0	0			1	0	1	0
6	SD	0	0			0	1	0	1
Total		0	1	0	0	6	4	8	6
JUMLAH TOTAL		12	12	2	2	7	4	21	18

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.3.1. Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra PD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isu-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan pemetaan dan telaahan atas hasil kegiatan dan diskusi serta rapat pembahasan penyiapan renstra.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

1.3.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan /Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
30. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2019;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
36. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015 – 2019;

37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
42. Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
43. Peraturan Bupati Belitung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada Anak Lampiran II/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan target kinerja tahun 2024 - 2026 dan Perjanjian kinerja 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TARGET KINERJA TAHUN 2024 - 2026

Target Kinerja Tahun 2024 - 2026 tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026. Renstra Dinas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program untuk pencapaian sasaran untuk mendukung visi dan misi Bupati yang sesuai tema, prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS per tahun;

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya penanganan PMKS, dengan indikator sasaran :

- Persentase penanganan PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan.

2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan indikator sasaran :

- Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan Indikator Rasio kekerasan perempuan dan anak; Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan indikator sasaran :
 - Rasio kekerasan perempuan dan anak;

2.1.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan

sosial;

2. Meningkatkan penanganan atau pelayanan PMKS;
3. Peningkatan pelebagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
4. Peningkatan pelebagaan Forum Anak dan peningkatan Kabupaten Layak Anak;

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan PMKS;
2. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
3. Validasi data PMKS;
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran serta perempuan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
7. Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
8. Meningkatkan informasi mengenai peran dan fungsi kelembagaan yang menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2024 - 2026**

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.		
Misi I	: Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1. Meningkatnya penanganan PMKS	1. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial 2. Meningkatkan penanganan atau pelayanan PMKS	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan PMKS 2. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM 3. Validasi data PMKS
2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran serta perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Peningkatan Pelembagaan Forum Anak dan peningkatan Kabupaten Layak Anak	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Meningkatkan informasi mengenai peran dan fungsi kelembagaan yang

			<p>menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>5. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>
--	--	--	---

Program

Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan dalam tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
4. Program Rehabilitasi Sosial;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penanganan Bencana;
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
9. Program Perlindungan Perempuan;
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
13. Program Perlindungan Khusus Anak.

Kegiatan

Sementara kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Dalam penyusunan Rencana Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024, dimana sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan memuat informasi yang meliputi:

- a. Indikator Kinerja
- b. Rencana Tingkat Capaian (Target)

- c. Program yang akan dilaksanakan
- d. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program
- e. Indikator Kinerja kegiatan, antara lain:
 - Masukkan (input)
 - Keluaran (Output)
 - Hasil (Out Comes)

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
9. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
10. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
11. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
12. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
14. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
15. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota;

16. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
17. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
18. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
19. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
20. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
21. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
22. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
23. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
24. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
25. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
26. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan dan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2024.

Terdapat 55 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2024, dijabarkan dalam tabel 2.2. dibawah ini.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran terdapat dalam tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN 2024 UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah (PSKS) Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang aktif
							1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
							2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
							3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
							4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
							1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial
							1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
							2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							3. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota
							4. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota
							5. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar
							1. Penjangkauan Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/ Kota
							2. Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota
							Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi
							1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
							2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana yang menerima bantuan sosial
							1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kabupaten/Kota
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan
							1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
							2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
						2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
							1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
							2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
						3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
							3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
							4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
							5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
							6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
							7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran
							1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
							3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
						4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang milik daerah
							1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
							2. Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
							3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik
							1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
							2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
							3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
							4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
							5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
							2. Advokasi Kebijakan Pelaksanaan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
							Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Organisasi perempuan
							1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung
							1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan
							2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang tertangani	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga keluarga yang dibina
							1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
							Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terfasilitasi
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan status KLA
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
							Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung
							1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
							2. Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA
							1. Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan/ pencegahan KTA
							Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan
							1. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan
							Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan
							1. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 telah ditetapkan menjadi satu dalam pentapan Indikator Kinerja Utama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Belitung dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Adapun IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumusan	Target Kineja pada Tahun Ke		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS		Persentase penurunan PMKS per tahun	(Jumlah PMKS tahun (n-1) – jumlah PMKS tahun n) / jumlah PMKS tahun (n-1) x 100%	0,5	0,5	0,5
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	(Jumlah PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan / jumlah PMKS x 100%	98,79%	98,81%	98,83%
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	(Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis, yang dikeluarkan oleh BPS	53,43	53,44	53,45
		Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Hasil penilaian APE yang berlaku dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Pratama	Pratama	Madya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumusan	Target Kinerja pada Tahun Ke		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	(Jumlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak / jumlah penduduk perempuan dan anak) x 10.000	3,20	3,18	3,16
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	(Jmlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak / jumlah penduduk perempuan dan anak) x 10.000	3,20	3,18	3,16

2.1.4. Rencana Kinerja (Renja)

Sesuai dengan Rencana Kinerja untuk satuan dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024, maka Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tertuang dalam format Rencana Kerja Tahunan (Renja) terlampir.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

2.2.1. Indikator dan Target Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4**Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
1.1. 1	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per Tahun	0,5
1.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	98,79%
2.1. 1	Tujuan : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47
2.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembanguann	4.	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pratama
3.1. 1	Tujuan : Meningkatnya perlindungan perempuan dana nak dari tindak kekerasan	5.	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	3,20
3.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya perlindungan perempuan dana nak dari tindak kekerasan	6.	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	3,20

2.2.2. Rencana Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, melalui indikator kinerja masing-masing sasaran strategis maka pada tahun anggaran 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dengan anggaran induk belanja langsung sebesar Rp. 4.375.560.050,- Anggaran tersebut mengalami perubahan dalam mekanisme Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 5.367.987.782.-

Adapun anggaran Belanja Langsung Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis per Bidang Urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Anggaran Belanja Langsung per Tujuan/Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)		
		2022	2023	2024
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya penanganan PMKS	6.252.962.747	5.309.619.487	3.981.693.082
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	1.141.754.930	663.749.665	497.303.100
3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	216.738.166	328.531.286	888.991.600
JUMLAH		7.611.455.843,-	6.211.900.438,-	5.367.987.782,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Renja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
< 100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
> 100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	> 90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 khususnya pada Misi ke-1 (satu) yaitu **Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja
			2023				2024			
1.1. 1	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	18,39	3678	Sangat Baik	0,5	30,55	6110	Sangat baik
1.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatkan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	80%	98,29%	122,86	Sangat Baik	98,79%	97,62%	98,82	Sangat baik
2.1.	Tujuan :									
1.	Meningkatnya pastisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47	53,47	100,07	Sangat Baik	53,43	53,47	100,07	Sangat baik
2.1. 2	Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan gender dalam pembangunan	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	-	-	Pratama	Pratama	100	Sangat baik
3.1. 1	Tujuan & Sasaran Strategis: Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan perempuan dan anak	-	-	-	-	3,2	4,45	71,91	Cukup (Indikator negatif)

3.1.1. Ralisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023 dan Tahun 2024

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.4

Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Tahun 2018-2023 dan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Target						Realisasi						Persentase Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1. Tujuan Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS pertahun	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,93	-5,01	-8,79	0,96	18,39	30,55	1186	-1002	-1758	192	3678	6110
1.2 Sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	73,85	80	80	80	80	80	98,79	83,89	94,78	97,69	98,79	98,29	97,62	104,86	118,48	122,11	123,49	122,86	98,82
2.1 Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,27	42,62	43,91	45,11	46,35	47	53,43	43,07	53,11	53,02	53,02	53,42	53,47	101,06	120,95	117,53	114,39	113,66	100,07
2.2 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)							Pratama						Pratama						100
3.1 Tujuan & Sasaran : Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan Perempuan dan anak							3,2						4,45						71,91 (Indikator negatif)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024
Berdasarkan Persentase

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	2

Dengan demikian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak/ belum memenuhi target kinerja yakni :

- Indikator Persentase penanganan PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan dengan capaian 97,62% dari target 98,79%. Indikator ini didapatkan dari rumusan jumlah PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan dibagi jumlah PMKS dikali 100%, dimana terdapat 8136 PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan dari 8324 jumlah PMKS.
- Dua indikator tujuan dan sasaran Renstra DSPPPA 2024 yaitu Indikator Rasio kekerasan perempuan dan anak, dengan capaian 4,45 dari target 3,2. Rasio kekerasan ini didapatkan dari rumusan Jumlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak / jumlah penduduk perempuan dan anak x 10.000. Dimana terdapat 42 kasus kekerasan Perempuan dan anak dibagi dengan 94.958 jumlah penduduk Perempuan dan anak dikali 10.000.

Indikator ini merupakan indikator negatif. Dalam kondisi lain, meningkatnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengindikasikan bahwa lebih banyak orang yang menyadari pentingnya melaporkan kekerasan dan mendapatkan bantuan, hal tersebut didukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melakukan upaya pencegahan melalui kampanye, sosialisasi, pelatihan/ workshop dan peningkatan akses layanan melalui penguatan peran dan fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai/ sesuai target yaitu :

- Indikator Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan capaian Pratama dari target Pratama. Level APE tahun 2024 masih dalam predikat Pratama sama dengan APE tahun 2023. Penilaian APE setiap dua tahun sekali dari Kementerian PPA RI.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target yaitu :

- Indikator persentase penurunan PMKS per tahun dengan capaian 30,55 dari target 0,5. Terdapat penurunan jumlah PMKS dari tahun sebelumnya.
- Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IDG tahun 2024 masih menggunakan nilai IDG tahun 2023 yaitu 53,47 dari target 53,43; dikarenakan untuk nilai IDG tahun 2024 belum rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Jika dilihat berdasarkan katagori maka capaian kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	> 90	4
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	1
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.6 diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 berada pada katagori “Sangat Baik” (capaian >90) yang dicapai pada 4 (empat) indikator dan 1 (satu) indikator negative berada pada kategori “cukup”. Dengan demikian jika dilihat dari katagori yang ada secara umum kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam katagori “Baik”.

3.1.2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Laporan Kinerja Perangkat Daerah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh perolehan masing-masing indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pencapaian rencana tingkat capaian (Target), tetapi juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat Keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan

mendalam. Keberhasilan dari Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 ditunjukkan dengan tercapainya rencana tingkat capaian (target) baik Program, Kegiatan, Sub Kegiatan maupun Sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang ditandatangani tanggal 8 Januari 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2024 telah ditetapkan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.1.1	Tujuan : 1 Meningkatkan kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per Tahun	0,5
1.1.2	Sasaran Strategis : 2 Meningkatkan penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	98,79%
2.1.1	Tujuan : 1 Terwujudnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,43
2.1.2	Sasaran Strategis : 2 Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	4.	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pratama

3.1.1	Tujuan : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	5.	Rasio kekerasan perempuan dan anak	3,2
3.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	6.	Rasio kekerasan perempuan dan anak	3,2

Gambaran perbandingan tujuan/ sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.8

**Tujuan/Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung**

Tujuan 1 Strategis 1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS Meningkatnya penanganan PMKS	2 indikator
Tujuan 2 Strategis 2	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	2 indikator
Tujuan 3 Strategis 3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	2 indikator yang sama

Dengan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang ditargetkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 2 (dua) indikator tercapai melebihi target, 1 (satu) indikator tercapai target, dan 2 (dua) indikator belum tercapai terget. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9

**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran %	Predikat
1	Tujuan Strategis 1	1	6110	Tercapai melebihi target
2	Sasaran Strategis 1	1	98,82	Belum tercapai
3	Tujuan Strategis 2	1	100,07	Tercapai melebihi target
4	Sasaran Strategis 2	1	100	Tercapai
5	Tujuan & Strategis 3	1	71,91	Belum Tercapai (indikator negatif)

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam kategori Baik untuk semua indikator, baik pada indikator tujuan maupun indikator sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1	Tujuan Strategis 1	1	6110					√
2	Sasaran Strategis 1	1	98,82					√
3	Tujuan Strategis 2	1	100,07					√
4	Sasaran Strategis 2	1	100					√
5	Tujuan Strategis 3	1	71,91			√ (Indikator negatif)		
6	Sasaran Strategis 3	1	71,91			√ (Indikator negatif)		

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2024 akan memberikan pengaruh kepada keberhasilan dan kegagalan pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan dimaksud tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Analisis Program dalam keberhasilan / kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Capaian	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	1. Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100%	83,13%	83,13%	verifikasi dan validasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	100%	100%	100%	Membangun dan memperkuat jejaring lintas sektor baik di Kabupaten Belitung maupun di Luar Kabupaten Belitung.	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
			3. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100%	100%	100%	Berupaya memasukkan/ memunculkan melalui penganggaran pada program bantuan tidak terencana dan Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang layanan Rehabilitasi Sosial kepada keluarga/ Masyarakat.	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Capaian	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	Perlu ada regulasi bagi desa yang tidak melakukan musdes/ muskel terkait dengan reward dan punishment serta perlu disusun kriteria kemiskinan yang menggambarkan masyarakat belitung.	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
			5. Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	Melakukan kegiatan rutin pembinaan kepada seluruh anggota TAGANA Kabupaten Belitung.	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
			6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	100%	100%	100%	Perlunya perbaikan/ Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
			7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Menyiapkan data dan dokumen yang berkualitas serta tepat waktu penyampaian	Sekretariat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Capaian	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78,80%	78,93%	100,16%	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai, dan meningkatkan standar kompetensi pegawai melalui diklat atau pelatihan-pelatihan	Sekretariat
				Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100%	100%	100%	Meningkatkan pelayanan prima	Sekretariat
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	Menambah SDM yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa serta membuat rencana kerja pengadaan.	Sekretariat
2.	Tujuan 2 : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	53,43%	53,47%	100,07%	Pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep PUG.	Bidang Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Sasaran 2 : Meningkatnya kesetaraan gender dalam	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani	100%	100%	100%	Menyelipkan kegiatan yang sifatnya pembelajaran keluarga pada program-program lainnya. Dengan	Bidang Pengarus Utamaan Gender dan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Capaian	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pembangunan							demikian tujuan dan visi pembelajaran keluarga dapat terbantu meskipun dengan anggaran terbatas.	Pemberdayaan Perempuan
			10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi gender dan anak	65%	78,82%	121,26%	Melakukan koordinasi secara intensif ke desa-desa untuk memperoleh data yang diperlukan.	Bidang Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3.	Tujuan 3 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan perempuan dan anak	11. Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	100%	100%	100%	Rutin mengadakan pertemuan dan koordinasi antar lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
	Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan perempuan dan anak	12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	100%	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Capaian	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			13. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Terkait Kabupaten	100%	100%	100%	Kegiatan Pencegahan direncanakan berdasarkan permasalahan yang ada pada konteks masyarakat Belitung.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat ketercapaian program mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Adapun untuk Formulasi/ rumusan hitungan, teknis perhitungan dan ketercapaian kegiatan serta sub kegiatan terdapat dalam Matrik Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (Terlampir dalam Lampiran XI).

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja) dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Tujuan/Sasaran strategis 1

Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan PMKS

Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan PMKS

Tujuan Strategis 1 Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penanganan PMKS dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Belitung 2024-2026, pada misi ke-1 Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan setra mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. Persentase penurunan PMKS per tahun; target pada tahun 2024 adalah 0,5 di Kabupaten Belitung.
2. Persentase PMKS yang tertangani, pada tahun 2024 ditargetkan 98,79% di Kabupaten Belitung.

Hasil evaluasi capaian tujuan 1 dan sasaran 1 tahun 2024, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 3104,41% dan termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan : Persentase penurunan PMKS Per tahun %	0,5	18,37	0,5	30,55	3678	6110
2	Sasaran : Persentase penanganan PMKS %	80%	98,29%	80%	97,62%	122,86	98,82
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran						157,75	3104,41

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 1 Meningkatnya kesejahteraan PMKS, dengan indikator persentase penurunan PMKS per tahun dan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penanganan PMKS dengan indikator persentase penanganan PMKS tahun 2023 adalah sebesar 157,75% dan tahun 2024 sebesar 3104,41%, meningkat dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2023	2024		
1	Persentase penurunan PMKS Per tahun	%	18,39	30,55	12,16	
2	Persentase penanganan PMKS	%	98,29%	97,62%	-0,67	

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

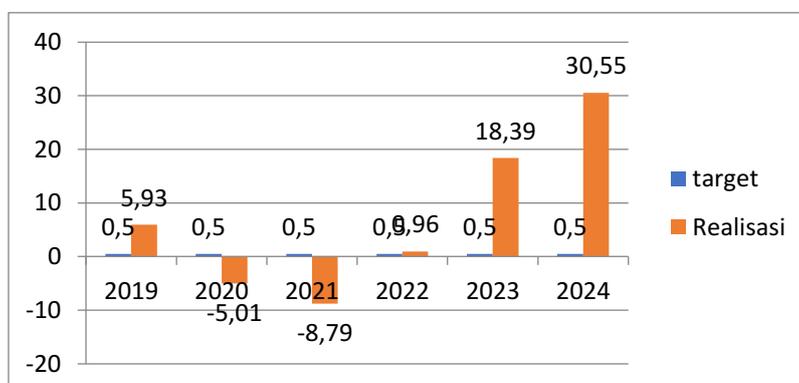
Tabel 3.14
Pencapaian Tujuan/ Sasaran Persentase Penurunan PMKS per Tahun

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap Target akhir Renstra 2026
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Persentase penurunan PMKS Per tahun	18,39	0,5	30,55	6110	0,5	6110
2	Persentase penanganan PMKS	98,29	98,79	97,62	98,82	98,83	98,78

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1) Persentase penurunan PMKS per tahun

Perkembangan realisasi persentase penurunan PMKS per Tahun untuk tahun 2019-2023 dan tahun 2024 disajikan pada gambar 3.1 berikut :



Grafik 3.1. Target dan realisasi persentase penurunan PMKS per tahun

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran “Persentase penurunan PMKS pertahun”, tahun 2024 sebesar 30,55 dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 0,5. Dan Tahun 2023 realisasi mencapai 18,39 dari target 0,5. Terdapat penurunan jumlah PMKS dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu dari jumlah 11.986 menjadi 8324.

Jika dimasukkan dalam rumusan yang telah ditetapkan dalam IKU Tahun 2024-2026 yaitu (Jumlah PMKS tahun n-1 dikurangi Jumlah PMKS tahun n) dibagi jumlah PMKS tahun n-1 dikali 100%. Maka didapatlah nilai positif 18,39 tahun 2023 dan nilai positif 30,55 tahun 2024. Hal ini juga tentunya tidak terlepas dari fokus dan anggaran penanganan PMKS di Kabupaten Belitung terutama dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penanganan PMKS.

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya respon yang baik dari masyarakat Belitung terhadap penanganan PMKS, terjalinnya Sinergitas antar instansi dalam penanganan PMKS, adanya SDM yang kompeten di bidang sosial, dan tersedianya anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya data PMKS belum valid, masih ada beberapa SDM yang belum memiliki kompetensi di bidang sosial, masih terjadinya ego sektoral di berbagai lini, dan masih ada beberapa sub kegiatan yang memiliki anggaran terbatas. Dan solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, perlunya peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial, menjalin sinergitas dengan berbagai pihak, penambahan anggaran, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Pencapaian Tujuan pertama ini juga didukung oleh Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya penanganan PMKS dengan indikator persentase PMKS yang tertangani.

2) Persentase PMKS yang tertangani

Untuk mengukur kualitas meningkatnya penanganan PMKS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator yaitu Persentase PMKS yang tertangani.

Pada indikator ini pengukuran yang dilakukan adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 3.15

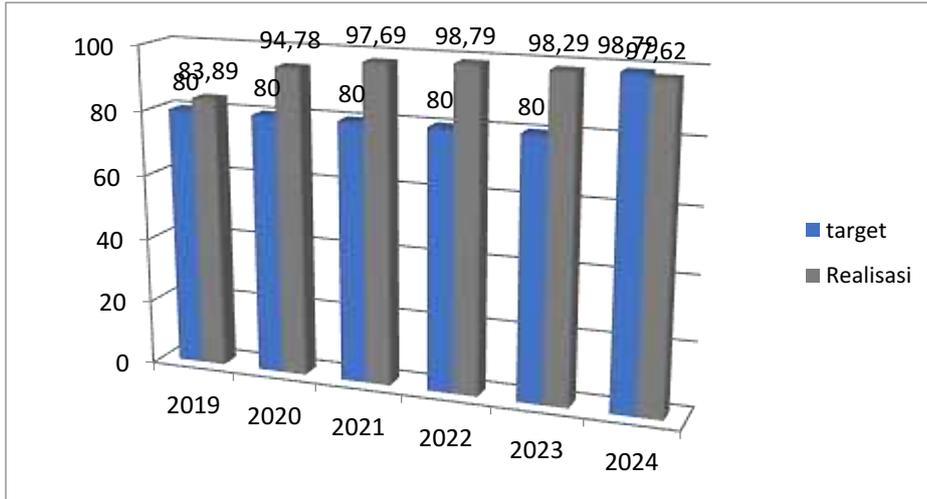
Pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS

Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	%
2019	14.337	12.028	83,89
2020	13.631	12.841	94,20
2021	14.829	14.487	97,69
2022	14.685	14.509	98,79
2023	11.986	11.781	98,29
2024	8324	8136	97,62

Pada tabel 3.14. di atas dapat dilihat bahwa dari pelayanan dan penanganan PMKS dalam 3 tahun terakhir meningkat persentasenya dan di tahun 2024 menurun 0,67 persen penanganannya dari tahun sebelumnya.

Persentase PMKS yang tertangani tahun 2024 sebesar 97,62% dari target 2024 sebesar 98,79% atau tercapai 98,82%. Capaian menurun 1,17% dari tahun 2023, hal ini dikarenakan data PMKS yang bergerak dan berubah setiap tahunnya. Rumusan dari indikator ini adalah $= \text{Jumlah PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan} / \text{Jumlah PMKS} \times 100\%$. Dimana PMKS yang tertangani sebesar 8136 dari 8324 PMKS.

Persentase penanganan PMKS juga dapat digambarkan dalam grafik 3.2. berikut ini :



Grafik 3.2. Penanganan PMKS tahun 2019 – 2023 dan tahun 2024

Jumlah dan Jenis PMKS selama 5 tahun Renstra (2019 – 2023) dan tahun 2024 terdapat dalam tabel 3.15. berikut :

Tabel 3.16. Jumlah dan Jenis Penanganan PMKS Tahun 2019 – 2023

No	Jenis PMKS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)
1	Anak Balita Terlantar	1	1	100,00	0	0	0,00	71	71	100,00	71	71	100,00	2	2	100,00
2	Anak Terlantar	244	129	52,87	244	144	59,02	219	219	100,00	86	86	100,00	15	15	100,00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	20	20	100,00	6	6	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	4	4	100,00
4	Anak Jalanan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	43	10	23,26	43	10	23,26	37	12	32,43	37	37	100,00	57	22	38,60
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	21	21	100,00	9	9	100,00	10	10	100,00	8	8	100,00	13	13	100,00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	1	100,00	6	6	100,00	15	15	100,00	50	50	100,00	13	13	100,00
8	Lanjut Usia Terlantar	1163	1084	93,21	1163	993	85,38	1163	1163	100,00	1154	1154	100,00	60	60	100,00
9	Penyandang Disabilitas (PACA)	705	134	19,01	612	125	20,42	612	295	48,20	612	435	71,08	632	475	75,16
9.a	Penyandang Disabilitas Terlantar													30	30	
10	Tuna Susila	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	39	39	-
12	Pengemis	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

No	Jenis PMKS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-												
16	Orang dengan HIV/AIDS	48	48	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100,00	4	4	100,00	6	6	100,00	4	4	100,00	14	1	7,14
18	Korban Trafficking	2	2	100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	44	44	100,00	28	28	100,00	40	40	100,00	32	32	100,00	51	51	100,00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	18	18	100,00	18	18	100,00	12	12	100,00	13	13	100,00	0	0	100,00
21	Korban Bencana Alam	384	384	100,00	11	11	100,00	32	32	100,00	16	16	100,00	15	15	100,00
22	Korban Bencana Sosial	38	38	100,00	8	8	100,00	17	17	100,00	2	2	100,00	9	9	100,00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a	0,00	1096	1096	100,00	1096	1096	100,00	3465	3465	100,00
24	Fakin Miskin	11601	10090	86,98	11463	11463	100,00	11463	11463	100,00	11463	11463	100,00	7535	7535	100,00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0,00	0	0	0,00	5	5	100,00	21	21	100,00	16	16	100,00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jumlah		14337	12028	83,89	13631	12841	94,20	14829	14487	97,69	14686	14509	98,79	11986	11781	98,29

Tabel 3.17. Jumlah dan Jenis Penanganan PMKS Tahun 2024

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)			Jumlah PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan dalam 1 Tahun (Orang)			Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
		Laki2	Pr	Total	Laki2	Pr	Total	
1	Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0	0	-
2	Anak Terlantar	6	9	15	6	9	15	100,00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	4		4	4		4	100,00
4	Anak Jalanan		0	0		0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	21	13	34	11	11	22	64,71
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	4	20	24	4	20	24	100,00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus		5	5		5	5	100,00
8	Lanjut Usia Terlantar	29	31	60	29	31	60	100,00
9	Penyandang Disabilitas (PACA)	385	247	632			475	75,16
9.a	Penyandang Disabilitas terlantar	19	11	30	19	11	30	100,00
10	Tuna Susila		0	0		0	0	-
11	Gelandangan	1		1	1		1	100,00
12	Pengemis	1		1	1		1	100,00
13	Pemulung		1	1		1	1	100,00
14	Kelompok Minoritas		0	0		0	0	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)		n/a	n/a		n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS		16	16		0	0	0,00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	12	2	14	1		1	7,14
18	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	4	38	42	4	38	42	100,00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)			13			13	100,00
21	Korban Bencana Alam			64			64	100,00
22	Korban Bencana Sosial		1	1		1	1	100,00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		15	15		15	15	100,00
24	Fakin Miskin		7336	7336		7336	7336	100,00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4	12	16	4	12	16	100,00
26	Komunitas Adat Terpencil		0	0		0	0	-
	Jumlah			8324			8126	97,62

Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS per tahun, dan sasaran meningkatnya penanganan PMKS dengan indikator persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan terjadi kenaikan dan penurunan dalam 5 tahun periode Renstra 2019-2023 dan tahun 2024, hal ini ditandai karena terjadinya perubahan data jumlah PMKS setiap tahunnya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung juga berfokus pada penanganan PMKS mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana.

Berikut Tabel ketercapaian Pemenuhan SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung tahun 2024 :

Tabel 3.18

Pencapaian Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					97.40 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					99.79 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30	30	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.79 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.97 %	
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	30	30	0	100.00 %	
	2. Penyediaan permakanan	Orang	30	30	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)						
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	30	30	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	30	28	2	93.33 %	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	6	6	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	30	30	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	30	30	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	30	28	2	93.33 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	4	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	5	5	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	3	3	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	30	30	0	100.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15	15	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	15	15	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	15	15	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	3 . Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	3	3	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	15	15	0	100.00 %	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					99.23 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60	60	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.23 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.15 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	60	60	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	60	60	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	60	60	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	12	12	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	4	2	2	50.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	60	60	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	60	60	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	20	20	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60	60	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	60	60	0	100.00 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25	25	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	25	25	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	25	25	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	25	25	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	12	12	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	7	7	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	6	6	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	23	23	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	23	23	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	25	25	0	100.00 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					88.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15	15	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	40.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	0	0	0	0.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	0	0	0	0.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	15	15	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)						

Sumber Data : Laporan Pemenuhan SPM Tahun 2024 <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Adapun upaya-upaya penting yang telah dilakukan tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pertama tersebut yaitu :

- 1) Perbaikan data layanan PMKS menjadi tepat sasaran
 - 2) Peningkatan berbagai program/ kegiatan yang menasar/ mengintervensi langsung kepada PMKS
 - 3) Peningkatan Kerjasama lintas sektor. Kerjasama dengan Abiyoso Kemensos RI, Panti Bina Laras Belitung Timur, Pembangunan Rumah Singgah, dll.
 - 4) Peningkatan kemampuan kompetensi PSKS, Karang Taruna, TKSK, PSM, dan lainnya.
- Capaian kinerja yang cukup tinggi didukung/disebabkan antara lain oleh :

- 1) Adanya kucuran dana DAU, Fiskal, DAK Non Fisik PPA, dll
- 2) Adanya pelaksanaan program hasil Kerjasama dengan Sentra Abiyoso, Kemensos RI.
- 3) Adanya peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

- 1) Meningkatkan SDM Pelayanan
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan
- 3) Meningkatkan layanan rujukan/menambah Kerjasama dengan lintas sektor/ perluasan Kerjasama.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut :



Rapat Korodinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung (20 Agustus 2024)



Rapat Koordinasi / Pembinaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se - Kabupaten Belitung



Serah Terima Penerima Manfaat a.n. Liong Yun secara Simbolis kepada Keluarga



Bulan Bakti Karang Taruna di Desa Membalong



Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar



Sosialisasi LK3



Pemberian Fasilitas Bantuan Sosial kepada Keluarga



Pelayanan Adminduk bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar



Pemberian santunan kepada Veteran



Penyerahan bantuan sandang kepada korban bencana alam



Layanan Psikososial kepada Korban Bencana



Penyerahan Bantuan Sandang kepada Korban Bencana

Gambar 3.1. Dokumentasi foto kegiatan yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Pertama

Capaian Tujuan/Sasaran 1 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial. Untuk pencapaian indikator Program Pemberdayaan Sosial pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Pencapaian Indikator Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100	38,60	38,60	100	88,13	88,13	

Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial tahun 2024 sebesar 88,13% di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100%. Persentase ini didapatkan dari rumus jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial 7336 (Data BPNT) dibagi Data PMKS 8324 dalam dikali 100 persen. Bisa diartikan hanya 88,13 persen dari PMKS yang dibantu dengan program BPNT yang merupakan program dan kuota bantuan dari Pusat.

Alokasi anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 348.934.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 321.623.110,- setara dengan 92,17% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.934.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 321.623.110,- setara dengan 92,17%. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah PSKS yang aktif.

Faktor pendukung yaitu adanya Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat.

Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.

Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan verifikasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.739.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.419.900,- atau setara dengan 94,44%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah orang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung yaitu adanya 5 orang TKSK dan tersedianya anggaran kegiatan. Faktor penghambat yaitu kurang tersedianya anggaran. Upaya/solusi ke depan yaitu mengupayakan tetap tersedianya anggaran.

Upaya/solusi ke depan yaitu mengupayakan tetap tersedianya anggaran.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 124.497.000,- atau setara dengan 98,42%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : adanya veteran/janda veteran, pejuang/janda pejuang penerima uang penghargaan,

Faktor penghambat : berkurangnya jumlah penerima uang penghargaan, masih minimnya anggaran uang melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Upaya/solusi ke depan : melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan pembiayaan APBD Kabupaten.

- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 124.497.000,- atau setara dengan 98,42%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : adanya lembaga dan pengurus karang taruna kecamatan dan kabupaten. tersedianya anggaran kegiatan.

Faktor penghambat : kurang tersedianya anggaran, tidak/kurang aktifnya kepengurusan yang ada kurangnya pembinaan berjenjang yang diterima pengurus.

Upaya/solusi ke depan : mengupayakan tersedianya anggaran, melaksanakan pembinaan berjenjang kepada pengurus karang taruna, melaksanakan kegiatan sesuai program kerja yang ada dan disusun pengurus.

- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.519.900,- dan realisasi sebesar Rp. 79.995.000,- atau setara dengan 88,37%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya konsultasi masalah keluarga ke lembaga-lembaga seperti LK3, tersedianya anggaran yang memadai.

Faktor penghambat : masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan lembaga untuk konsultasi masalah keluarganya.

Upaya/solusi ke depan: melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan pendanaan APBD Kabupaten.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Indikator Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya. Untuk pencapaian indikator Program pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Pencapaian Indikator Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	-	-	-	100	100	100	

Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya tahun 2024 sebesar 100% sama dengan target 100%. Capaian indikator ini di peroleh dari rumusan (Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani / Jumlah warga Negara migran korban kekerasan) x 100%.

Faktor pendorong tercapainya program ini adalah Adanya Kepedulian Masyarakat, BAZNAS Kabupaten Belitung dan Lazismu Kabupaten Belitung terhadap Pekerja Migran / Orang Terlantar.

Faktor penghambatnya yaitu Tidak Adanya / Tidak Lengkapnya Adminduk Pekerja Migran/ Orang Terlantar; Minimnya informasi tentang keluarga Pekerja Migran/Orang Terlantar; Banyaknya keluarga dari Orang Terlantar/Pekerja Migran termasuk orang tidak mampu/orang miskin secara finansial. Dan Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu Membangun dan memperkuat jejaring lintas sektor baik di Kabupaten Belitung maupun di Luar Kabupaten Belitung.

Alokasi anggaran Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar Rp. 41.256.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.955.668,- setara dengan 41,10% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.256.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.955.668,- setara dengan 41,10%. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

Faktor pendukung yaitu adanya adanya Kepedulian Masyarakat, BAZNAS Kabupaten Belitung dan Lazismu Kabupaten Belitung terhadap Pekerja Migran / Orang Terlantar.

Faktor Penghambat Tidak Adanya / Tidak Lengkapnya Adminduk Pekerja Migran/Orang Terlantar; Minimnya informasi tentang keluarga Pekerja Migran/Orang Terlantar; Banyaknya keluarga dari Orang Terlantar/Pekerja Migran termasuk orang tidak mampu/orang miskin secara finansial. Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu Membangun dan memperkuat jejaring lintas sektor baik di Kabupaten Belitung maupun di Luar Kabupaten Belitung.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.256.200,- dan realisasi sebesar Rp. 16.955.668,- atau setara dengan 41,10%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

Sub Kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% disebabkan sub kegiatan ini bersifat antisipatif dan insidental untuk Pemulangan PMKS terlantar. Belanja Akomodasi dan Transportasi Penjemputan/Pemulangan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindakan Kekerasan / Pekerja Migran Terlantar dan Belanja Uang Saku Penjemputan /Pemulangan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindakan Kekerasan/Pekerja Migran Terlantar dilakukan Perubahan Anggaran di Bulan Oktober 2024 pada saat APBD Perubahan untuk mengantisipasi jumlah PMKS terlantar bertambah di akhir tahun 2024.

Faktor pendukung yaitu adanya Kepedulian Masyarakat, BAZNAS Kabupaten Belitung dan Lazismu Kabupaten Belitung terhadap Pekerja Migran / Orang Terlantar.

Faktor Penghambat Tidak Adanya / Tidak Lengkapnya Adminduk Pekerja Migran/ Orang Terlantar; Minimnya informasi tentang keluarga Pekerja Migran/Orang Terlantar; Banyaknya keluarga dari Orang Terlantar/Pekerja Migran termasuk orang tidak mampu/orang miskin secara finansial. Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu Membangun dan memperkuat jejaring lintas sektor baik di Kabupaten Belitung maupun di Luar Kabupaten Belitung.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial.

Untuk pencapaian indikator Program Rehabilitasi Sosial pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21

Pencapaian Indikator Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	100	-

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti tahun 2023 sebesar 100% dimana jumlah penyandang disabilitas 30 orang, anak terlantar 15 orang, lansia terlantar 60 orang, gelandangan dan pengemis 39 orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berjumlah 144 orang dari 144 orang. Sedangkan di tahun 2024 juga sebesar 100% dimana jumlah penyandang disabilitas 30 orang, anak terlantar 15 orang, lansia terlantar 60 orang, gelandangan dan pengemis 25 orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berjumlah 130 orang dari 130 orang.

Hal ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung fokus dalam penanganan PMKS terutama untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial.

Namun terkait dengan mutu layanan SPM pada aplikasi e-spm tidak mencapai 100% karena tidak semua penerima layanan SPM menerima dan memerlukan layanan sesuai dengan 15 kriteria yang ditetapkan.

Faktor Pendorong: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

yang memerlukan pelayanan dasar minimal).

Faktor Penghambat: Ada Kemungkinan PMKS diluar data yang memerlukan layanan serta masih adanya keluarga dari PMKS yang menolak menerima layanan rujukan. Solusi perbaikan yaitu berupaya memasukkan/memunculkan melalui penganggaran pada program bantuan tidak terencana dan Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang layanan Rehabilitasi Sosial kepada keluarga/Masyarakat.

Alokasi anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 355.284.512,- dengan realisasi sebesar Rp. 316.638.998,- setara dengan 89,12% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 355.284.512,- dengan realisasi sebesar Rp. 316.638.998,- atau setara dengan 89,12% *Output* kegiatan adalah jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

Faktor Pendorong: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang memerlukan pelayanan dasar minimal).

Faktor Penghambat: Ada Kemungkinan PMKS diluar data yang memerlukan layanan serta masih adanya keluarga dari PMKS yang menolak menerima layanan rujukan. Solusi perbaikan yaitu berupaya memasukkan/memunculkan melalui penganggaran pada program bantuan tidak terencana dan Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang layanan Rehabilitasi Sosial kepada keluarga/Masyarakat.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.131.000,- dan realisasi sebesar Rp. 205.070.000,- atau setara dengan 98,53%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong: Penerima Penyediaan Permakanan sudah terdata dalam database Bidang serta masuk dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial.

- b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.148.750,- dan realisasi sebesar Rp. 5.495.000,- atau setara dengan 49,29%. *Output* sub kegiatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% disebabkan Pemberian Reunifikasi keluarga telah dilakukan kepada 105 orang Penerima Manfaat pada setiap tahunnya. Anggaran yang disediakan dipersiapkan untuk kegiatan reunifikasi keluarga bagi Penerima Manfaat diluar 105 orang Penerima Manfaat yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong : 105 orang sudah terdata untuk diberikan pemenuhan kebutuhan dasar minimal. Faktor Penghambat : Ada kemungkinan Orang akan dilakukan reunifikasi diluar data SPM (bersifat antisipatif).

Upaya/ solusi ke depan : Berupaya memasukkan/memunculkan melalui penganggaran pada program bantuan tidak terencana.

- c. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.041.400,- dan realisasi sebesar Rp. 54.269.850,- atau setara dengan 90,39%. *Output* sub kegiatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong: adanya SDM pendamping sosial serta Tim Reaksi Cepat yang salah satu tugasnya memberikan layanan serta pendataan sosial.

- d. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.350.862,- dan realisasi sebesar Rp. 36.116.500,- atau setara dengan 99,36%. *Output* sub kegiatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong: adanya SDM pendamping sosial serta Tim Reaksi Cepat yang salah satu tugasnya memberikan layanan serta pendataan sosial.

- e. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.612.500,- dan realisasi sebesar Rp. 15.687.648,- atau setara dengan 39,60%. *Output* sub kegiatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% karena tidak semua PMKS yang dirujuk ke layanan Panti/SENTRA/Instansi lain memerlukan pembiayaan yang dianggarkan.

Faktor Pendorong: Adanya PMKS yang memerlukan layanan rujukan ke Panti/SENTRA/Instansi. Faktor Penghambat : Masih adanya keluarga dari PMKS yang menolak menerima layanan rujukan.

Upaya/ solusi ke depan : Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang layanan rujukan kepada keluarga/Masyarakat.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22

Pencapaian Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100	88,31	88,31	100	86,45	86,45	-

Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial tahun 2024 sebesar 86,45% dari target 100%. Indikator program ini di dapat dari rumusan jumlah penerima perlindungan dan jaminan sosial yang berasal dari data PBI berjumlah 38.725 dibagi jumlah jiwa dalam DTKS berjumlah 44.794 dikali 100%.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut : Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial sebesar 86,45%. Alokasi anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 644.184.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 513.269.294,- setara dengan 79,68% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 23.258.100,- dengan realisasi sebesar Rp.

9.955.900,- setara dengan 42,80%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar. *Outcome* kegiatan adalah Terpeliharanya anak terlantar.

Faktor pendorong : Banyaknya Calon Orang Tua Angkat yang ingin melegalkan anak yang di adopsi secara legal negara untuk mendapatkan hak secara resmi bagi anak, Adanya pendampingan sosial bagi anak-anak terlantar.

Faktor penghambat : Masih adanya masyarakat yang belum memahami tata cara pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan masih adanya keluarga yang melepaskan sepenuhnya tanggung jawab ke LKSA setelah proses layanan rujukan.

Solusi : Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang tata cara pengangkatan anak kepada keluarga/masyarakat dan memberikan sosialisasi dan edukasi agar keluarga tetap melakukan pengawasan dan kunjungan selama masa rujukan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.993.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.080.000,- atau setara dengan 13,50%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% karena sub kegiatan ini bersifat antisipatif dan insidental. (Tidak adanya kasus penelantaran anak)

Faktor pendorong : Banyaknya Calon Orang Tua Angkat yang ingin melegalkan anak yang di adopsi secara legal negara untuk mendapatkan hak secara resmi bagi anak.

Faktor penghambat : - Banyak Calon Orang Tua Angkat yang belum memenuhi syarat secara administrasi (Usia Cota Belum Mencapai 30 Tahun Usia Minimum Sesuai aturan yang berlaku).

- Banyaknya Calon Anak Angkat yang tidak memiliki Adminduk yang orang tua kandungnya tidak dapat diketahui keberadaannya.

Upaya/ Solusi ke depan : Sosialisasi Tata Cara Proses Adopsi Anak ke Calon Orang Tua Angkat; - Sosialisasi Tata Cara Proses Adopsi Anak ke Calon Orang Tua Angkat.

- a. Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.264.600,- dan realisasi sebesar Rp. 8.875.900,-

atau setara dengan 58,15%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota.

Sub kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% dikarenakan sub kegiatan ini bersifat antisipatif dan insidental Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial untuk penitipan perbekalan bayi terlantar yang memperoleh layanan rujukan tidak tersealisasi dikarenakan tidak adanya kasus penelantaran anak (anak yang di buang).

Faktor pendorong : Adanya pendampingan sosial bagi anak-anak terlantar.

Faktor penghambat : Belum dapat dipastikan kasus penelantaran anak (anak yang di buang).

Upaya/ Solusi ke depan : Koordinasi, sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya penelantaran anak (Unit PPPA DSPPPA Kabupaten Belitung dan Unit PPPA Polres Belitung).

- (2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 620.925.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 503.313.394,- setara dengan 81,06%. *Output* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi. *Outcome* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat.

Faktor pendorong : adanya aplikasi siks-ng untuk pengelolaan data dtks yang sudah memadai.

Faktor penghambat : 1. Adanya keengganan desa/kel melaksanakan musdes/muskel untuk melakukan verval, kriteria kemiskinan masih menggunakan kriteria nasional/kemensos; 2. Tidak semua proposal yang masuk memenuhi syarat sebagai penerima bantuan serta tidak semua masyarakat mengetahui cara untuk mengakses program.

Solusinya adalah 1. Perlu ada regulasi bagi desa yang tidak melakukan musdes/muskel terkait dengan reward dan punishment serta perlu disusun kriteria kemiskinan yang menggambarkan masyarakat belitung; 2. Berupaya memasukkan/memunculkan melalui penganggaran pada program bantuan tidak terencana dan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang program kepada masyarakat.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 367.968.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 366.499.950,- atau setara dengan 99,60%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota.

Faktor pendorong : adanya aplikasi siks-ng untuk pengelolaan data dtks yang sudah memadai.

Faktor penghambat : adanya keengganan desa/kel melaksanakan musdes/muskel untuk melakukan verval, kriteria kemiskinan masih menggunakan kriteria nasional/kemensos.

Upaya/ Solusi ke depan : perlu ada regulasi bagi desa yang tidak melakukan musdes/muskel terkait dengan reward dan punishment serta perlu disusun kriteria kemiskinan yang menggambarkan masyarakat belitung.

- b. Sub Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.957.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 136.813.444,- atau setara dengan 54,09%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja dan realisasi anggaran kurang dari 80% Realisasi Keuangan di Bawah 80% karena sub kegiatan ini bersifat antisipatif dan insidental untuk masyarakat yang mengajukan proposal bantuan yang belum atau tidak ter-cover bantuan pemerintah daerah.

Faktor pendorong yaitu banyaknya masyarakat yang menyampaikan proposal bantuan ke Bupati Belitung melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Faktor penghambat yaitu Tidak semua proposal yang masuk memenuhi syarat sebagai penerima bantuan serta tidak semua masyarakat mengetahui cara untuk mengakses program.

Upaya/ solusi ke depan yaitu berupaya memasukkan/memunculkan melalui penganggaran pada program bantuan tidak terencana dan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang program kepada masyarakat.

5. Program Penanganan Bencana

Indikator Program Penanganan Bencana adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Untuk pencapaian indikator Program Penanganan Bencana pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23

Pencapaian Indikator Program Penanganan Bencana Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	100	-

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten tahun 2024 yaitu 100%. Dimana jumlah korban bencana yang terjadi di tahun 2024 yaitu 65 korban bencana (64 korban bencana alam dan 1 korban bencana sosial). Nilai persentase didapat dari rumusan Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi korban bencana alam dan sosial kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dikali 100%.

Faktor pendorong yaitu adanya relawan-relawan sosial dalam penanggulangan bencana. Faktor penghambat yaitu Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebencanaan. Solusi yaitu Melakukan kegiatan rutin pembinaan kepada seluruh anggota TAGANA Kabupaten Belitung.

Alokasi anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 438.517.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 398.107.550,- setara dengan 90,78% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 438.517.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 398.107.550,- setara dengan 90,78%. *Output* kegiatan adalah korban bencana yang menerima bantuan sosial. *Outcome* kegiatan terlayannya korban bencana.

Faktor pendorong yaitu adanya relawan-relawan sosial dalam penanggulangan bencana. Faktor penghambat yaitu Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebencanaan. Solusi yaitu Melakukan kegiatan rutin pembinaan kepada seluruh anggota TAGANA Kabupaten Belitung.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 438.517.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 398.107.550,- setara dengan 90,78%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendorong yaitu adanya relawan-relawan sosial dalam penanggulangan bencana. Faktor penghambat yaitu Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebencanaan. Solusi yaitu Melakukan kegiatan rutin pembinaan kepada seluruh anggota TAGANA Kabupaten Belitung.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Taman Makam Pahlawan yang tertata.

Untuk pencapaian indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24

Pencapaian Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang Tertata	100	100	100	100	100	100	-

Taman Makam Pahlawan yang tertata tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Persentase ini juga merupakan indikator program pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Program ini didapatkan dari rumus jumlah Taman Makam Pahlawan yang tertata yaitu 1 TMP yang terletak di Desa Perawas dengan nama Taman Makam Pahlawan Ksatria Tumbang Ganti.

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagai berikut : Taman Makam Pahlawan yang tertata sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 11.325.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.730.400,- setara dengan 50,60% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.325.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.730.400,- setara dengan 50,60%. *Output* kegiatan adalah telaksananya pengelolaan taman makam pahlawan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya taman makam pahlawan. penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.

Faktor pendukung : adanya taman makam pahlawan (TMP) yang akan dipelihara dan lokasi pemakaman di TMP. Faktor penghambat : tidak tersedianya anggaran perbaikan sarana prasarana TMP. Solusi : tetap mengupayakan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.325.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.730.400,- setara dengan 50,60%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota.

Realisasi sub kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan anggaran antisipasi pemakaman bagi veteran yang dimakamkan di TMP.

Faktor pendukung : adanya taman makam pahlawan (TMP) yang akan dipelihara dan lokasi pemakaman di TMP. Faktor penghambat : tidak tersedianya anggaran perbaikan sarana prasarana TMP. Solusi : tetap mengupayakan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan.

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang yang mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah dengan target 100%
- Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan target 75%
- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah dengan target 100%.
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100%

Untuk pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25

Pencapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	-
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75	78,70	104,93	78,80	78,93	100,16	
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100	

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah tahun 2024 sebesar 100 persen. Indikator ini merupakan program rutin sekretariat. Yang mencakup tersedianya dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan maupun dokumen keuangan lainnya.
2. Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah tahun 2024 sebesar 78,93% lebih besar dari target 78,80%. Indeks ASN ini diperoleh dari perhitungan oleh BKPSDM daerah yang bekerja sama dengan OPD.
3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tahun 2024 sebesar 100%. Merupakan program rutin sekretariat yang berupa administrasi dan pelayanan umum kantor.
4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tahun 2024 sebesar 100%. Merupakan program rutin sekretariat yang berupa pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, serta pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD DSPPPA.

Faktor pendukung Program rutin sekretariat adalah sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat yaitu Terdapat tambahan anggaran yang masuk pada pertengahan tahun yaitu Anggaran Insentif Fiskal sehingga untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa membutuhkan tambahan SDM serta waktu yang lebih panjang. Solusi yaitu Menambah SDM yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa serta membuat rencana kerja pengadaan.

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.089.055.091,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.829.527.996,- setara dengan 96,33% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.995.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.448.000,- atau setara dengan 89,04%. *Output* kegiatan adalah Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Pelaksanaan sinkronisasi dokumen perencanaan antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten atau dengan Kementerian Terkait terkendala dengan belum tersedianya anggaran perjalanan dinas untuk menghadiri undangan rapat koordinasi perencanaan..

Solusinya adalah menganggarkan pada Perjalanan Dinas dalam menghadiri Rapat Koordinasi pada Kegiatan ini ataupun menambah anggaran perjalanan dinas pada Sub Kegiatan lainnya.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.995.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.746.000,- atau setara dengan 91,69%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.702.000,- atau setara dengan 85,10%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.949.864.271,- dan realisasi sebesar Rp. 4.838.949.188,- atau setara dengan 97,76%. *Output* kegiatan adalah dokumen keuangan perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.
- Faktor penghambat capaian kinerja adalah Kurangnya anggaran yang tersedia dalam pemenuhan gaji dan tunjangan ASN. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik yaitu menghitung secara seksama untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.
- Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.946.864.271,- dan realisasi sebesar Rp. 4.836.429.688,- atau setara dengan 97,77%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan

realisasi sebesar Rp. 2.519.500,- atau setara dengan 83,98%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

- (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.850.913,- atau setara dengan 95,92%. *Output* kegiatan adalah Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Realisasi anggaran dibawah 80% dikarenakan beberapa Diklat / Bimtek yang sudah direncanakan bisa diikuti secara online / daring seperti diklat Pengadaan Barang/Jasa. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka Kebutuhan diklat / bimtek dihitung secara real sesuai dengan permintaan dari ASN / Pegawai yang akan melakukan peningkatan kapasitas.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.700.000,- atau setara dengan 98,00%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.150.913,- atau setara dengan 56,30%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Realisasi anggaran dibawah 80% dikarenakan beberapa Diklat / Bimtek yang sudah direncanakan bisa diikuti secara online / daring seperti diklat Pengadaan Barang/Jasa. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka Kebutuhan diklat /

bimtek dihitung secara real sesuai dengan permintaan dari ASN / Pegawai yang akan melakukan peningkatan kapasitas.

- (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 678.597.975,- dan realisasi sebesar Rp. 634.658.581,- atau setara dengan 93,53%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah *Outcome* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Terdapat tambahan anggaran yang masuk pada pertengahan tahun yaitu Anggaran Insentif Fiskal sehingga untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa membutuhkan tambahan SDM serta waktu yang lebih panjang. Solusinya yaitu menambah SDM yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa serta membuat rencana kerja pengadaan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.959.000,- atau setara dengan 99,59%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.121.758,- dan realisasi sebesar Rp. 198.430.440,- atau setara dengan 90,15%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah terdapat tambahan anggaran yang masuk pada pertengahan tahun yaitu Anggaran Insentif Fiskal sehingga untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa membutuhkan tambahan SDM serta waktu yang lebih panjang. Solusinya yaitu menambah SDM yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa serta membuat rencana kerja

pengadaan.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.759.137,- dan realisasi sebesar Rp. 97.941.500,- atau setara dengan 85,35%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Terdapat tambahan anggaran yang masuk pada pertengahan tahun yaitu Anggaran Insentif Fiskal sehingga untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa membutuhkan tambahan SDM serta waktu yang lebih panjang. Solusinya yaitu menambah SDM yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa serta membuat rencana kerja pengadaan.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.455.800,- dan realisasi sebesar Rp. 118.587.450,- atau setara dengan 99,27%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.700.000,- dan realisasi sebesar Rp. 36.376.000,- atau setara dengan 89,38%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.885.000,- atau setara dengan 97,70%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.561.100,- dan realisasi sebesar Rp. 168.479.191,- atau setara dengan 99,95%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

(5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 560.804.845,- dan realisasi sebesar Rp. 506.722.000,- atau setara dengan 90,36%. *Output* kegiatan adalah Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Terdapat tambahan anggaran yang masuk pada pertengahan tahun yaitu Anggaran Insentif Fiskal sehingga untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa membutuhkan tambahan SDM serta waktu yang lebih panjang. Solusinya yaitu Menambah SDM yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa serta membuat rencana kerja pengadaan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.720.000,- dan realisasi sebesar Rp. 51.020.000,- atau setara dengan 88,39%. *Output* sub kegiatan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Terdapat tambahan anggaran yang masuk pada pertengahan tahun yaitu Anggaran Insentif Fiskal sehingga untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa membutuhkan tambahan SDM serta waktu yang lebih panjang. Solusinya yaitu Menambah SDM yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa serta membuat rencana kerja pengadaan.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.820.200,- dan realisasi sebesar Rp. 86.707.000,- atau setara dengan 95,47%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah paket mebel yang disediakan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 412.264.645,- dan realisasi sebesar Rp. 368.995.000,- atau setara dengan 89,50%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Terdapat tambahan anggaran yang masuk pada pertengahan tahun yaitu Anggaran Insentif Fiskal sehingga untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa membutuhkan tambahan SDM serta waktu yang lebih panjang. Solusinya yaitu Menambah SDM yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa serta membuat rencana kerja pengadaan.
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 239.083.000,- dan realisasi sebesar Rp. 228.671.749,- atau setara dengan 95,65%. *Output* kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Terdapat tambahan anggaran yang masuk pada pertengahan tahun yaitu Anggaran Insentif Fiskal serta pada P-APBD sehingga untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa membutuhkan tambahan SDM serta waktu yang lebih panjang. Selain itu terdapat beberapa spesifikasi barang yang akan diadakan dengan spesifikasi yang berbeda dengan yang tersedia di pasaran. Solusinya adalah melakukan perubahan pada DPA dengan penyesuaian spesifikasi barang yang tersedia di e-katalog.
Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau setara dengan 66,67%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Realisasi kurang dari 80% dimana biaya pengiriman surat menyurat tidak direalisasikan karena pengiriman menggunakan media elektronik.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 60.780.749,- atau setara dengan 86,83%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.083.000,- dan realisasi sebesar Rp. 165.891.000,- atau setara dengan 99,88%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 209.694.922,- dan realisasi sebesar Rp. 141.795.010,- atau setara dengan 67,62%. *Output* kegiatan adalah barang milik daerah dalam kondisi baik. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terutama Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang dilaksanakan pada P-APBD merupakan waktu yang agak kurang / mepet serta tidak tersedianya SDM yang cukup mampu dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi. Solusinya adalah

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya sebaiknya dilaksanakan pada Anggaran Induk pada Tahun Berjalan sehingga waktu yang digunakan relatif lebih longgar.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.677.500,- atau setara dengan 94,95%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.250.000,- dan realisasi sebesar Rp. 148.378.965,- atau setara dengan 93,17%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.425.000,- atau setara dengan 97,86%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah mebel yang dipelihara.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 29.410.000,- atau setara dengan 98,03%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 351.960.000,- dan /realisasi sebesar Rp. 348.336.100,- atau setara dengan 98,97%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/ direhabilitasi.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terutama Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang dilaksanakan pada P-APBD merupakan waktu yang agak kurang / mepet serta tidak tersedianya SDM yang cukup mampu dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi. Solusinya adalah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya sebaiknya dilaksanakan pada Anggaran Induk pada Tahun Berjalan sehingga waktu yang digunakan relatif lebih longgar.

Tujuan / Sasaran strategis 2

Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Sasaran 2 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Tujuan Strategis 2 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Belitung 2024-2026, pada misi ke-1 Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan setra mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**, target pada tahun 2024 adalah 53,43 di Kabupaten Belitung
2. **Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)**, target pada tahun 2024 adalah Pratama di Kabupaten Belitung.

Hasil evaluasi capaian tujuan 2 dan sasaran 2, dengan 2 (dua) indikator kinerja tahun 2024 diperoleh rata-rata nilai capaian 100,04% dan termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47	53,47	53,43	53,47 (masih gunakan data 2023, belum rilis BPS)	113,66	100,07
2	Sasaran : Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	Pratama	Pratama	-	100
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran						113,66	100,04

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 2 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan adalah sebesar 104,04% dengan Rata-rata capaian kategori sangat baik, karena melebihi target yang ditetapkan yaitu pencapaian 53,47 dari target 53,43.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
Dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2023	2024		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,42	53,47	0,05	Data 2024 memakai data 2023, (Data belum rilis dari kementerian / BPS)
2.	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	Pratama	-	Indikator Negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.28
Pencapaian Tujuan/ Sasaran IDG dan APE

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,42	53,43	53,47	100,07	53,45	100,04
2.	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	Pratama	Pratama	100	Madya	50

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 datanya belum tersedia baik di BPS maupun di Provinsi, untuk nilai tersebut tahun 2024 masih mengambil data IDG tahun sebelumnya yaitu 53,47. IDG ini diperoleh dari rumusan Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis, yang datanya bersumber di BPS dan Profil Data Gender. Untuk tahun 2024, IDG masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan data belum rilis dari Badan Pusat Statistik.

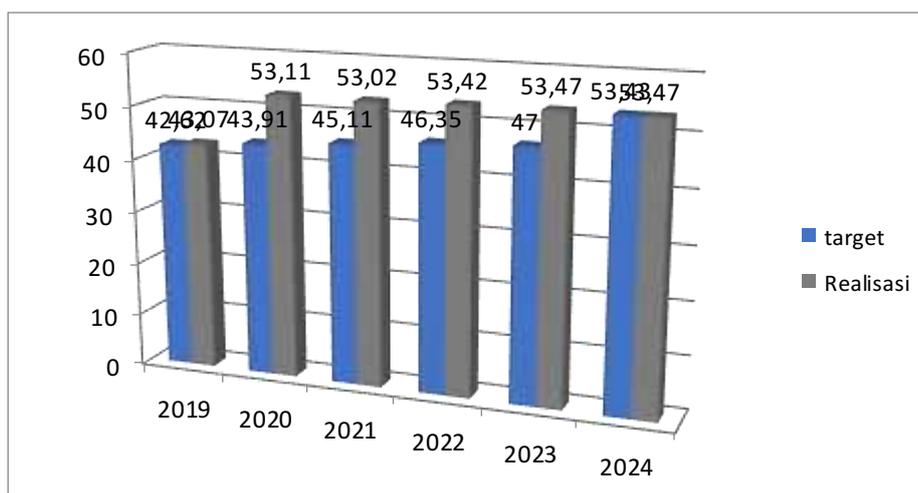
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam Pembangunan.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik dan hukum.

Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai atau pelatihan kepemimpinan untuk perempuan, serta perlunya koordinasi dengan BPS ataupun DP3ACSKB Provisi Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator ini merupakan indikator Tujuan yang kedua yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Capaian kinerja selama lima tahun dari indikator ini dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.3. IDG Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan indikator IDG data 2024 belum muncul dari Badan Pusat Statistik.

Untuk mencapai tujuan ini, maka didukung oleh sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan.

2) Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Untuk mengukur Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Anugerah Parahita Ekapraya

(APE) merupakan penghargaan yang diberikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta memenuhi kebutuhan anak.

Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Belitung tahun 2024 masih dalam predikat Pratama sama dengan APE tahun 2023. Penilaian APE setiap dua tahun sekali dari Kementerian PPA RI.

Faktor pendukung indikator ini adalah Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong dan memastikan implementasi kebijakan berbasis gender. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah kurangnya kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta, masyarakat dan LSM. Adapun Solusi yang akan dilakukan adalah Penguatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk memperkuat implementasi kebijakan berbasis gender.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh :

1) Adanya sumber anggaran yang memadai

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

- 1) Meningkatkan SDM Pelayanan;
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan;
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat/ pelatihan sesuai dengan tupoksinya;
- 4) Meningkatkan koordinasi kepada OPD terkait.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut :



Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung (Bpk. Kasimin, S.IP., MAB) mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung menerima Penghargaan APE Kategori Pratama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI (2023)



Peringatan Hari Ibu Kabupaten Belitung Tahun 2024



Senam Sehat Peringatan Hari Ibu Tahun 2024



Ziarah dalam Rangka Peringatan Hari Ibu dan HUT GOW tahun 2024



Anjongsana



Bantuan Sembako kepada Kaum Dhuafa



Sosialisasi Anti Bullying di SMP Negeri 4 Tanjungpandan



Peringatan Hari Kartini Gabungan Organisasi Perempuan



Sosialisasi Dasar Ramah Perempuan dan Peduli Anak



Pemberian Bantuan Alat Permainan Edukatif

Gambar 3.2. Dokumentasi foto kegiatan yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Kedua

Capaian Tujuan/Sasaran 2, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE) diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD.

Untuk pencapaian indikator ini pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Pencapaian Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,5	48,48	9696	36	44,11	122,53	-

Capaian indikator kinerja Program Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2024 yaitu 44,11% diatas target sebesar 36%. Nilai diperoleh dari rumusan jumlah anggaran yang responsive gender seluruh Perangkat Daerah Rp. 527.091.670.494,- dibagi jumlah anggaran Belanja operasional dan belanja modal APBD 1.1194.818.506.736,- dikali 100%.

Realisasi pencapaian indikator ini meningkat sebesar 0,71% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai persentase ARG 48,48% (Indikator outcome pada laporan LPPD). Faktor pendukung dari capaian ini adalah Dukungan Pimpinan Lembaga Pemerintahan terhadap penerapan kebijakan pengarusutamaan gender. Faktor penghambat yaitu Kurangnya SDM terlatih yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya analisis gender dalam kebijakan dan program Pembangunan. Dan Solusi perbaikan adalah Pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep PUG.

Alokasi anggaran Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebesar Rp. 439.498.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 435.651.334,- setara dengan 99,23% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.326.000,- dan realisasi sebesar Rp. 33.966.600,- atau setara dengan 93,51%. *Output* kegiatan adalah Lembaga Pemerintahan Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG. *Outcome* kegiatan adalah Terlaksananya kebijakan PUG.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Upaya/ solusi ke depan :

- Peningkatan kompetensi SDM yang membidangi PUG PP.
- Penambahan SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.
- Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) / Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Pemberdayaan Perempuan (PP).
- Meningkatkan forum Driver PUG, Pokja PUG untuk meningkatkan ARG pada seluruh OPD.
- Meningkatkan kapasitas Tim Penggerak/ Driver PUG dan Pokja PUG.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.326.000,- dan realisasi sebesar Rp. 33.966.600,- atau setara dengan 93,50%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian indikator tersebut didukung oleh Dukungan Pimpinan Lembaga Pemerintahan terhadap penerapan kebijakan pengarusutamaan gender.

Faktor penghambat yaitu Kurangnya SDM terlatih yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya analisis gender dalam kebijakan dan program Pembangunan.

Solusinya yaitu pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep PUG.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

- (2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.497.900,- dan realisasi sebesar Rp 369.247.284,- atau setara dengan 99,66%. *Output* kegiatan adalah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyara Terfasilitasinya organisasi perempuan. *Outcome* kegiatan yaitu meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Capaian indikator tersebut didukung oleh Anggaran dan pendanaan yang memadai sehingga kegiatan organisasi perempuan dapat dilaksanakan.

Faktor penghambat yaitu Beberapa organisasi perempuan kurang terlibat aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Solusinya yaitu Melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi Perempuan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.497.900,- dan realisasi sebesar Rp. 369.247.284,- atau setara dengan 99,66%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung yaitu Adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah dan organisasi Perempuan. Faktor penghambat yaitu Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perempuan tidak selalu melibatkan pemerintah daerah. Solusinya adalah melakukan pembinaan yang lebih intens kepada

organisasi Perempuan.

- (3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.675.000,- dan realisasi sebesar Rp. 32.437.450,- atau setara dengan 99,27%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak.

Capaian indikator tersebut didukung oleh Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Fasilitator) Forum PUSPA yang kompeten dan berpengalaman dalam isu gender.

Faktor penghambat yaitu Tidak terlaksananya penguatan kapasitas SDM Forum PUSPA. Solusi yaitu Forum PUSPA melakukan pelatihan internal agar mereka lebih siap dalam menjalankan kegiatan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 16.993.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.863.200,- atau setara dengan 99,24%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan.

Capaian indikator tersebut didukung oleh Program atau kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan merupakan penyelesaian dari masalah sosial Masyarakat.

Faktor penghambat yaitu Anggaran operasional Forum PUSPA yang kurang memadai, sehingga kegiatan terbatas.

Upaya kedepan yaitu merancang kegiatan prioritas sesuai dengan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 15.682.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.574.250,- atau setara dengan 99,31%. *Output* sub kegiatan adalah

Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota.

Capaian indikator tersebut didukung oleh Perencanaan dan persiapan kegiatan yang cukup matang, sehingga KIE dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor penghambat yaitu Anggaran yang terbatas menyebabkan pelaksanaan sosialisasi DRPPA dilaksanakan secara bertahap.

Upaya kedepan yaitu Membuat daftar isu atau permasalahan yang terjadi pada masing-masing desa/kelurahan.

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah persentase keluarga yang terlayani. Untuk pencapaian indikator program perlindungan perempuan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30

Pencapaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani	-	-	-	100	100	100	-

Persentase keluarga yang terlayani tahun 2024 yaitu 100%. Persentase keluarga yang terlayani tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%. Terlaksanakannya kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga Seroja Bertuah yang meliputi Sosialisasi Parenting, Layanan Tumbuh Kembang Psikolog, dan Rapat Pengurus Puspaga.

Faktor pendukung yaitu Keingintahuan masyarakat kepada ilmu parenting dan tumbuh kembang anak mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan terkait dengan pembelajaran keluarga. Faktor penghambat adalah Anggaran yang terlalu minim agar dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan pada Pusat Pembelajaran Keluarga sehingga tidak banyak yang bisa diakomodir pada layanan maupun kegiatan sosialisasi. Dan solusinya yaitu Menyelipkan kegiatan yang sifatnya pembelajaran keluarga pada program-program lainnya. Dengan demikian tujuan dan visi pembelajaran keluarga dapat terbantu meskipun dengan anggaran terbatas.

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai berikut : Persentase keluarga yang terlayani sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Perlindungan Perempuan adalah sebesar Rp. 12.132.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.880.000,- setara dengan 97,92% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.132.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.880.000,- setara dengan 97,92%. *Output* kegiatan adalah lembaga keluarga yang dibina. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan keluarga.

Faktor pendukung yaitu adanya Keingintahuan masyarakat kepada ilmu parenting dan tumbuh kembang anak mendukung terlaksakannya kegiatan-kegiatan terkait dengan pembelajaran keluarga.

Faktor penghambat yaitu Anggaran yang terlalu minim agar dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan pada Pusat Pembelajaran Keluarga sehingga tidak banyak yang bisa diakomodir pada layanan maupun kegiatan sosialisasi.

Solusinya yaitu Menyelipkan kegiatan yang sifatnya pembelajaran keluarga pada program-program lainnya. Dengan demikian tujuan dan visi pembelajaran keluarga dapat terbantu meskipun dengan anggaran terbatas.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.132.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.880.000,- setara dengan 97,92%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan.

Faktor pendukung yaitu adanya Keingintahuan masyarakat kepada ilmu parenting dan tumbuh kembang anak mendukung terlaksakannya kegiatan-kegiatan terkait dengan pembelajaran keluarga.

Faktor penghambat yaitu Anggaran yang terlalu minim agar dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan pada Pusat Pembelajaran Keluarga sehingga tidak banyak yang bisa diakomodir pada layanan maupun kegiatan sosialisasi.

Solusinya yaitu Menyelipkan kegiatan yang sifatnya pembelajaran keluarga pada program-program lainnya. Dengan demikian tujuan dan visi pembelajaran keluarga dapat terbantu meskipun dengan anggaran terbatas.

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

Untuk pencapaian indikator program pengelolaan sistem data gender dan anak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Pencapaian Indikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA)	25	75	300	65	78,82	121,26	-

Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) tahun 2024 sebesar 78,82% lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu 65%. Capaian indikator ini didapat dari Komponen data gender dan anak yang terpenuhi dibagi jumlah komponen data SIGA dikali 100%. Dari 85 komponen data SIGA sudah 67 komponen yang terpenuhi atau sekitar 78,82%. Faktor pendorong yaitu Ketersediaan anggaran untuk melakukan koordinasi ke berbagai desa. Faktor penghambat yaitu Kurangnya kepedulian untuk menyampaikan data sesuai waktu yang ditentukan, dan Solusinya adalah Melakukan koordinasi secara intensif ke desa-desa untuk memperoleh data yang diperlukan.

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai berikut : Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebesar 65%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah sebesar Rp. 45.671.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.377.200,- setara dengan 88,40% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.671.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.377.200,- setara dengan 88,41%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data gender dan anak . *Outcome* kegiatan adalah data terpilah dan informasi gender yang akurat.

Faktor Pendukung adalah Ketersediaan anggaran untuk melakukan koordinasi ke berbagai desa.

Faktor penghambat yaitu Kurangnya kepedulian untuk menyampaikan data sesuai waktu yang ditentukan.

Solusi yang diperlukan yaitu Melakukan koordinasi secara intensif ke desa-desa untuk memperoleh data yang diperlukan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 45.671.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.377.200,- setara dengan 88,40%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/ Kota yang tersedia.

Capaian indikator tersebut didukung Ketersediaan anggaran untuk melakukan koordinasi ke berbagai desa. Faktor penghambat yaitu Kurangnya kepedulian untuk menyampaikan data sesuai waktu yang ditentukan.

Solusi yang diperlukan yaitu Melakukan koordinasi secara intensif ke desa-desa untuk memperoleh data yang diperlukan.

Tujuan/Sasaran strategis 3

Tujuan 3 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Tujuan dan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Belitung 2024–2026, pada misi

ke-1 Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan setra mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja yang sama:

Rasio kekerasan perempuan dan anak, yang targetnya pada tahun 2024 adalah 3,2 di Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 3 dan sasaran 3, dengan 2 (dua) indikator kinerja yang sama diperoleh rata-rata nilai capaian 71,91 dan termasuk kategori Cukup (indikator negatif).

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan : Rasio kekerasan Perempuan dan anak	-	-	3,2	4,45 (indikator negative)	-	71,91
2	Sasaran : Rasio kekerasan Perempuan dan anak	-	-	3,2	4,45 (indikator negative)	-	71,91
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran						-	71,91

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan dan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan tahun 2024 adalah sebesar 71,91.

Capaian kinerja tahun 2024 ini merupakan indikator baru (tahun pertama renstra 2024-2026) sehingga nilai tahun sebelumnya masih kosong. Capaian bisa terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2023	2024		
1	Rasio kekerasan perempuan dan anak	%	-	4,45	4,45	Indikator negatif
2	Rasio kekerasan perempuan dan anak	%	-	4,45	4,45	Indikator negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.34
Pencapaian Tujuan/ Sasaran
KLA dan Prevalensi Kekerasan terhadap anak

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Rasio kekerasan perempuan dan anak	-	3,2	4,45 (indikator negative)	71,91	3,16	71,01
2	Rasio kekerasan perempuan dan anak	-	3,2	4,45 (indikator negative)	71,91	3,16	71,01

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk setiap indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

1) Rasio kekerasan perempuan dan anak

Rasio kekerasan Perempuan dan anak tahun 2024 adalah 4,45 dari target 3,2. Indikator ini merupakan indikator negatif. Rasio kekerasan ini didapatkan dari rumusan Jumlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak / jumlah penduduk perempuan dan anak x 100%. Dimana terdapat 42 kasus kekerasan Perempuan dan anak dibagi dengan 94.958 jumlah penduduk Perempuan dan anak dikali 10.000.

Indikator ini merupakan indikator negatif. Dalam kondisi lain, meningkatnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengindikasikan bahwa lebih banyak orang yang menyadari pentingnya melaporkan kekerasan dan mendapatkan bantuan, hal tersebut didukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melakukan upaya pencegahan melalui kampanye, sosialisasi, pelatihan/workshop dan peningkatan akses layanan melalui penguatan peran dan fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Angka prevalensi kekerasan sendiri dapat berarti bahwa jumlah kasus yang ditangani belum menunjukkan jumlah kasus kekerasan sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es. Data jumlah kasus dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Belitung. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain.

Faktor pendukung daripada layanan penanganan kasus antara lain adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tugas dan fungsi dari lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Hambatan yang dialami antara lain adalah kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dalam pelayanan penanganan kasus, koordinasi yang belum sinergis antara lembaga layanan dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti tersedianya UPTD PPA sebagai pemangku pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu permasalahan pada ranah domestik juga sering mendapat hambatan karena masyarakat cenderung sering menutupi karena merasa bahwa permasalahan ini adalah aib.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait;
- 2) Komitmen dan Sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan instansi terkait pemenuhan hak anak.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh :

- 1) Adanya sumber anggaran yang memadai.
- 2) Data yang belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan/ kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

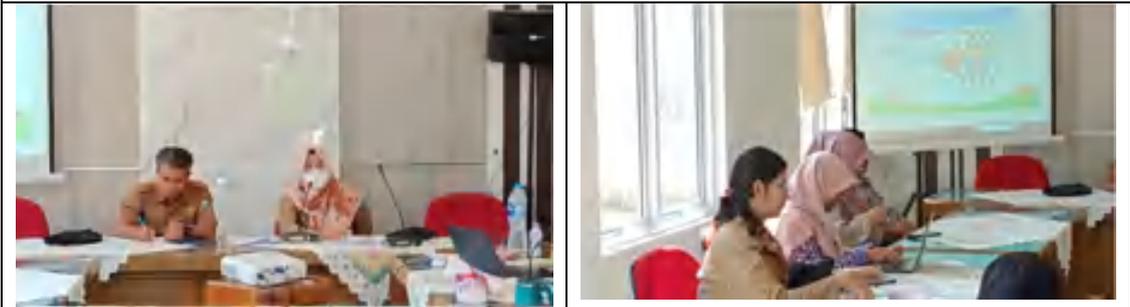
- 1) Meningkatkan SDM Pelayanan;
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan;
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat/ pelatihan sesuai dengan tupoksinya;
- 4) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada Stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut :





Peningkatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten Belitung



Rapat Pertemuan koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak



Kegiatan Seakar Cita



Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Belitung

Layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung



Layanan pendampingan Mediasi klien AP



Layanan penjangkauan penerima manfaat korban KDRT



Layanan Pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual



Layanan penjangkauan penerima manfaat korban KDRT



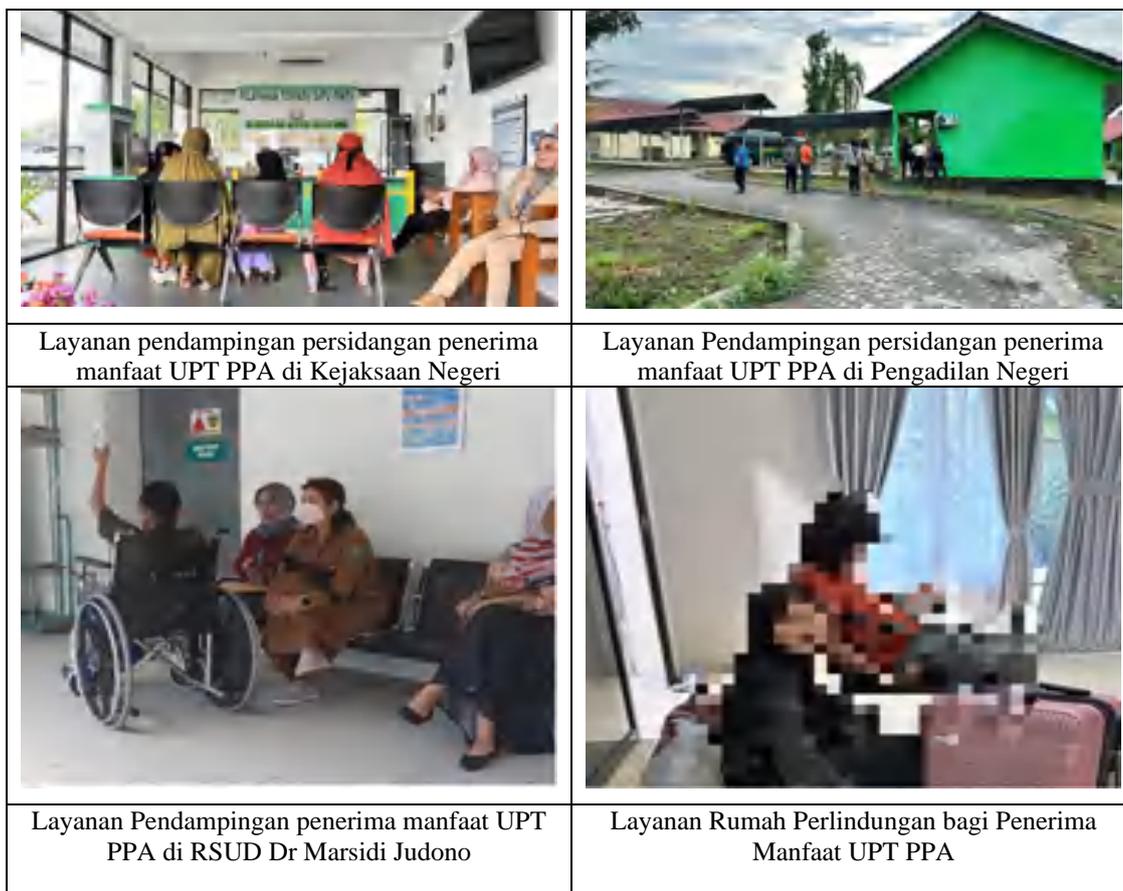
Layanan Rujukan penerima manfaat ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak



Layanan Rujukan penerima manfaat untuk pemeriksaan psikologi forensik



Layanan Pengaduan penerima manfaat UPT PPA



Layanan pendampingan persidangan penerima manfaat UPT PPA di Kejaksaan Negeri

Layanan Pendampingan persidangan penerima manfaat UPT PPA di Pengadilan Negeri

Layanan Pendampingan penerima manfaat UPT PPA di RSUD Dr Marsidi Judono

Layanan Rumah Perlindungan bagi Penerima Manfaat UPT PPA

Gambar 3.3. Dokumentasi foto kegiatan yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Ketiga

Adapun capaian Tujuan/Sasaran 3 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Perlindungan Perempuan

Indikator program Perlindungan Perempuan adalah persentase layanan perlindungan perempuan. Untuk pencapaian indikator program perlindungan perempuan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Pencapaian Indikator Program Perlindungan Perempuan
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	100	100	100	100	100	100	-

Persentase layanan perlindungan perempuan tahun 2024 yaitu 100%. Indikator ini didapatkan dari rumusan jumlah korban kekerasan perempuan yang melapor 18 orang sama dengan jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan dikali 100%. Jumlah kasus kekerasan perempuan yang melapor meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebanyak 49 kasus perempuan.

Angka prevelensi kekerasan sendiri dapat berarti bahwa jumlah kasus yang ditangani belum menunjukkan jumlah kasus kekerasan sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kasus terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang diterima seluruhnya dilayani dan ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain. Data yang dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Belitung.

Faktor pendukung yaitu adanya komitmen, relasi, dari para pihak dan dari lembaga jejaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu pelaksanaan.

Faktor penghambat yaitu Perlu upaya lebih intensif agar koordinasi dan sinkronisasi dapat terjalin lebih kuat. Komitmen dari setiap pelaksana perlindungan Perempuan dan Anak perlu terus dikuatkan. Solusi secara rutin mengadakan pertemuan dan koordinasi antar lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut : Persentase layanan perlindungan perempuan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Perlindungan Perempuan adalah sebesar Rp. 394.720.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 195.433.106,- setara dengan 49,51% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.668.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.553.060,- setara dengan 91,58%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase penanganan kasus.

Faktor pendukung yaitu adanya Koordinasi antara Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang terjalin cukup baik serta telah tersedianya kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Faktor penghambat yaitu Perlu upaya lebih intensif agar koordinasi dan sinkronisasi dapat terjalin lebih kuat. Komitmen dari setiap pelaksana perlindungan Perempuan

dan Anak perlu terus dikuatkan.

Solusinya yaitu Secara rutin mengadakan pertemuan dan koordinasi antar lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.668.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.553.060,- setara dengan 91,58%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung yaitu adanya Koordinasi antara Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang terjalin cukup baik serta telah tersedianya kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Faktor penghambat yaitu Perlu upaya lebih intensif agar koordinasi dan sinkronisasi dapat terjalin lebih kuat. Komitmen dari setiap pelaksana perlindungan Perempuan dan Anak perlu terus dikuatkan.

Solusinya yaitu Secara rutin mengadakan pertemuan dan koordinasi antar lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.052.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.880.046,- setara dengan 40,02%. *Output* kegiatan adalah jumlah lembaga yang terfasilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan perlindungan perempuan.

Faktor pendukung yaitu adanya komitmen, relasi, dari para pihak dan dari lembaga jejaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu pelaksanaan.

Faktor penghambat yaitu Penerima Manfaat/ Klien/ Keluarga tidak kooperatif; dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendampingan oleh UPT PPA.

Solusinya yaitu Memberikan pemahaman mengenai perlunya pendampingan pada penerima manfaat yang mengalami kekerasan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.052.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.880.046,- setara dengan 40,02%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Realisasi sub kegiatan ini dibawah 80% dikarenakan anggaran disiapkan sebagaiantisipasi bila terjadi kasus kekerasan pada perempuan atau anak.

Faktor Pendukung antara lain adalah adanya Unit PPA Polres Belitung, Biro Psikologi, RSUD, UPT PPA Prov. Kep.Babel, KemenPPA, dan LPSK.

Faktor penghambat yaitu Penerima Manfaat/ Klien/ Keluarga tidak kooperatif; dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendampingan oleh UPT PPA.

Solusinya yaitu Memberikan pemahaman mengenai perlunya pendampingan pada penerima manfaat yang mengalami kekerasan.

2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator Program Pemenuhan Hak Anak adalah Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Madya.

Indikator ini diperoleh dengan melihat skor penilaian KLA tahun 2023. Dimana untuk tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI hanya evaluasi penilaian mandiri yang akan dilakukan tahun 2025 mendatang (penilaian KLA setiap dua tahun sekali). Tahun 2023 Kabupaten Belitung meaih Predikat KLA Tingkat Madya dengan Skor KLA 581,52.

Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 100%.

Untuk pencapaian indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36

Pencapaian Indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tahun 204

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya	100	Madya	Madya	100	-

Pada perolehan penilaian KLA tersebut ada beberapa poin penting yang belum dilaksanakan untuk memenuhi indikator pemenuhan hak anak ini, yaitu :

1. Belum tersedia kebijakan terkait dengan Informasi Layak Anak.
2. Belum terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
3. Masih tingginya angka pernikahan anak.
4. Belum tersedia SDM di Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang telah mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak.
5. Belum tersedia Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandarisasi dan merata di seluruh desa dan kelurahan.
6. Belum banyak terbentuk kerjasama dari Dunia Usaha dan Media untuk melakukan promosi dan kampanye tentang Pemenuhan hak dan perlindungan anak.
7. Belum banyak tersedia fasilitas untuk anak disabilitas.
8. Belum kuatnya implementasi dari Kawasan Tanpa rokok.
9. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ramah Anak yang sesuai dengan standar.
10. Belum tersedianya Rumah Ibadah ramah Anak
11. Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektor terkait dengan perlindungan anak.

Strategi yang dilakukan :

1. Memperkuat peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
2. Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
3. Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungan secara terus menerus kepada masyarakat.

Status Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2024 adalah Madya. Predikat KLA Madya ini telah diraih Kabupaten Belitung pada Tahun 2023. Faktor pendorong KLA antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA. Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak. Solusi ke depan yaitu melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

Capaian indikator kinerja Program Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut : Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama. Alokasi anggaran Program Pemenuhan Hak Anak adalah sebesar Rp. 270.743.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 228.070.519,- setara dengan 84,24% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.713.850,- dan realisasi sebesar Rp. 12.696.100,- atau setara dengan 92,58%. *Output* kegiatan adalah tercapainya peningkatan status KLA. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan terhadap anak.

Faktor pendukung yaitu Pemahaman Masyarakat dan stake holder terkait sudah cukup baik dalam upaya pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Program Pemenuhan Hak Anak sudah banyak dilakan oleh setiap stake holder namun pendataannya belum terintegrasi dengan baik.

Upaya/ solusi ke depan : Perlu langkah strategis yang lebih masif agar pendataan Evaluasi Kabupaten Layak Anak dapat terlaksana secara baik. Dalam hal ini komitmen daripada stake holder terkait menjadi penting.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.713.850,- dan realisasi sebesar Rp. 12.696.100,- atau setara dengan 92,58%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan Hak Anak.

Upaya/ solusi ke depan : Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

- (2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 257.029.900,- dan realisasi sebesar Rp. 215.374.419,- atau setara dengan 83,79%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya forum anak kabupaten belitung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan terhadap anak.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Anggaran yang sangat minim untuk mengakomodir partisipasi anak dari seluruh Kabupaten Belitung.

Upaya/ solusi ke depan : Dengan anggaran yang terbatas, namun Forum Anak dapat mengupayakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk penguatan dan pengembangan lembaga sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.000.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub kegiatan belum terealisasi terkait Penyusunan Perda dikarenakan data yang diperlukan belum terkumpul untuk penyusunan materi.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Penyusunan Perda di tunda dikarenakan data yang diperlukan belum terkumpul untuk penyusunan materi.

Upaya/ solusi ke depan : Melakukan pengumpulan data dan koordinasi secara berkelanjutan kepada stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan penyusunan Perda.

- b. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.527.000,- dan realisasi sebesar Rp. 207.991.700,- atau setara dengan 93,05%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak. Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan Hak Anak.

Upayanya yaitu melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

3. Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator Program Perlindungan Khusus Anak adalah persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.

Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 100%

Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan Khusus Anak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37**Pencapaian Indikator Program Perlindungan Khusus Anak Tahun 2024**

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	-

Indikator persentase penanganan anak korban kekerasan didapat dari rumusan jumlah anak korban kekerasan/ jumlah anak korban kekerasan yang ditangani x 100%.

Persentase penanganan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tahun 2024 yaitu 100 persen, dengan jumlah anak korban kekerasan sebanyak 24 orang meningkat dari tahun sebelumnya berjumlah 13 orang. Dan semua kasus yang masuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun lembaga lainnya ditangani 100%.

Jumlah kasus yang diterima seluruhnya dilayani dan ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain. Data yang dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Belitung.

Faktor pendukung adalah Atensi Masyarakat untuk terlibat pada kegiatan pencegahan kekerasan cukup baik. Sedangkan faktor penghambat yaitu Kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan konteks permasalahan yang ada di Kabupaten Belitung. Dan Solusi ke depan yaitu Kegiatan Pencegahan direncanakan berdasarkan permasalahan yang ada pada konteks masyarakat Belitung.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten. Alokasi anggaran Program Perlindungan Khusus Anak adalah sebesar Rp. 223.527.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 207.991.700,- setara dengan 93,05% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 126.542.500,- setara dengan 97,34%. *Output* kegiatan adalah tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang tersedia di Desa.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Faktor penghambat Beberapa Desa/kelurahan belum teradvokasi tentang peran Kelompok PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

Solusi yaitu Upaya untuk mengaktifkan Kelompok PATBM dengan terus mengadvokasi kepada Desa/Kelurahan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 126.542.500,- setara dengan 97,34%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA.

Faktor pendukung : Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yg tersedia di Desa; dan Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Faktor penghambat anggaran yang terbatas dikarenakan suasana pandemi menyebabkan ruang lingkup kegiatan menjadi terbatas. Dan koordinasi dan keaktifan lembaga PATBM yang masih kurang.

(2) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.127.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.073.200,- setara dengan 59,94%. *Output* kegiatan adalah tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat

Desa/ Kelurahan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang tersedia di Desa.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Faktor penghambat Anggaran yang minim agar AMPK mendapat layanan.

Solusi yaitu Bekerjasama dengan lembaga layanan agar AMPK mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.127.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.073.200,- setara dengan 59,94%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan.

Sub Kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% dikarenakan Tim Pelaksana kegiatan terdiri dari ASN, sehingga honorarium panitia pembinaan dari Non ASN tidak dapat direalisasikan.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang tersedia di Desa.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Faktor penghambat Anggaran yang minim agar AMPK mendapat layanan.

Solusi yaitu bekerjasama dengan lembaga layanan agar AMPK mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.376.000,- setara dengan 88,66%. *Output* kegiatan adalah tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan. *Outcome*

kegiatan adalah meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang tersedia di Desa.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Faktor pendukung :

SDM yang mengikuti pelatihan dengan baik dan mampu latih pada Perlindungan Anak. Faktor penghambat Belum semua SDM dapat terakomodir dalam pelatihan ini. Solusi yaitu Agar pelatihan-pelatihan serupa dapat direncanakan untuk diakses oleh SDM Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.376.000,- setara dengan 88,86%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK.

Faktor pendukung SDM yang mengikuti pelatihan dengan baik dan mampu latih pada Perlindungan Anak. Faktor penghambat Belum semua SDM dapat terakomodir dalam pelatihan ini. Solusi yaitu Agar pelatihan-pelatihan serupa dapat direncanakan untuk diakses oleh SDM Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.1.3. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasional dan Lainnya

3.1.3.1. Urusan Sosial

Realisasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 belum dapat membandingkan antara realisasi kinerja dengan Tingkat Nasional ataupun provinsi, dikarenakan indikator pengukuran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berbeda dengan indikator Tingkat Nasional maupun Provinsi baik Indikator SPM ataupun indikator sasaran lainnya.

Berikut di tampilkan beberapa indikator di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

Tabel 3.38
Realisasi kinerja dan Standar Pelayanan Minimal Sosial Kabupaten dan Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten				Indikator	Capaian Provinsi				Ket
		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terayani	% Jumlah yang dilayani	% Pencapaian Mutu		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terayani	% Jumlah yang dilayani	% Pencapaian Mutu	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	30 orang	30 orang	100%	98,97%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	42 Orang	37 Orang	88,10%	84,68%	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	15 Orang	15 Orang	100%	80%	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	203 orang	203 orang	100%	50%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	60 Orang	60 Orang	100%	96,23%	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	45 Orang	47 Orang	100%	75%	

4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	25 Orang	25 Orang	100%	100%	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	8 Orang	8 Orang	100%	66,25%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	48 Orang	48 Orang	100%	40%	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	50 Orang	50 Orang	100%	100%	
Rata-rata				100%	97,40%	Rata-rata			100%	93,13%	

Dari tabel Pencapaian SPM di atas, dapat kita lihat jenis indikator layanan SPM pada Kabupaten dan Provinsi berbeda, untuk Kabupaten pelayanan di luar Panti sedangkan Provinsi kewenangan di dalam Panti. Adapun untuk capaian Persentase jumlah layanan SPM tercapai 100%, sedangkan untuk pencapaian mutu SPM Sosial Kabupaten 97,40% dan untuk Provinsi 93,13%.

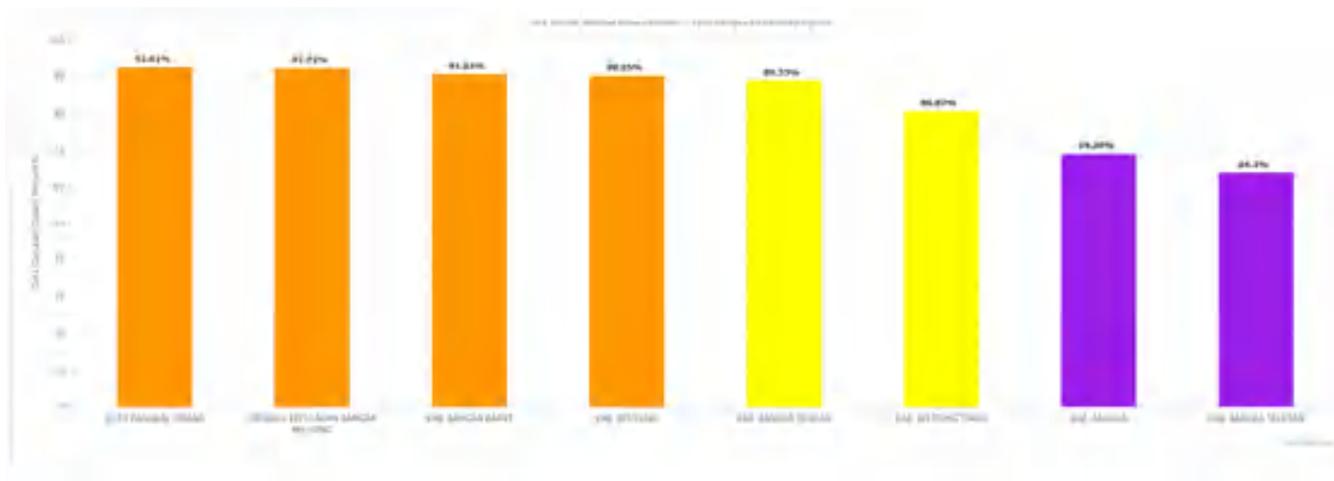
Pencapaian mutu ini dipengaruhi oleh jenis layanan dasar yang diterima dan diperlukan oleh penerima SPM. Terdapat 12 atau 13 layanan dasar di setiap indikator SPM untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis Terlantar, yaitu :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan permakanaan
3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan Alat Bantu
6. Penyediaan perbekalan Kesehatan
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK
10. Akses ke layanan esehatan dan esehatan dasar
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
13. Layanan rujukan.

Adapun untuk layanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Penyediaan permakanaan
2. Penyediaan sandang
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
5. Pelayanan dukungan Psikososial.

Perbandingan Capaian SPM Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Lainnya serta Provinsi tahun 2024, terdapat dalam Gambar Screen Shoot Laporan Pencapaian Pemenuhan SPM berikut :

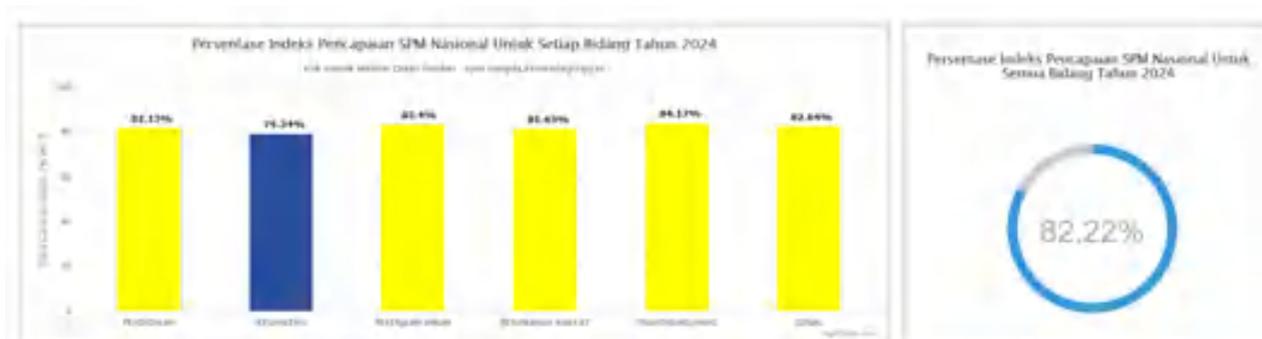


Gambar 3.4. Screen Shoot Laporan Pencapaian Pemenuhan SPM Provinsi

<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Di Level Provinsi, Pencapaian SPM di seluruh bidang pelayanan dasar, Kabupaten Belitung tertinggi ke 4 setelah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat.

Sedangkan Persentase Indeks Pencapaian SPM Nasional untuk setiap bidang Pelayanan Dasar Tahun 2024 terdapat dalam Gambar Screen Shoot berikut :



Gambar 3.5. Screen Shoot Laporan Pencapaian Pemenuhan SPM Nasional

<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Dari tabel di atas, Pencapaian SPM Sosial di Tingkat Nasional adalah 82,22%, tertinggi kedua setelah pencapaian urusan SPM Trantibumlinmas 84,17%.

3.1.3.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi capaian kinerja urusan belum dapat membandingkan antara realisasi kinerja dengan Tingkat Nasional ataupun provinsi, dikarenakan indikator pengukuran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berbeda dengan indikator Tingkat Nasional maupun Provinsi.

Berikut ditampilkan Ringkasan capaian kinerja provinsi dan nasional dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak					
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,34	91,63	100,32
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76,5	76,59	100
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	53,5	53,41	99,83
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,24	63,30	100,09
5.	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	Persen	8,7	8,7	100
6.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Persen	Lk=37 Pr =41,05	Lk=37,44 Pr =46	100
7.	% Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	93	94,78	101,91
8.	% Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	83	85,2	102,65
9.	% Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	Persen	15,78	17,65	111,85
10.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	74	77,38	104,57
Rata-rata capaian SS1					102,12
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel					
11.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	77 (BB)	73,57 (BB)	95,55
12.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100
Rata-rata capaian SS2					97,77
Rata-rata capaian kinerja					101,40

Gambar 3.6. Screen Shoot Laporan Capaian Kinerja KemenPPA tahun 2023

Tabel 3.39

**Capaian Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Belitung Tahun 2023 – 2026.**

No	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Kondisi Awal	Target				Capaian			
				Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52,59	53,4	58,23	58,24	58,25	58,22			
2.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	57,82	66,07	66,87	67,67	68,47	60,89			
3.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	73,26	73,24	73,94	74,60	73,24	79,05			

Dari capaian indikator Kementerian PPA dan Dinas PPA Provinsi di atas, tergambar capaian indikator yang sama dengan Indikator Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG Nasional tahun 2023 yaitu 76,59 dan IDG Provinsi 58,22 serta IDG Kabupaten Belitung sebagaimana telah dijelaskan pada pencapaian sasaran ke-2 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yaitu 53,47 masih di bawah Provinsi dan Nasional.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

Capaian IDG untuk tahun 2024 masih sama dengan capaian 2023, dikarenakan IDG 2024 belum rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 KINERJA LAINNYA TAHUN 2024

3.2.1. Kinerja Lainnya (Program Inovasi Begalor)

Tradisi *Begalor* dalam bahasa Melayu Belitong berarti bercerita tentang hubungan keluarga atau kekerabatan. Istilah lainnya silaturahmi yang memungkinkan untuk saling mengenal antar sesama anggota kerabat satu dengan anggota kerabat lainnya. Budaya *Begalor* dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik antar sesama.

Begalor dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan memanfaatkan berbagai momentum seperti perayaan pernikahan, selamatan, kematian, kelahiran, Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya. Momentum perayaan adalah kesempatan paling terbuka untuk berkumpul bersama, bercengkerama, beramah tamah penuh dengan nuansa keakraban dan santai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Begalor* inilah yang menjadi dasar peluncuran Program Inovatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong yang juga mengusung nama yang sama yaitu BEGALOR (Bantuan Sosial Kemanusiaan Kepada Gelandangan, Anak-anak, Lanjut Usia dan Orang terlantar) terinspirasi dari istilah *Begalor* yang dapat dimaknai sebagai hubungan kekerabatan yang hangat serta bentuk kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong terhadap masyarakat yang termarginalkan atau yang dalam istilah Sosial disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Gelandangan, Anak-anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Orang Terlantar.

Program ini akan memberikan Bantuan Sosial Kemanusiaan kepada masyarakat yang memiliki kriteria dan kondisi tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Penyandang Disabilitas Berat. Sasaran penerima manfaat bantuan telah dilakukan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong.

Dari ketiga sasaran Program tersebut di atas, sebelum dilakukan penetapan penerima manfaat dilakukan verifikasi data calon penerima dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Lanjut Usia Terlantar Sebagai Penerima Bantuan Kebutuhan Bahan Kebutuhan/Sembako sebanyak 60 (Enam Puluh) Penerima Manfaat.
 - a) Diutamakan bagi Lanjut Usia yang telah berusia diatas 70 tahun keatas, dan Lanjut Usia yang berusia 60 tahun keatas dalam keadaan sakit menahun.

- b) Hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa berbaring ditempat tidur (bed ridden) sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari.
 - c) Tidak memiliki sumber penghasilan tetap, miskin dan terlantar.
 - d) Indera penglihatan dan pendengaran sudah tidak berfungsi normal.
 - e) Bukan penyandang cacat berat atau seseorang yang menerima bantuan / santunan dari pemerintah / lembaga sosial secara permanen.
 - f) Memiliki KTP / Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa / Lurah setempat.
 - g) Apabila berstatus suami istri dan satu rumah dihuni oleh dua orang atau lebih, maka yang memperoleh bingkisan bagi Lanjut Usia adalah salah satu seseorang dari mereka.
2. Kriteria Penerima Bantuan Bahan Kebutuhan/Sembako bagi Penyandang Disabilitas Terlantar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 30 (Tiga Puluh) Penerima Manfaat.
- a. Kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi.
 - b. Tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara sendiri / selalu memerlukan bantuan orang lain.
 - c. Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - d. Tidak diberikan kepada Penerima Manfaat layanan yang sedang mendapatkan pelayanan dalam panti.
 - e. Terdaftar sebagai penduduk setempat.
3. Kriteria Penerima Bantuan Bahan Kebutuhan Yang Akan Diserahkan Kepada Anak Terlantar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 15 (Lima Belas) Penerima Manfaat.
- a. Anak terlantar/anak dari keluarga kurang mampu
 - b. Diutamakan orang tua masuk data BDT
 - c. Usia 0 – 18 tahun
 - d. Diutamakan bayi, anak SD dan SMP
 - e. Apabila dalam suatu keluarga ada yang memiliki lebih dari satu anak usia yang masuk kriteria, maka yang berhak memperoleh bahan kebutuhan yang akan diserahkan kepada Anak Terlantar adalah salah satu seseorang dari anak keluarga tersebut.

Dokumentasi foto-foto Program Begalor Tahun 2024:



Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar



Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas Terlantar



Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Anak Terlantar

Gambar 3.7. Dokumentasi Program Begalor

3.2.2. Penghargaan/ Apresiasi Instansi Lainnya

1. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 yang diberikan oleh Ombudsman RI. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memperoleh nilai 94,71 - Kategori A – Zona Hijau – Opini Kualitas Tertinggi.



Gambar 3.8. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

2. Penghargaan kepada Kabupaten Belitung terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024.

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah tahun 2024.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinas Sosial Belitung memperoleh nilai 4,11 dengan kategori A-

Lampiran
Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 659 Tahun 2024

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

A. PROVINSI

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAFFENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
1.	Provinsi Jawa Barat	4,63	4,81	4,84	4,76	A
2.	Provinsi Jawa Timur	4,76	4,59	4,54	4,63	A
3.	Provinsi D.I. Yogyakarta	4,62	4,64	4,59	4,62	A
4.	Provinsi Sumatera Selatan	4,37	4,67	4,76	4,60	A
5.	Provinsi Kalimantan Selatan	4,52	4,61	4,54	4,56	A
6.	Provinsi Jawa Tengah	4,46	4,62	4,52	4,53	A

-5-

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAFFENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
7.	Provinsi DKI Jakarta	4,63	4,59	4,37	4,53	A
8.	Provinsi Aceh	4,51	4,65	4,19	4,45	A-
9.	Provinsi NTB	4,33	4,63	4,3	4,42	A-
10.	Provinsi Bali	4,11	4,65	4,46	4,41	A-
11.	Provinsi Sulawesi Tengah	4,46	3,97	4,59	4,34	A-
12.	Provinsi Kalimantan Barat	4,11	4,35	4,33	3,89	A-
13.	Provinsi Kepulauan Riau	3,92	4,22	4,65	4,26	A-
14.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4,52	4,31	3,86	4,24	A-

4 OF 36

-21-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
152.	Kabupaten Nias	3,45	4,45	4,32	4,07	A-
153.	Kabupaten Garayun	3,98	4,52	3,7	4,07	A-
154.	Kabupaten Pidie Jaya	4,23	3,42	4,52	4,06	A-
155.	Kabupaten Lebak	4,10	4,13	3,93	4,05	A-
156.	Kabupaten Lumbek	3,36	4,47	4,31	4,05	A-
157.	Kabupaten Malang	4,29	4,09	3,76	4,05	A-
158.	Kabupaten Paser	3,80	4,56	3,72	4,03	A-
159.	Kabupaten Belitung	4,11	3,97	3,97	4,02	A-
160.	Kabupaten Tojo Una-una	4,09	4,01	3,94	4,01	A-
161.	Kabupaten Minahasa Tenggara	4,28	3,22	4,53	4,01	A-
162.	Kabupaten Belitung Timur	3,92	4,09	4,02	4,01	A-
163.	Kabupaten Indragiri Hulu	4,49	3,55	3,96	4,00	B
164.	Kabupaten Buleleng	3,90	4,08	4	3,99	B
165.	Kabupaten Soppeng	3,72	4,29	3,97	3,99	B
166.	Kabupaten Bener Meriah	3,76	3,90	4,31	3,99	B
167.	Kabupaten Kepulauan Selayut (Sitare)	4,27	3,46	4,24	3,94	B
168.	Kabupaten Langkat Timur	3,72	3,96	4,29	3,99	B
169.	Kabupaten Trenggalek	4,11	3,70	4,07	3,96	B
170.	Kabupaten Mempawah	3,17	4,36	4,34	3,96	B

21 OF 36

Gambar 3.9. Screen Shoot Nilai IPP Dinas Sosial dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

3.2.3. Perbaikan SAKIP pada Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, Nomor : 700.1.2.1/101/RLKin/INSPEK/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 dan berdasarkan Surat Bupati Belitung Nomor 700.1.2.1/201/TL/INSPEK/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

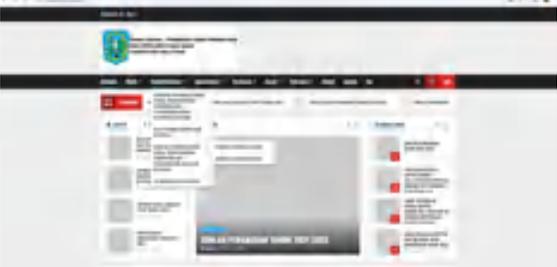
Tabel 3.40

Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Belitung

No	Komponen	Tahun (2022)			Tahun n (2023) Mandiri			Tahun 2024 (Evaluator)		
		Bobot	Capaian	Nilai	Bobot	Capaian	Nilai	Bobot	Capaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	67	20,1	30	80	24	30	72%	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30	51	15,3	30	80	24	30	63%	18,90
3	Pelaporan Kinerja	15	55	8,25	15	80	12	15	70%	10,50
4	Evaluasi Internal	25	46	11,5	25	80	20	25	77%	19,25
5	Capaian Kinerja									
	Nilai Hasil Evaluasi	100		55,15	100		80,00	100		70,25
Nilai akhir hasil evaluasi $67,06/90 \times 100\%$				-			-			-
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				CC			BB			BB

Rincian Tindak Lanjut dan Perbaikan SAKIP tahun 2023 terdapat dalam tabel berikut :

TAABEL 3.41
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKIP TAHUN 2023
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Dokumen / Eviden
1.a.	Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan tepat waktu, dokumen perencanaan hanya di upload pada e-sakip Menpan dan tidak diupload di Website OPD	Dokumen renstra 2018-2023 dan dokumen Perubahan Renja Perubahan 2023 sudah diupload di esr-menpan sebelum waktu penilaian sakip oleh Menpan per tanggal 31 Maret 2024. Dokumen perencanaan belum diupload ke website SIPD, yang diupload ke website dspppa baru Dokumen Renstra DSPPPA tahun 2018 – 2023. Untuk tahun berikutnya semua dokumen perencanaan tersebut akan diupload ke website DSPPPA.	 Link Website DSPPPA : https://dspppa.belitung.go.id/
1.b.	Terdapat perbedaan sasaran strategis pada cascading dan perjanjian kinerja eselon II.	Sasaran strategis pada cascading dan Perjanjian Kinerja Eselon II sama.	Dokumen penjelasan terlampir . https://docs.google.com/document/d/1u4xyAAXhY5IaTWJ61uvXX5de7dajtpiG/edit?usp=sharing&oid=111715357185319191636&rtpof=true&sd=true
1.c.	Rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis dan dipantau secara berkala.	Rencana aksi telah berjalan dinamis dan dipantau secara berkala (per triwulan) melalui Laporan Dalev Renja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2023 dan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2023.	Link Dokumen Laporan per triwulan terlampir : https://cloud.belitung.go.id/index.php/s/EdYdLNLYKqE4NJf?path=%2FDSPPPA%20%20PM%20AKIP%202023%202024%2F01.%20PERENCANAAN%20KINERJA%2F1.c.%20Perencanaan%20Kinerja%20telah%20Dimanfaatkan%2FData%20Dukung%203
2.a.	Belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Tahun 2023 belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Untuk selanjutnya dibuatkan petunjuk teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data. (DSPPPA telah membuat SK Nomor	Link Dokumen SK : https://drive.google.com/file/d/1d2wSD8RegeSH9AJhON_pSS6kX3CNsPM6/view?usp=sharing

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Dokumen / Eviden
		134 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di DSPPPA Kabupaten Belitung _ tanggal 2 September 2024)	
2.b.	Belum sepenuhnya terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan belum sepenuhnya terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja.	Telah dibuatkan SK Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data per tanggal 2 September 2024.	Link Dokumen SK : https://drive.google.com/file/d/1d2wSD8RegeSH9AJhON-pSS6kX3CNsPM6/view?usp=sharing
2.c.	Terhadap pemenuhan dokumen pengukuran kinerja yang telah dibuat oleh OPD berupa SOP belum berupa pedoman.	Telah dibuatkan SK Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data per tanggal 2 September 2024.	Link Dokumen SK : https://drive.google.com/file/d/1d2wSD8RegeSH9AJhON-pSS6kX3CNsPM6/view?usp=sharing
2.d.	Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, kertas kerja perhitungan capaian kinerja belum diuraikan.	Capaian kinerja yang diukur dan rumusan perhitungan capaian kinerja (Kertas kerja) telah dijelaskan dalam laporan capaian kinerja organisasi per Triwulan tahun 2023 – 2024.	Link Screenshoot : https://docs.google.com/document/d/1c3cMpt0YIHnX1_nv3RFARSGH0lvuMT96/edit?usp=sharing&oid=111715357185319191636&rtpof=true&sd=true Link Dokumen Laporan Capaian Kinerja per triwulan terlampir : https://cloud.belitung.go.id/index.php/s/EdYdLNLYKqE4

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Dokumen / Eviden
			NJf?path=%2FDSPPPA%20%20PM%20AKIP%202023%202024%2F01.%20PERENCANAAN%20KINERJA%2F1.c.%20Perencanaan%20Kinerja%20telah%20Dimanfaatkan%2FData%20Dukung%203
2.e.	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi aplikasi yaitu e-monev dalev renja per triwulan dan aplikasi pengolah data/ angka – Exel.	<p>Sreen Shoot Aplikasi web e-monev</p> <p>https://monev.belitung.go.id/ (Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja)</p> <p>https://cloud.belitung.go.id/index.php/s/EdYdLNLYKqE4NJf?path=%2FDSPPPA%20%20PM%20AKIP%202023%202024%2F02.%20PENGUKURAN%20KINERJA%2F2.b.%20Pengukuran%20Kinerja%20Telah%20Menjadi%20Kebutuhan%2FData%20Dukung%205</p>
2.f.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja / penghasilan	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian pemberian tunjangan TPP Pegawai.	<p>Link perbup TPP :</p> <p>https://cloud.belitung.go.id/index.php/s/EdYdLNLYKqE4NJf?path=%2FDSPPPA%20%20PM%20AKIP%202023%202024%2F02.%20PENGUKURAN%20KINERJA%2F2.c.%20Pengukuran%20Kinerja%20Sebagai%20Dasar%20Pemberian%20Reward%20dan%20Punishment%2FData%20Dukung%202</p> <p>Link dokumen daftar terima TPP:</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1i5Q8tK3VrSEIaz5EpUjxK3nEHmhn27cD/view?usp=sharing</p>
3.a.	Dokumen pelaporan kinerja telah disusun, namun belum disusun secara berkala dan dokumen laporan kinerja telah direview, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.	Laporan kinerja telah disusun (per triwulan) melalui Laporan Dalev Renja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2023 dan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2023.	<p>Link Dokumen Laporan per triwulan terlampir :</p> <p>https://cloud.belitung.go.id/index.php/s/EdYdLNLYKqE4NJf?path=%2FDSPPPA%20%20PM%20AKIP%202023%202024%2F01.%20PERENCANAAN%20KINERJA%2F1.c.%20Perencanaan%20Kinerja%20telah%20Dimanfaatkan%2FData%20Dukung%203</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Dokumen / Eviden
3.b.	Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.	Untuk laporan berikutnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menganalisis dan mengevaluasi realisasi kinerja dinas dengan realisasi kinerja di level nasional.	
3.c.	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Untuk laporan selanjutnya kan menambahkan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	
4.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar namun belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi aplikasi yaitu e-monev dalev renja per triwulan dan aplikasi pengolah data/ angka – Exel.	Sreen Shoot Aplikasi web e-monev https://monev.belitung.go.id/ (Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja) https://cloud.belitung.go.id/index.php/s/EdYdLNLYKqE4NJf?path=%2FDSPPPA%20%20PM%20AKIP%202023%202024%2F02.%20PENGUKURAN%20KINERJA%2F2.b.%20Pengukuran%20Kinerja%20Telah%20Menjadi%20Kebutuhan%2FData%20Dukung%205
1.	Membuat rencana aksi kinerja sampai ke level individu dan dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan.	Untuk tahun berikutnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung akan membuat rencana aksi kinerja sampai ke level individu dan akan melengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan.	Rencana Aksi DSPPPA tahun 2024 : https://drive.google.com/file/d/1W0p4ademu8OGcjQ6onZnJp4TpV6xjcYu/view?usp=sharing

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Dokumen / Eviden
2.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja di Website OPD.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mempublikasikan Laporan Kinerja dan Renstra 2018 – 2023 ke Website Dinas, namun belum mempublikasikan Dokumen Perencanaan lainnya. Untuk selanjutnya DSPPPA akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Belitung dikarenakan Website DSPPPA Belitung masih dalam maintenance, dan akan mempublikasikan dokumen perencanaan lainnya ke website dinas.	 <p>Link Website DSPPPA : https://dspppa.belitung.go.id/</p>
3.	Menyelaraskan sasaran dari Cascading, Renstra dan Perjanjian Kinerja Eselon II	Dari 6 Sasaran pada Cascading, Renstra dan Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2023, terdapat 1 sasaran yang belum selaras dari dokumen Renstra, Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, seharusnya Meningkatnya Kesejahteraan PMKS. Untuk selanjutnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan lebih teliti lagi dalam menyelaraskan ketiga dokumen tersebut dan dokumen lainnya.	Matriks Renstra yang diperbaiki pada sasaran pertama : https://drive.google.com/file/d/1yhvAFMZxzlrlBt3cVlrLadYTe9b4SSWo/view?usp=sharing
4.	Membuat Pedoman/ Petunjuk Teknis Pengumpulan Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja berisi dasar, tujuan, manfaat, Tusi sesuai Proses Bisnis, IKU, PK dan Penanggungjawab serta dilampiri SOP pengumpulan data kinerja dan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuat SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Untuk selanjutnya DSPPPA akan membuat Pedoman/ Petunjuk Teknis Pengumpulan Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja sesuai tersebut di atas.	SK Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Nomor 134 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja DSPPPA Kabupaten Belitung : https://drive.google.com/file/d/1d2wSD8RegeSH9AJhON-pSS6kX3CNsPM6/view?usp=sharing

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Dokumen / Eviden
	jadwal monev pengukuran kinerja sesuai rencana aksi.		
5.	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian pemberian tunjangan TPP Pegawai.	<p>Link perbup TPP : https://cloud.belitung.go.id/index.php/s/EdYdLNLYKqE4NJf?path=%2FDSPPA%20_%20PM%20AKIP%202023%202024%2F02.%20PENGUKURAN%20KINERJA%2F2.c.%20Pengukuran%20Kinerja%20Sebagai%20Dasar%20Pemberian%20Reward%20dan%20Punishment%2FData%20Dukung%202 Link dokumen daftar terima TPP: https://drive.google.com/file/d/1i5Q8tK3VrSEIaz5EpUjxK3nEHmhn27cD/view?usp=sharing</p>
6.	Melengkapi laporan kinerja dengan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.	Untuk laporan berikutnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menganalisis dan mengevaluasi realisasi kinerja dinas dengan realisasi kinerja di level nasional.	

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung sebesar Rp. 9.503.811.091,- dan perubahannya sebesar Rp. 10.314.852.053,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.521.256.875,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,31%. Komposisi belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung untuk tahun 2024, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42
Komposisi Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2023 - 2024

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp) 2023	Realisasi Belanja (Rp) 2023	2023 %	Anggaran Belanja(Rp) 2024	Realisasi Belanja(Rp) 2024	2024 %
1	Belanja Tidak Langsung	4.710.920.863	4.511.881.503	95,77	4.946.864.271	4.836.429.688	97,77
2	Belanja Langsung	6.211.900.438	5.434.148.995	87,48	5.367.987.782	4.684.827.187	87,27
Jumlah		10.922.821.301	9.946.030.498	91,06	10.314.852.053	9.521.256.875	92,31

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung per 31 Desember tahun anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran tahun 2024.

Pencapaian target kinerja diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang. Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tersaji pada ikhtisar laporan capaian target kinerja keuangan APBD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2023 - 2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.659.568.146	5.500.191.063	7.336.615.043	93,61	6.263.661.441	7.089.055.091	6.829.527.996	96,33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.999.818	5.999.818	4.696.818	78,28	4.995.000	4.995.000	4.448.000	89,05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	2.995.000	2.995.000	2.746.000	91,69
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.818	2.999.818	1.696.400	56,55	2.000.000	2.000.000	1.702.000	85,10
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.594.184.888	4.713.920.681	4.513.577.903	95,75	5.131.251.041	4.949.864.271	4.838.949.188	97,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.591.184.888	4.710.920.863	4.511.881.503	95,75	5.128.251.041	4.946.864.271	8.836.429.688	97,77
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.999.818	2.999.818	1.696.400	56,55	3.000.000	3.000.000	2.519.500	83,98

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	40.000.000	65.000.000	42.850.913	65,92
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	14.700.000	98,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	25.000.000	50.000.000	28.150.913	56,30
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.552.300	284.286.102	261.667.550	92,04	368.337.400	678.597.975	634.658.581	93,53
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	6.966.500	99,51	10.000.000	10.000.000	9.959.000	99,59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.747.200	52.747.200	52.433.300	99,40	50.620.500	220.121.758	198.430.440	90,15
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	14.000.000	13.961.000	99,72	14.000.000	114.759.317	97.941.500	85,35
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.105.100	101.105.100	93.838.800	92,81	119.455.800	119.455.800	118.587.450	99,27
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.700.000	40.700.000	25.788.300	63,36	40.700.000	40.700.000	36.376.000	89,38
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	5.760.000	5.760.000	5.760.000	100	5.000.000	5.000.000	4885.000	97,70

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.240.000	62.973.802	62.920.150	99,91	128.561.100	168.561.100	168.479.191	99,95
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	31.000.000	30.810.000	99,39	39.645.000	560.804.845	506.722.000	90,36
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	57.720.000	51.020.000	88,39
	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	90.820.200	86.707.000	95,47
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	31.000.000	30.810.000	99,39	39.645.000	412.264.645	368.995.000	89,50
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		220.683.000	226.034.809	220.915.780	97,74	220.683.000	239.083.000	288.671.749	95,65
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	660.000	22,00	3.000.000	3.000.000	2.000.000	66,67
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	51.600.000	54.364.780	95,46	51.600.000	70.000.000	60.780.749	86,83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.083.000	166.083.000	165.891.000	99,88	166.083.000	166.083.000	165.891.000	99,88
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		177.789.922	209.694.922	141.795.922	67,62	458.750.000	590.710.000	573.227.565	97,04

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	46.000.000	46.000.000	27.308.500	59,37	46.000.000	46.000.000	43.677.500	94,95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.750.000	119.655.000	78.062.920	65,24	159.250.000	159.250.000	148.378.965	93,17
	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	-	0,00	3.500.000	3.500.000	3.425.000	97,86
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.040.000	21.040.000	17.500.000	83,17	30.000.000	30.000.000	29.410.000	98,03
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.922	19.999.922	18.923.590	94,62	220.000.000	351.960.000	348.336.100	98,97
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		327.882.043	408.808.768	362.053.507	88,56	227.434.400	348.934.400	321.623.110	92,17
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		327.882.043	408.808.768	362.053.507	88,56	227.434.400	348.934.400	321.623.110	92,17
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	159.901.968	151.263.393	122.894.657	81,25	5.739.000	5.739.000	5.419.900	94,44
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	79.346.115	68.911.415	66.473.500	96,46	131.175.500	126.175.500	111.711.210	88,54

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kewenangan Kabupaten/Kota								
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100.000.000	97.848.800	97,85	-	126.500.000	124.497.000	98,42
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	88.633.960	88.633.960	74.836.550	84,43	90.519.900	90.519.900	79.995.000	88,37
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	-	-	47.256.200	41.256.200	16.955.668	41,10
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	-	-	-	-	47.256.200	41.256.200	16.955.668	41,10
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	-	-	-	-	47.256.200	41.256.200	16.955.668	41,10

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	496.247.420	472.694.420	391.808.9722	82,89	386.048.250	355.284.512	316.638.998	89,12
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	423.364.670	386.814.670	352.522.822	91,13	386.048.250	355.284.512	316.638.998	89,12
Penyediaan Permakanan	215.740.750	215.740.750	212.227.500	98,37	210.631.000	208.131.000	205.070.000	98,53
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.020.250	109.270.250	95.502.340	87,40	11.148.750	11.148.750	5.495.000	49,29
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	66.603.670	61.803.670	44.792.982	72,48	-	-	-	-
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-	84.686.000	60.041.400	54.269.850	90,39
Pemberian Layanan Kedaruratan	-	-	-	-	32.970.000	36.350.862	36.116.500	99,60
Pemberian Layanan Rujukan	-	-	-	-	46.612.500	39.612.500	15.687.648	39,60
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	72.882.750	85.879.750	39.286.150	45,75	-	-	-	-
Penyediaan Permakanan	6.909.750	9.906.750	6.680.000	67,43	-	-	-	-

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	16.500.000	16.500.000	1.500.000	9,09	-	-	-	-
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	49.473.000	59.473.000	31.106.150	52,30	-	-	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		497.094.362	738.336.850	481.414.604	65,20	677.334.050	644.184.050	513.269.294	79,68
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	-	-	23.258.100	23.258.100	9.955.900	42,81
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	-	-	-	-	7.993.500	7.993.500	1.080.000	13,51
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	-	-	-	-	15.264.600	15.264.600	8.875.900	58,15
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	497.094.362	738.336.850	481.414.604	65,20	654.075.950	620.925.950	503.313.394	81,06
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	340.678.650	474.938.638	462.351.354	97,35	392.718.200	367.968.200	366.499.950	99,60
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	156.415.712	263.398.212	19.063.250	7,24	261.357.750	252.957.750	136.813.444	54,09
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		444.430.180	444.430.180	388.706.200	87,46	424.517.700	438.517.700	398.107.550	90,78
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	444.430.180	444.430.180	388.706.200	87,46	424.517.700	438.517.700	398.107.550	90,78

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	444.430.180	444.430.180	388.706.200	87,46	424.517.700	438.517.700	398.107.550	90,78
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	86.975.400	86.975.400	82.405.000	94,75	11.325.400	11.325.400	5.730.400	50,60
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	86.975.400	86.975.400	82.405.000	94,75	11.325.400	11.325.400	5.730.400	50,60
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	htb	86.975.400	82.405.000	94,75	11.325.400	11.325.400	5.730.400	50,60
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	457.383.073	517.180.698	509.312.773	99,32	439.498.900	439.498.900	435.651.334	99,12
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	34.547.070	34.547.070	30.192.917	87,40	36.326.000	36.326.000	33.966.600	93,51
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	18.758.590	18.758.590	17.095.037	91,13	36.326.000	36.326.000	33.966.600	93,50
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15.788.480	15.788.480	13.097.880	82,96	-	-	-	-

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	408.542.995	468.340.620	465.143.706	99,32	370.497.900	370.497.900	369.247.284	99,66
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	17.684.400	17.684.400	16.575.150	93,73	-	-	-	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	390.858.595	450.656.220	448.568.556	99,54	370.497.900	370.497.900	369.247.284	99,66
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.293.008	14.293.008	13.976.150	97,78	32.675.000	32.675.000	32.437.450	99,27
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.293.008	14.293.008	13.976.150	97,78	-	-	-	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	16.993.000	16.993.000	16.863.200	99,24

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	15.682.000	15.682.000	15.574.250	99,31
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	126.224.672	103.865.803	89.449.911	86,12	677.575.850	394.720.850	195.433.106	49,51
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/ Kota	-	-	-	-	72.668.850	72.668.850	66.553.060	91,58
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	72.668.850	72.668.850	66.553.060	91,58
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	126.224.672	103.865.803	89.449.911	86,12	604.907.000	322.052.000	128.880.046	40,02
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	126.224.672	103.865.803	89.449.911	86,12	-	-	-	-

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	604.907.000	322.052.000	128.880.046	40,02
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	-	21.797.500	12.132.500	11.880.000	97,92
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	21.797.500	12.132.500	11.880.000	97,92
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	21.797.500	12.132.500	11.880.000	97,92
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	42.703.164	42.703.164	42.600.300	99,76	45.671.700	45.671.700	40.377.200	88,41
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.703.164	42.703.164	42.600.300	99,76	45.671.700	45.671.700	40.377.200	88,41

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	42.703.164	42.703.164	42.600.300	99,76	45.671.700	45.671.700	40.377.200	88,41
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	186.167.434	173.203.252	166.490.740	96.12	274.295.750	270.743.750	228.070.519	84,24
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	14.821.619	12.046.619	9.720.344	80,69	17.265.850	13.713.850	12.696.100	92,57
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.821.619	12,046.619	9.720.344	80,69	17.265.850	13.713.850	12.696.100	92,58
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	171.345.815	161.156.633	156.770.396	97,28	257.029.900	257.029.900	215.374.419	83,79
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	34.000.000	34.000.000	0	0
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	171.345.815	161.156.633	156.770.396	97,28	223.029.900	223.029.900	215.374.419	96,57

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	71.917.069	65.328.034	65.173.448	99,76	7.393.950	223.527.000	207.991.700	93,05
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	130.000.000	126.542.500	97,05
Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	-	-	-	-	-	130.000.000	126.542.500	97,34
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	7.393.950	5.127.000	3.073.200	59,94
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	-	-	-	-	7.393.950	5.127.000	3.073.200	59,94
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.917.069	65.328.034	65.328.448	99,76	-	88.400.000	78.376.000	88,66
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	71.917.069	65.328.034	65.328.448	99,76	-	-	-	-

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	88.400.000	78.376.000	88,66
T O T A L	10.396.592.963	10.922.821.301	9.946.030.498	91,06	9.503.811.091	10.314.852.053	9.521.256.875	92,31

Berdasarkan Pengukuran Perjanjian kinerja dan memperhatikan hasil-hasil perhitungan yang tergambar dalam format Pengukuran Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 dari Pagu Anggaran Setelah perubahan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 10.314.852.053,- dengan 13 Program, 26 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.521.256.875,- dan Persentase terhadap total Anggaran 92,31%.

Terkait pagu dan realisasi anggaran dengan pencapaian target tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2024 lebih rinci dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.44
Pagu dan Realisasi Anggaran
Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2023 dan 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	2023				2024			
		Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS	2	10.020.540.350	9.073.003.326	90,54	2	8.928.557.353	8.401.853.016	94,10
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup Perempuan	2	663.749.665	641.362.984	96,63	-	-	-	-

2	Tujuan: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Sasaran: Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-	-	-	2	497.303.100	487.908.534	98,11
3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	2	238.531.286	231.664.188	97,12	-	-	-	-
3	Tujuan: Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan Sasaran: Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan	-	-	-	-	2	888.991.600	631.495.325	71,04
Jumlah		6	12.183.849.456	9.510.126.268	78,06	6	10.314.852.053	9.521.256.875	92,31

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2024. Adapun persentase realisasi anggaran yang kurang dari 80% di tujuan dan sasaran ke tiga dikarenakan anggaran disiapkan sebagai antisipasi bila terjadi kasus kekerasan pada perempuan atau anak.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.45

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran		% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%		Realisasi	%
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS	2	1898,43	9.073.003.326	90,54	3104,41	8.401.853.016	94,10
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	2	108,50	641.362.984	96,63	-	-	-
2	Tujuan: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Sasaran: Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-	-	-	100,04	487.908.534	98,11
3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	2	144,03	231.664.188	97,12	-	-	-
3	Tujuan: Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan Sasaran: Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan	-	-	-	-	71,91 (Indikator Negatif)	631.495.325	71,04
	Jumlah	6	716,99	9.946.030.498	91,06	1092,12	9.521.256.875	92,31

3.3.1. Analisis Efektivitas dan Efisiensi dan Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Program

1. Efektivitas Anggaran

Menurut Mahsun (2009), efektivitas sebagai gambaran mengenai kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah dianggarkan. Tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pengukuran efisiensi anggaran menurut Mahsun (2009) adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tingkatan efektivitas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.46 Tingkatan Efektivitas Kinerja

No.	Tingkat Pencapaian	Kategori
1	Tingkat pencapaian di atas 100%	Sangat Efektif
2	Tingkat pencapaian antara 90% - 100%	Efektif
3	Tingkat pencapaian antara 80% - 90%	Cukup Efektif
4	Tingkat pencapaian antara 60% - 80%	Kurang Efektif
5	Tingkat pencapaian di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : JDIH Kemendagri

Jika dimasukkan dalam rumusan dan kategori tersebut, anggaran dan realisasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terlihat pada Tabel 3.47. berikut :

Tabel 3.47. Efektivitas pengelolaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Efektivitas = Realiasi / Target x 100%	Kategori
10.314.852.053	9.521.256.875	$\text{Efektivitas} = \frac{9.521.256.875}{10.314.852.053} \times 100\%$ $= 92,31\%$	Efektif

Berdasarkan data pada Tabel 3.41. dan berdasarkan rumus di atas diambil kesimpulan persentase efektivitas pengelolaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten termasuk kategori **Efektif**.

2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran menurut Mahsun (2009) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.48 Tabel Tingkatan Efisiensi Anggaran

No.	Tingkat Pencapaian	Keterangan
1	Tingkat pencapaian di atas 100%	Tidak Efisien
2	Tingkat pencapaian antara 90% - 100%	Kurang Efisien
3	Tingkat pencapaian antara 80% - 90%	Cukup Efisien
4	Tingkat pencapaian antara 60% - 80%	Efisien
5	Tingkat pencapaian di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : JDIH Kemendagri

Jika dimasukkan dalam rumusan dan kategori tersebut, anggaran dan realisasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terlihat pada Tabel 3.49. berikut :

Tabel 3.49. Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Anggaran	Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Kategori
5.367.987.782	9.521.256.875	$\text{Efisiensi} = \frac{5.367.987.782}{9.521.256.875} \times 100\%$ $= 56,38\%$	Sangat Efisien

Berdasarkan data pada Tabel 3.43 dan berdasarkan rumus di atas diambil kesimpulan persentase efisiensi penggunaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten termasuk kategori **Sangat Efisien**.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Menurut Mangkunegara dalam Khaerul Umam (2010:189) yang mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan, motivasi dan sikap mental.

a. Faktor Kemampuan

Ketercapaian kinerja dalam faktor kemampuan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu SDM dan ketersediaan anggaran. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terdiri dari 39 orang pegawai, terdiri dari 28 orang ASN dan 11 orang Non ASN yang tersebar di Kantor Dinas, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Taman Makan Pahlawan (TMP) Ksatria Tumbang Ganti. SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan latar belakang Pendidikan dari Jenjang SMP hingga S2 memiliki integritas yang tinggi dan keahlian sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pada tahun 2024, jumlah anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Rp. 10.314.852.053,- terdiri dari 13 Program, 26 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh ASN yang bersertifikasi.

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi/ kondisi/ keadaan lingkungan kerja. Kantor kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada di Kota Tanjungpandan sangat memudahkan untuk saling berkoordinasi/ konsultasi antar dinas dengan jarak tempuh yang cukup dekat dari Kantor Bupati Belitung ataupun Kantor Dinas/ Instansi Lainnya. Bangunan kantor dinas juga memiliki perlengkapan dan peralatan yang cukup mendukung untuk bekerja dalam kondisi baik.

c. Sikap Mental

ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung senantiasa menunjukkan sikap saling menghargai pendapat, mau bekerjasama dan mengutamakan kepentingan/ tujuan organisasi. Menurut Moekijat (2008) jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

dapat ditentukan dengan menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan dan jumlah beban kerja.

Tujuan/Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN UMUM

Dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik (terdapat dua indikator negatif), dengan nilai rata-rata capaian dari 6 (enam) Indikator Kinerja adalah 1068,61% dan persentase realisasi anggaran 92,31%. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 diselenggarakan secara sinergi melalui Program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4) Program Rehabilitasi Sosial
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6) Program Penanganan Bencana
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 8) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 9) Program Perlindungan Perempuan
- 10) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 12) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 13) Program Perlindungan Khusus Anak.

Faktor pendukung dari pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yaitu adanya respon yang baik dari masyarakat Belitung terhadap penanganan PMKS, terjalinnya Sinergitas antar instansi dalam penanganan PMKS, adanya SDM yang kompeten di bidang Sosial dan PPA, dan tersedianya anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya data PMKS belum valid, masih ada beberapa SDM yang belum memiliki kompetensi di bidang Sosial dan PPA, masih terjadinya ego sektoral di berbagai lini, dan masih ada beberapa sub kegiatan yang memiliki anggaran terbatas. Dan solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan verifikasi data PMKS, perlunya peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial maupun PPA, menjalin sinergitas dengan berbagai pihak, penambahan anggaran, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Untuk kinerja lainnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung selain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang terangkum dalam Program Begalor, juga terdapat 2 (dua) penghargaan yang diterima tahun 2024 yaitu Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 yang diberikan oleh Ombusman RI. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memperoleh nilai 94,71 - Kategori A – Zona Hijau – Opini Kualitas Tertinggi. Dan Penghargaan terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 dengan Indeks Penilaian Publik Dinas Sosial Belitung memperoleh nilai 4,11 kategori A-.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran yang ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Segala kekurangan dalam pelaksanaan

program dapat menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Dengan demikian diharapkan nantinya terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

2. LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sepanjang Tahun 2024, agar lebih meningkat ditahun selanjutnya adalah :

- 1) Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2025,
- 2) Memverifikasi dan Verifali data PMKS secara berkala,
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek,
- 4) Menguatkan peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
- 5) Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
- 6) Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungan secara terus menerus kepada masyarakat.

Laporan Kinerja sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan diharapkan bisa memberi masukan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja ini benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung disusun dan disampaikan atas perhatian terima kasih.

Tanjungpandan, 04 Maret 2024

Kepala Dinas,



KASIMIN, S.IP., MAB
Pembina Utama Muda
NIP. 196908241990031004

LAMPIRAN

- Lampiran I : Target dan realisasi outcome, beserta target dan realisasi penggunaan SDM dan dana yang dikelompokkan menurut sastra/sasprog/ saskeg (termasuk perhitungan efisiensi)
- Lampiran II : Perbandingan realisasi outcome, beserta realisasi penggunaan SDM dan dana tahun 2024 dengan tahun lalu yang dikelompokkan menurut sastra/saprog/saskeg;
- Lampiran III : Target dan realisasi Indikator output kegiatan (IOK), beserta target dan realisasi penggunaan SDM dan dana yang dikelompokkan menurut sasaran output kegiatan (termasuk perhitungan efisiensi);
- Lampiran IV : Perbandingan realisasi output, beserta realisasi penggunaan SDM dan dana tahun 2024 dengan tahun lalu yang dikelompokkan menurut sasaran output kegiatan;
- Lampiran V : Rincian target dan realisasi program prioritas yang tercapai sesuai target;
- Lampiran VI : Rincian target dan realisasi kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target;
- Lampiran VII : Rincian target dan realisasi proyek prioritas strategis (PPS) yang tercapai sesuai target;
- Lampiran VIII : Rincian target dan realisasi proyek strategis nasional (PSN) yang tercapai sesuai target;
- Lampiran IX : Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024
- Lampiran X : Perjanjian Kinerja 2024
- Lampiran XI : Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024
- Lampiran XII : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024

LAMPIRAN I
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATANTAHUN 2024

Sarprog/ Sarkeg		Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/ Kegiatan				Anggaran			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1			3	4	5	6	7	8	9.00	10	11	12
1	Terlaksananya program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	%	100	88.13	88.13	348,934,400	321,623,110	92.17	6	6	100
1.1	Meningkatnya kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS aktif	PSKS	165	134	81.21	348,934,400	321,623,110	92.17	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						81.21			92.17			100
2	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	%	100	100	100	41,256,200	16,955,668	41.10	6	6	100
2.1	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Orang	12	13	108.33	41,256,200	16,955,668	41.10	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						108.33			41.10			100
3	Terpenuhnya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi diluar panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	355,284,512	316,638,998	89.12	6	6	100

3.1	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Orang	105	105	100	355,284,512	316,638,998	89.12	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			89.12			100
4	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	%	100	86.45	86.45	644,184,050	513,269,294	79.68	6	6	100
4.1	Anak-anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya	Orang	5	10	200	23,258,100	9,955,900	42.81	6	6	100
4.2	Tersedianya Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	%	100	99.87	99.87	620,925,950	503,313,394	81.06	12	12	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						149.935			61.93			100
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	438,517,700	398,107,550	90.78	6	6	100
5.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial yang pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	438,517,700	398,107,550	90.78	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			90.78			100
6	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	Taman makam pahlawan yang tertata	%	100	100	100	11,325,400	5,730,400	50.60	6	6	100
6.1	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	11,325,400	5,730,400	50.60	6	6	100

Rata-rata Capaian Kegiatan						100			50.60			100
7	Terlaksananya Fasilitas dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah						7,089,055,091	6,829,527,996	96.34	8	8	100
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	100						
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	79	78.93	100.16						
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100						
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100						
7.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	4,995,000	4,448,000	89.05	8	8	100
7.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	4,949,864,271	4,838,949,188	97.76	8	8	100
7.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	29	28	96.55	65,000,000	42,850,913	65.92	8	8	100
7.4	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	678,597,975	634,658,581	93.52	8	8	100
7.5	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis barang milik daerah	Jenis	3	3	100	560,804,845	506,722,000	90.36	8	8	100
7.6	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	239,083,000	228,671,749	95.65	8	8	100

7.7	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	5	5	100	590,710,000	573,227,565	97.04	8	8	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						99.51			89.90			100.00
8	Penerapan strategi dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	36	44.11	122.53	439,498,900	435,651,334	99.12	3	3	100
8.1	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	PD	10	10	100	36,326,000	33,966,600	93.50	3	3	100
8.2	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Organisasi	19	19	100	370,497,900	369,247,284	99.66	3	3	100
8.3	Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung	Lembaga	1	1	100	32,675,000	32,437,450	99.27	3	3	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			97.48			100
9	Persentase keluarga yang terlayani	Persentase keluarga yang terlayani	%	100	100	100	12,132,500	11,880,000	97.92	3	3	100
9.1	Meningkatnya layanan kualitas keluarga	Lembaga keluarga yang dibina	Lembaga	1	1	100	12,132,500	11,880,000	97.92	3	3	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			97.92			100
10	Tersedianya data gender dan anak	Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA).	%	65	78.82	121.26	45,671,700	40,377,200	88.41	3	3	100
10.1	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data gender dan anak	Dokumen	1	1	100	45,671,700	40,377,200	88.41	3	3	100

<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			88.41			100
11	Terlaksananya layanan perlindungan perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	%	100	100	100	394,720,850	195,433,106	49.51	3	3	100
11.1	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan	%	100	100	100	72,668,850	66,553,060	91.58	3	3	100
11.2	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	3	3	100	322,052,000	128,880,046	40.02	2	2	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			65.80			100
12	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)		Madya	Madya	100	270,743,750	228,070,519	84.24	3	3	100
12.1	Meningkatnya status KLA	Tercapainya peningkatan status KLA		Madya	Madya	100	13,713,850	12,696,100	92.58	3	3	100
12.2	Meningkatnya layanan terhadap anak	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Dok	1	1	100	257,029,900	215,374,419	83.79	3	3	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100.00			88.19			100.00
13	Terlindunginya anak dari korban kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	223,527,000	207,991,700	93.05	3	3	100
13.1	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA	%	100	100	100	130,000,000	126,542,500	97.34	3	3	100
13.2	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	%	100	100	100	5,127,000	3,073,200	59.94	3	3	100
13.3	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	%	100	100	100	88,400,000	78,376,000	88.66	3	3	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			81.98	28	28	100
TOTAL						103.00	10,314,852,053	9,521,256,875	92.31			100.00

LAMPIRAN II
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sarprog/ Sarkeg		Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program								
			Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ (Turun)	Capaian 2024	Capaian 2023	Naik/ (Turun)	Target 2024	% Realisasi thd target 2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	%	88.13	38.6	Naik	88.13	38.6	Naik	100	88.13
1.1	Meningkatnya kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS aktif	PSKS	134	164	Turun	81.21	99.39	Turun	165	81.21
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							81.21	99.39			81.21
2	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	%	100	-	Naik	100	-	Naik	100	100
2.1	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Orang	13	-	Naik	108.33	-	Naik	12	108.33
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							108.33	0			108.33
3	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi diluar panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100

3.1	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Orang	105	105	Tetap	100	100	Tetap	105	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100
4	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	%	86.45	88.31	Turun	86.45	-	Turun	100	86.45
4.1	Anak-anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya	Orang	5	-	Naik	200	-	Naik	5	100
4.2	Tersedianya Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	%	99.87	-	Naik	99.87	-	Naik	100	99.87
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							149.94	0.00			99.94
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
5.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial yang pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100
6	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
6.1	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100

7	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	78.93	78.8	Naik	100.16	104.93	Turun (melebihi target)	78.8	100.16
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
7.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	Tetap	100	100	Tetap	6	100
7.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	Tetap	100	100	Tetap	3	100
7.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	28	-	Naik	96.55	100	Turun	29	96.55
7.4	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
7.5	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis barang milik daerah	Jenis	3	2	Naik	100	100	Tetap	3	100
7.6	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
7.7	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	5	6	Turun	100	100	Tetap	5	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							99.51	100			99.51

8	Penerapan strategi dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	44.11	48.48	Turun	122.53	9696	Turun	36	122.53
8.1	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	PD	10	16	Turun	100	160	Turun	10	100
8.2	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Organisasi	19	19	Tetap	100	100	Tetap	19	100
8.3	Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung	Lembaga	1	1	Tetap	100	100	Tetap	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	120			100
9	Persentase keluarga yang terlayani	Persentase keluarga yang terlayani	%	100	-	Naik	100	-	Naik	100	100
9.1	Meningkatnya layanan kualitas keluarga	Lembaga keluarga yang dibina	Lembaga	1	-	Naik	100	-	Naik	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	0			100
10	Tersedianya data gender dan anak	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi gender dan anak	%	78.82	75	Naik	121.26	300	Turun	65	121.26
10.1	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data gender dan anak	Dokumen	1	1	Tetap	100	100	Tetap	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100
11	Terlaksananya layanan perlindungan perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
11.1	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan	%	100	-	Tetap	100	-	Tetap	100	100

11.1	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	3	3	Tetap	100	100	Tetap	3	100	
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100	
12	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)		Madya	Madya	Naik	Madya	Madya	Naik	Madya	100	
12.1	Meningkatnya status KLA	Tercapainya peningkatan status KLA		Madya	601 (Pratama)	Naik	100	80.13	Naik	Madya	100	
12.2	Meningkatnya layanan terhadap anak	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Dok	1	1	Tetap	100	100	Tetap	1	100	
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100.00	90.07			100.00	
13	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100	
13.1	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA	%	100	-	Naik	100	-	Naik	100	100	
13.2	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	%	100	-	Naik	100	-	Naik	100	100	
13.3	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100	
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100	
TOTAL							103.00	95.79	Naik			98.24

LAMPIRAN III
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)

Sarprog/ Sarkeg		Rata-rata Capaian Sarprog/ Sarkeg	Sasaran Output Kegiatan (HASIL KEGIATAN)	Output Kegiatan				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
				Indikator Output Kegiatan (IOK) (KELUARAN KEGIATAN)	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terlaksananya program pemberdayaan sosial	88.13		Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	%	100	88.13	88.13	348,934,400	321,623,110	92.17	6	6	100	v		v
1.1	Meningkatnya kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	81.21	Kearifan Data	Jumlah PSKS aktif	PSKS	165	134	81.21	348,934,400	321,623,110	92.17	6	6	100	v		v
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							81.21				92.17			100.00			
2	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan	100		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	%	100	100	100	41,256,200	16,955,668	41.10	6	6	100	v		v
2.1	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan	108.33	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Orang	12	13	108.33	41,256,200	16,955,668	41.10	6	6	100	v		v
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							108.33				41.10			100.00			
3	Terperuhnya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi diluar panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	355,284,512	316,638,998	89.12	6	6	100	v		v
3.1	Terperuhnya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	100	Terperuhnya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Orang	105	105	100	355,284,512	316,638,998	89.12	6	6	100	v		v
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100				89.12			100			
4	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	100		Terperuhnya perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	644,184,050	513,269,294	79.68	12	12	100	v		v
4.1	Anak-anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya	200	Terperuhnya anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya	Orang	5	10	200	23,258,100	9,955,900	42.81	6	6	100	v		v
4.2	Tersedianya Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	99.87	Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	%	100	99.87	99.87	620,925,950	503,313,394	81.06	12	12	100	v		v
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							149.94				61.93			100.00			

5	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100		Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	100	100	100	438,517,700	398,107,550	90.78	6	6	100	v		v	
5.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	Terlayannya korban bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	438,517,700	398,107,550	90.78	6	6	100	v		v	
Rata-rata Capaian Kegiatan								100			90.78			100.00				
6	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	100		Taman Makam Pahlawan yang tertata	%	100	100	100	11,325,400	5,730,400	50.60	6	6	100	v		v	
6.1	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	Terpeliharanya taman makam pahlawan	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	100	100	11,325,400	5,730,400	50.60	6	6	100	v		v	
Rata-rata Capaian Kegiatan								100			50.60			100.00				
7	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	7,089,055,091	6,829,527,996	96.34	8	8	100	v		v	
		100.16		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	78.80	78.93	100.16							v		v	
		100		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100							v		v	
		100		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100							v		v	
7.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	Dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	4,995,000	4,448,000	89.05	8	8	100	v		v	
7.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	4,949,864,271	4,838,949,188	97.76	8	8	100	v		v	
7.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.55	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	29	28	96.55	65,000,000	42,850,913	65.92	8	8	100	v		v	
7.4	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	678,597,975	634,658,581	93.52	8	8	100	v		v	
7.5	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jenis barang milik daerah	Jenis	3	3	100	560,804,845	506,722,000	90.36	8	8	100	v		v	
7.6	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	239,083,000	228,671,749	95.65	8	8	100	v		v	
7.7	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	5	5	100	590,710,000	573,227,565	97.04	8	8	100	v		v	

<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>																99.51		89.90		100.00				
8	Penerapan strategi dan pemberdayaan perempuan	122.53		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	36	44.11	122.53	439,498,900	435,651,334	99.12	3	3	100	v		v							
8.1	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	Terlaksananya Kebijakan PUG	Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	PD	10	10	100	36,326,000	33,966,600	93.50	3	3	100	v		v							
8.2	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Organisasi	19	19	100	370,497,900	369,247,284	99.66	3	3	100	v		v							
8.3	Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak	100	Meningkatnya layanan Pemberdayaan Perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung	Lembaga	1	1	100	32,675,000	32,437,450	99.27	3	3	100	v		v							
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>																100		97.48		100.00				
9	Persentase keluarga yang terlayani	100		Persentase keluarga yang terlayani	%	100	100	100	12,132,500	11,880,000	97.92	3	3	100	v		v							
9.1	Meningkatnya layanan kualitas keluarga	100	Meningkatnya layanan keluarga	Lembaga keluarga yang dibina	Lembaga	1	1	100	12,132,500	11,880,000	97.92	3	3	100	v		v							
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>																100		97.92		100.00				
10	Tersedianya data gender dan anak	121.26		Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	%	65	78.82	121.26	45,671,700	40,377,200	88.41	3	3	100	v		v							
10.1	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	Data terpilah gender dan anak yang akurat	Tersedianya data gender dan anak	Dokumen	1	1	100	45,671,700	40,377,200	88.41	3	3	100	v		v							
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>																100		88.41		100.00				
11	Terlaksananya layanan perlindungan perempuan	100		Persentase layanan perlindungan perempuan	%	100	100	100	394,720,850	195,433,106	49.51	3	3	100	v		v							
11.1	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan	100	Persentase penanganan kasus	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan	%	100	100	100	72,668,850	66,553,060	91.58	3	3	100	v		v							
11.1	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	100	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	3	3	100	322,052,000	128,880,046	40.02	2	2	100	v		v							
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>																100		65.80		100.00				
12	Meningkatnya pemenuhan hak anak	100		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	100	270,743,750	228,070,519	84.24	3	3	100	v		v								
12.1	Meningkatnya status KLA	100	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Tercapainya peningkatan status KLA	Madya	Madya	100	13,713,850	12,696,100	92.58	3	3	100	v		v								
12.2	Meningkatnya layanan terhadap anak	100	Meningkatnya layanan terhadap anak	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Dok	1	1	100	257,029,900	215,374,419	83.79	3	3	100	v		v							
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>																100.00		88.19		100.00				
13	Terlindunginya anak dari korban kekerasan	100		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	223,527,000	207,991,700	93.05	3	3	100	v		v							

13.1	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA	100	Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA	%	100	100	100	130,000,000	126,542,500	97.34	3	3	100	v		v		
13.2	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	100	Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	%	100	100	100	5,127,000	3,073,200	59.94	3	3	100	v		v		
13.3	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	100	Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	%	100	100	100	88,400,000	78,376,000	88.66	3	3	100	v		v		
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>								100			81.98			100.00					
TOTAL								103.00	10,314,852,053	9,521,256,875	92.31			100.00					

LAMPIRAN IV
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)

Sarprog/ Sarkeg		Output Kegiatan							
		Indikator Output Kegiatan	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ (Turun)	Capaian 2024	Capaian 2023	Naik/ (Turun)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	%	88.13	38.6	Naik	88.13	38.6	Naik
1.1	Meningkatnya kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS aktif	PSKS	134	164	Turun	81.21	99.39	Turun
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							81.21	99.39	
2	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	%	100	-	Naik	100	-	Naik
2.1	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Orang	13	-	Naik	108.33	-	Naik
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							108.33	0	
3	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi diluar panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap

3.1	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Orang	105	105	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
4.	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	%	86.45	88.31	Turun	86.45	-	Turun
4.1	Anak-anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya	Orang	5	-	Naik	200	-	Naik
4.2	Tersedianya Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	%	99.87	-	Naik	99.87	-	Naik
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							149.94	0.00	
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
5.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial yang pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
6	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	Taman makam pahlawan yang tertata	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
6.1	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	

7	Terlaksananya Fasilitas dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	78.93	78.8	Naik	100.16	104.93	Turun (melebihi target)
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
7.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	Tetap	100	100	Tetap
7.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	Tetap	100	100	Tetap
7.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	28	-	Naik	96.55	100	Turun
7.4	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
7.5	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis	3	2	Naik	100	100	Tetap
7.6	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
7.7	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	5	6	Turun	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							99.51	100	

8	Penerapan strategi dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	44.11	48.48	Turun	122.53	9696	Turun
8.1	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	PD	10	16	Turun	100	160	Turun
8.2	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Organisasi	19	19	Tetap	100	100	Tetap
8.3	Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung	Lembaga	1	1	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	120	
9	Persentase keluarga yang terlayani	Persentase keluarga yang terlayani	%	100	-	Naik	100	-	Naik
9.1	Meningkatnya layanan kualitas keluarga	Lembaga keluarga yang dibina	Lembaga	1	-	Naik	100	-	Naik
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	0	
10	Tersedianya data gender dan anak	Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA).	%	78.82	75	Naik	121.26	300	Turun
10.1	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data gender dan anak	Dokumen	1	1	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
11	Terlaksananya layanan perlindungan perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
11.1	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan	%	100	-	Tetap	100	-	Tetap

11.2	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	3	3	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
12	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)		Madya	Madya	Naik	Madya	Madya	Naik
12.1	Meningkatnya status KLA	Tercapainya peningkatan status KLA		Madya	601 (Pratama)	Naik	100	80.13	Naik
12.2	Meningkatnya layanan terhadap anak	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Dok	1	1	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100.00	90.07	
13	Terlindunginya anak dari korban kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
13.1	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA	%	100	-	Naik	100	-	Naik
13.2	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	%	100	-	Naik	100	-	Naik
13.3	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
TOTAL							103.00	95.79	Naik

LAMPIRAN V
JUMLAH PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Unit Kerja	Target Jumlah PP yang mencapai Target	Realisasi PP yang mencapai target	%
-	-	-	-	-
	JUMLAH			

LAMPIRAN VI
JUMLAH KEGIATAN PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Unit Kerja	Target Jumlah KP yang mencapai Target	Realisasi KP yang mencapai target	%
-	-	-	-	-
	JUMLAH			

LAMPIRAN VII
JUMLAH PROYEK PRIORITAS STRATEGIS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Unit Kerja	Target Jumlah PPS yang mencapai Target	Realisasi PPS yang mencapai target	%
-	-	-	-	-
	JUMLAH			

LAMPIRAN VIII
JUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Unit Kerja	Target Jumlah PSN yang mencapai Target	Realisasi PSN yang mencapai target	%
-	-	-	-	-
	JUMLAH			

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Berkurang/ Bertambah APBD P) (9a-9)	Lokasi		Sumber Dana	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Usulan Perubahan - Juli
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9a)	(9)	(10)	(11)	(12)
		URUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8.579.368.613		10.034.352.053	10.314.852.053	280.500.000			
1		Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								-			
1	06	Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								-			
1	06	2 01	1 Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan anggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	5.708.170.163	6.263.661.441	6.778.821.541	7.088.882.591	310.061.050		
1	06	2 01	1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	6 Dokumen 100 %	6 Dokumen 100 %	4.995.000	4.995.000	4.995.000	4.995.000	-		APBD Kabupaten
1	06	2 01	01 Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten
1	06	2 01	07 Sub Kegiatan 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten
1	06	2 02	2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	3 Dokumen 100 %	3 Dokumen 100 %	4.554.320.863	5.131.251.041	5.131.251.041	4.949.763.257	-181.487.784		APBD Kabupaten
1	06	2 02	01 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	4.551.320.863	5.128.251.041	5.128.251.041	4.946.763.257	-181.487.784	Tanjungpandan	APBD Kabupaten tambahan gaji sipd 154jt
1	06	2 02	08 Sub Kegiatan 2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78,80 %	78,80 %					-		
1	06	2 05	3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	29 Orang 78,80 %	29 Orang 78,80 %	40.000.000	40.000.000	40.000.000	65.000.000	25.000.000		APBD Kabupaten
1	06	2 05	02 Sub Kegiatan 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Tanjungpandan	
1	06	2 05	09 Sub Kegiatan 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	5 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	Tanjungpandan	APBD Kabupaten Terealisasi 1 org. sisa anggaran 14jt. (1 Diklat Sakip Agust, 2 org diklat keuangan, aset, kepegawaian, dan 2 org Bimtek Bidang PPA) >> Nambah 25jt : 10jt kontribusi dan 15 jt spped
				3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %					-		
1	06	2 06	4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	289.776.300	368.337.400	622.678.355	677.278.355	54.600.000		APBD Kabupaten
1	06	2 06	01 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Usulan Perubahan - Juli		Berkurang/ Bertambah APBD P) (9a-9)	Lokasi	Sumber Dana
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	06	2	06	02	Sub Kegiatan 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.620.500	50.620.500	217.522.138	220.122.138	2.600.000	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	Fiskal ; nambah 1.500.000,- untuk 100 buah Kardus Arsip x Rp. 15.000,- ; Papan nama/plang UPT PPA 1.100.000,-
1	06	2	06	03	Sub Kegiatan 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.000.000	14.000.000	101.439.317	113.439.317	12.000.000	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	Fiskal ; nambah Gordes medel vertical Blind UPT PPA 12.000.000,-
1	06	2	06	04	Sub Kegiatan 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	119.455.800	119.455.800	119.455.800	119.455.800	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	06	05	Sub Kegiatan 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.700.000	40.700.000	40.700.000	40.700.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	06	06	Sub Kegiatan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	06	07	Sub Kegiatan 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	128.561.100	128.561.100	168.561.100	40.000.000	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	Plus 25jt SPDP Rakor, Sisa Anggaran rakor 30jt.
						4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %					-			
1	06	2	07	02	5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jenis barang milik daerah Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	5 Jenis	5 Jenis	339.645.000	39.645.000	300.464.145	568.252.545	267.788.400	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	07	05	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Keluaran : Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	2 Unit	300.000.000	0	0	58.000.000	58.000.000	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	2 unit Kendaraan roda dua 125 cc
1	06	2	07	06	Sub Kegiatan 2. Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah paket mebel yang disediakan	112 Unit	29 Unit	0	0	0	93.928.400	93.928.400	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	Rak Arsip 5 unit x Rp. 3.900.000,- = 19.500.000,-; Meja Kerja 1/2 biro UPT PPA 4 unit 10.000.000,- ; Sofa 1 set 10.000.000,-; Kursi Lipat UPT PPA 6 buah 2.880.000,- ; 6 unit Meja Biro Kadin, sekdin, kabit @5.550.000 = 33.300.000,- ; 6 Unit Kursi kerja kadin, sekdin, kabit @ 2.220.000 = 13.320.000,- ; 1 unit kursi laktasi 4.928.400,- (Total Penambahan 29 Unit)

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Usulan Perubahan - Juli		Berkurang/ Bertambah APBD P) (9a-9)	Lokasi	Sumber Dana
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	06	2	07	09	Sub Kegiatan 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan	28 Unit	40 Unit	39.645.000	39.645.000	300.464.145	416.324.145	115.860.000	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	Fiskal + 1 unit kulkas asi 2.800.000,- ; 1 unit APAR 2.000.000,- ; 1 set Mic, Tiang, Speaker Portabel 30.000.000,-; 2 Unit AC 2 PK 29.000.000,-; 1 Unit AC 1 Pk 6.660.000,- ; 3 Unit AC 1/2 PK 15.000.000,- ; 1 unit Printer UPT PPA 5.500.000,- ; 1 unit Smart TV UPT PPA 10.000.000,- ; 1 unit CCTV 3.800.000,- ; 1 unit Tablet 11.100.000,- (Total penambahan 13 unit)
1	06	2	08	6.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	220.683.000	220.683.000	220.683.000	232.883.000	12.200.000		APBD Kabupaten	
1	06	2	08	01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	08	02	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.600.000	51.600.000	51.600.000	63.800.000	12.200.000	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	Plus 7.200.000 terdiri dari Listrik 1.000.000 + Telp 5.000.000 + Internet kantor 1.200.000 + Internet UPT PPA 5.000.000,-
1	06	2	08	04	Sub Kegiatan 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.083.000	166.083.000	166.083.000	166.083.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	09	7.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang milik daerah dalam kondisi baik Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	6 Jenis	6 Jenis	258.750.000	458.750.000	458.750.000	590.710.434	131.960.434	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	09	01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	09	02	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	159.250.000	159.250.000	159.250.000	159.250.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	09	05	Sub Kegiatan 3. Pemeliharaan Mebel	Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	09	06	Sub Kegiatan 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	47 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	2	09	09	Sub Kegiatan 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.000.000	220.000.000	220.000.000	351.960.434	131.960.434	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	Minus 120jt Pemeliharaan gedung karang taruna; Rahab/ Parkir 85jt, Rehab/ Pakerasan halaman depan kantor 100jt; Rehab/ Pakerasan halaman samping RPPS 66.960.000,-
1					Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran								
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Usulan Perubahan - Juli	Berkurang/ Bertambah APBD P) (9a-9)		Lokasi	Sumber Dana						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1	06			Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02		2 Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Outcome : Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100 %	100 %	267.914.400	227.434.400	227.434.400	348.934.400	121.500.000	Kabupaten Belitung						
1	06	02	2.03	1. Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah (PSKS) Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah PSKS yang aktif Hasil : Keakuratan Data	165 PSKS 100 %	165 PSKS 100 %	267.914.400	227.434.400	227.434.400	348.934.400	121.500.000		APBD Kabupaten					
1	06	02	2.03	02 Sub Kegiatan 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah orang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	29.739.000	5.739.000	5.739.000	5.739.000	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten					
1	06	02	2.03	03 Sub Kegiatan 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Keluarga	13 Keluarga	131.175.500	131.175.500	131.175.500	126.175.500	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten & Fiskal	Pengurangan 4 orang veteran (Meninggal Dunia)				
1	06	02	2.03	04 Sub Kegiatan 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	0	0	0	126.500.000	126.500.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	Pelaksanaan peringatan bulan bakti karang taruna tk. kabupaten dengan peserta dari pengurus karang taruna desa/kelurahan dan pengurus karang taruna masing-masing kecamatan.				
1	06	02	2.03	05 Sub Kegiatan 5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	1 Sertifikat	106.999.900	90.519.900	90.519.900	90.519.900	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten					
1	06	03		3 Program : PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Outcome : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	100 %	100 %	47.256.200	47.256.200	47.256.200	41.256.200	6.000.000	Kabupaten Belitung						
1	06	03	2.01	1. Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Hasil : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12 Orang 100 %	12 Orang 100 %	47.256.200	47.256.200	47.256.200	41.256.200	6.000.000		APBD Kabupaten					
1	06	03	2.01	01 Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12 orang	12 orang	47.256.200	47.256.200	47.256.200	41.256.200	6.000.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten					
1	06	04		4 Program : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Outcome : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %	419.226.450	386.048.250	401.429.112	355.284.512	46.144.600							
1	06	04	2.01	1. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Keluaran : Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	105 orang	105 orang	419.226.450	386.048.250	401.429.112	355.284.512	46.144.600		APBD Kabupaten					

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Usulan Perubahan - Juli	Berkurang/ Bertambah APBD P) (9a-9)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
						Hasil : Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100 %	100 %									
1	06	04	2.01	01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Permakanan	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	105 orang	105 orang	210.631.000	210.631.000	210.631.000	208.131.000	- 2.500.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
1	06	03	2.01	04	Sub Kegiatan	4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	105 Orang	11.148.750	11.148.750	11.148.750	11.148.750	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
1	06	03	2.01	09	Sub Kegiatan	9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	105 orang	105 orang	117.864.200	84.686.000	84.686.000	60.041.400	- 24.644.600	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
1	06	04	2.01	10	Sub Kegiatan	10. Pemberian Layanan Kedaruratan	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	12 orang	32.970.000	32.970.000	48.350.862	36.350.862	- 12.000.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten & Fiskal	
1	06	04	2.01	12	Sub Kegiatan	12. Pemberian Layanan Rujukan	Keluaran : Penang	12 orang	12 orang	46.612.500	46.612.500	46.612.500	39.612.500	- 7.000.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
1	06	05		5	Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	607.784.050	677.334.050	677.334.050	644.184.050	- 33.150.000	Kabupaten Belitung		
1	06	05	2.01		1. Kegiatan	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Keluaran : Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar Hasil : Terpeliharanya anak terlantar	7 Orang 100 %	7 Orang 100 %	23.258.100	23.258.100	23.258.100	23.258.100	-		APBD Kabupaten	
1	06	05	2.01	01	Sub Kegiatan	1. Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Keluaran : Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/ Kota	32 Orang	32 Orang	7.993.500	7.993.500	7.993.500	7.993.500	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
1	06	05	2.01	02	Sub Kegiatan	2. Rujukan Anak-anak Terlantar	Keluaran : Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota	8 Orang	8 Orang	15.264.600	15.264.600	15.264.600	15.264.600	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
1	06	05	2.02		2. Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi Hasil : Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	100 % 100 %	100 % 100 %	584.525.950	654.075.950	654.075.950	620.925.950	- 33.150.000		APBD Kabupaten	
1	06	05	2.02	02	Sub Kegiatan	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8740 Keluarga	8740 Keluarga	323.168.200	392.718.200	392.718.200	367.968.200	- 24.750.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
1	06	05	2.02	03	Sub Kegiatan	2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Keluarga	10 Keluarga	261.357.750	261.357.750	261.357.750	252.957.750	- 8.400.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
1	06	06		6	Program	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	424.559.700	424.517.700	424.517.700	440.517.700	- 16.000.000			
1	06	06	2.02		2. Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran : Korban bencana yang menerima bantuan sosial Hasil : Terlayannya korban bencana	100 % 100 %	100 % 100 %	424.559.700	424.517.700	424.517.700	440.517.700	- 16.000.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Usulan Perubahan - Juli				Berkurang/ Bertambah APBD P) (9a-9)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	06	06	2.02	02	Sub Kegiatan 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	45 Orang	424.559.700	424.517.700	424.517.700	440.517.700	16.000.000	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
1	06	07			7 Program : PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan yang tertata	100 %	100 %	86.975.400	11.325.400	11.325.400	11.325.400	-			
1	06	07	2.01		1. Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran : Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan Hasil : Terpeliharanya taman makam pahlawan	100 % 100 %	100 % 100 %	86.975.400	11.325.400	11.325.400	11.325.400	-		APBD Kabupaten	
1	06	07	2.01	02	Sub Kegiatan 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55 Makam	55 Makam	86.975.400	11.325.400	11.325.400	11.325.400	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten	
2					Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								-			
2	08				Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								-			
2	08	02			8 Program : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36,00 %	36,00 %	453.773.450	439.498.900	439.498.900	439.498.900	-			
2	08	02	2.01		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG Hasil : Terlaksananya Kebijakan PUG	10 PD -	10 PD -	34.274.500	36.326.000	36.326.000	36.326.000	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	18.772.000	36.326.000	36.326.000	36.326.000	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	02	2.01	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Pelaksanaan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	15.502.500	0	0	0	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	02	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Terfasilitasinya Organisasi perempuan Hasil : Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	19 Organisasi 100 %	19 Organisasi 100 %	390.202.700	370.497.900	370.497.900	370.497.900	-		APBD Kabupaten	
2	08	02	2.02	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Organisasi	19 Organisasi	390.202.700	370.497.900	370.497.900	370.497.900	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	02	2.03		3 Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung Hasil : Meningkatnya layanan Pemberdayaan Perempuan dan anak	1 Lembaga 100 %	1 Lembaga 100 %	29.296.250	32.675.000	32.675.000	32.675.000	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Usulan Perubahan - Juli	Berkurang/ Bertambah APBD P) (9a-9)		Lokasi	Sumber Dana
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
2	08 02 2.03 01	Sub Kegiatan 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	14.994.250	16.993.000	16.993.000	16.993.000	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08 02 2.03 03	Sub Kegiatan 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota	1 Dok	1 Dok	14.302.000	15.682.000	15.682.000	15.682.000	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08 03	9 Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	100 %	190.575.850	677.575.850	459.175.850	394.720.850	- 64.455.000			
2	08 03 2.01	1. Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan Hasil : Persentase penanganan kasus	100 % 100 %	100 % 100 %	72.668.850	72.668.850	72.668.850	72.668.850	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08 03 2.01 01	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	72.668.850	72.668.850	72.668.850	72.668.850	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08 03 2.02	2. Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah lembaga yang terfasilitasi Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	3 Lembaga 100 %	3 Lembaga 100 %	117.907.000	604.907.000	386.507.000	322.052.000	- 64.455.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08 03 2.02 02	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Layanan	6 Layanan	117.907.000	604.907.000	386.507.000	322.052.000	- 64.455.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08 04	10 Program : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani	100 %	100 %	27.317.500	21.797.500	21.797.500	12.055.000	- 9.742.500			
2	08 04 2.02	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Lembaga keluarga yang dibina Hasil : Meningkatnya layanan keluarga	1 Lembaga 100 %	1 Lembaga 100 %	27.317.500	21.797.500	21.797.500	12.055.000	- 9.742.500	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08 04 2.02 01	Sub Kegiatan 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	27.317.500	21.797.500	21.797.500	12.055.000	- 9.742.500	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08 05	11 Program : PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	65 %	65 %	45.671.700	45.671.700	45.671.700	45.671.700	-			
2	08 05 2.01	1. Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Tersedianya data gender dan anak Hasil : Data terpilah gender dan anak yang akurat	1 Dok 80 %	1 Dok 80 %	45.671.700	45.671.700	45.671.700	45.671.700	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08 05 2.01 01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	45.671.700	45.671.700	45.671.700	45.671.700	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Usulan Perubahan - Juli		Berkurang/ Bertambah APBD P) (9a-9)	Lokasi	Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	08	06			12 Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	292.749.800	274.295.750	274.295.750	270.743.750	-	3.552.000			
2	08	06	2.01		1. Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Tercapainya peningkatan status KLA Hasil : Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Madya	Madya	17.265.850	17.265.850	17.265.850	13.713.850	-	3.552.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	06	2.01	02	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	17.265.850	17.265.850	17.265.850	13.713.850	-	3.552.000	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	06	2.02		2. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung Hasil : Meningkatnya layanan terhadap anak	1 Dok	1 Dok	275.483.950	257.029.900	257.029.900	257.029.900	-	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	06	2.02	03	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 Dok	52.454.050	34.000.000	34.000.000	34.000.000	-	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	06	2.02	04	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	223.029.900	223.029.900	223.029.900	223.029.900	-	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	07			13 Program : PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %	100 %	7.393.950	7.393.950	225.793.950	221.777.000	-	-4.016.950			
2	08	07			1. Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	100 %	100 %	0	0	130.000.000	130.000.000	-	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	07			Sub Kegiatan 2 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Keluaran : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Orang	510 Orang	0	0	130.000.000	130.000.000	-	-	Kabupaten Belitung	DAK Non Fisik	DAK Non Fisik PPA
2	08	07			1. Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	100 %	100 %	7.393.950	7.393.950	7.393.950	3.377.000	-	4.016.950	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	07			Sub Kegiatan 2 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	1 Orang	7.393.950	7.393.950	7.393.950	3.377.000	-	4.016.950	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	
2	08	07	2.03		1. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan Hasil : Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	100 %	100 %	0	0	88.400.000	88.400.000	-	-	Kabupaten Belitung	APBD Kabupaten	

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Usulan Perubahan - Juli	Berkurang/ Bertambah APBD P) (9a-9)
2	08	07	2.03		Sub Kegiatan 2 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK		48 Orang	0	0	88.400.000	88.400.000	-	Kabupaten Belitung	DAK Non Fisik	DAK Non Fisik PPA
Jumlah									8.579.368.613	9.503.811.091	10.034.352.053	10.314.852.053	280.500.000			



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BELITUNG
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					
									8.579.368.613,00	9.503.811.091,00	10.314.852.053,00	1.735.483.440,00							14.093.854.349,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.561.886.363,00	8.037.577.441,00	8.928.557.353,00	1.366.670.990,00							12.619.329.023,00				
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							7.561.886.363,00	8.037.577.441,00	8.928.557.353,00	1.366.670.990,00							12.619.329.023,00				
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 78.80 % %	100 78.80 % %	5.708.170.163,00	6.263.661.441,00	7.089.055.091,00	3.359.123.306,00							9.067.293.469,00				
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penggabungan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Keluaran)				6 Dokumen	6 Dokumen	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00			-	-	-		88.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.554.320.863,00	5.131.251.041,00	4.949.864.271,00	395.543.408,00			-	-	-		5.525.896.272,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.551.320.863,00	5.128.251.041,00	4.949.864.271,00	395.543.408,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.522.596.272,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																					
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah				29 Orang	29 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00			-	-	-		251.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	289.776.300,00	368.337.400,00	678.597.975,00	388.821.675,00			-	-	-		618.157.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.470.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.620.500,00	50.620.500,00	220.121.758,00	169.501.258,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-	-		64.251.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	114.759.317,00	100.759.317,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-	-		16.940.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	119.455.800,00	119.455.800,00	119.455.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		168.590.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.700.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			53.570.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.336.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	128.561.100,00	168.561.100,00	118.561.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang milik daerah				5 Jenis	5 Jenis	339.645.000,00	39.645.000,00	560.804.845,00	221.159.845,00			-	-			209.539.797,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	57.720.000,00	-242.280.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	29 Unit	0,00	0,00	90.820.200,00	90.820.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.434.890,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	39.645.000,00	39.645.000,00	412.264.645,00	372.619.645,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			61.104.907,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	220.683.000,00	220.683.000,00	239.083.000,00	18.400.000,00			-	-			250.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.600.000,00	51.600.000,00	70.000.000,00	18.400.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	166.083.000,00	166.083.000,00	166.083.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			182.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik				6 Jenis	6 Jenis	258.750.000,00	458.750.000,00	590.710.000,00	331.960.000,00			-	-			2.123.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	159.250.000,00	159.250.000,00	159.250.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			230.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	47 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	20.000.000,00	220.000.000,00	351.960.000,00	331.960.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial				100 %	100 %	267.914.400,00	227.434.400,00	348.934.400,00	406.759.185,00							674.673.585,00	
1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS aktif				165 PSKS	165 PSKS	267.914.400,00	227.434.400,00	348.934.400,00	81.020.000,00			-	-			674.673.585,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	29.739.000,00	5.739.000,00	5.739.000,00	-24.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			82.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Keluarga	17 Keluarga	131.175.500,00	131.175.500,00	126.175.500,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			271.227.385,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				-	6 Lembaga	0,00	0,00	126.500.000,00	126.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			185.946.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																			
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	1 Sertifikat	106.999.900,00	90.519.900,00	90.519.900,00	-16.480.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			135.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya				100 %	100 %	47.256.200,00	47.256.200,00	41.256.200,00	12.669.050,00							59.925.250,00		
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarisasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal				12 Orang	12 Orang	47.256.200,00	47.256.200,00	41.256.200,00	-6.000.000,00							59.925.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																			
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	47.256.200,00	47.256.200,00	41.256.200,00	-6.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			59.925.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial				100 %	100 %	419.226.450,00	386.048.250,00	355.284.512,00	623.507.250,00							1.042.733.700,00		
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial				105 Orang	105 Orang	419.226.450,00	386.048.250,00	355.284.512,00	-63.941.938,00							1.042.733.700,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	210.631.000,00	210.631.000,00	208.131.000,00	-2.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			217.349.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	11.148.750,00	11.148.750,00	11.148.750,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			485.206.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	117.864.200,00	84.686.000,00	60.041.400,00	-57.822.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			203.225.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	32.970.000,00	32.970.000,00	36.350.862,00	3.380.862,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			83.228.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	46.612.500,00	46.612.500,00	39.612.500,00	-7.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			53.724.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial				100 %	100 %	607.784.050,00	677.334.050,00	644.184.050,00	523.929.930,00							1.131.713.980,00		
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar				7 Orang	7 Orang	23.258.100,00	23.258.100,00	23.258.100,00	0,00							133.273.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Djangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	7.993.500,00	7.993.500,00	7.993.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.111.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	15.264.600,00	15.264.600,00	15.264.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.162.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi				100 %	100 %	584.525.950,00	654.075.950,00	620.925.950,00	36.400.000,00			-	-			998.440.730,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				8740 Keluarga	8740 Keluarga	323.168.200,00	392.718.200,00	367.968.200,00	44.800.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	10 Keluarga	261.357.750,00	261.357.750,00	252.957.750,00	-8.400.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			348.440.730,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana				100 %	100 %	424.559.700,00	424.517.700,00	438.517.700,00	114.369.339,00							538.929.039,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana yang menerima bantuan sosial				100 %	100 %	424.559.700,00	424.517.700,00	438.517.700,00	13.958.000,00			-	-			538.929.039,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	424.559.700,00	424.517.700,00	438.517.700,00	13.958.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			538.929.039,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan yang tertata				100 %	100 %	86.975.400,00	11.325.400,00	11.325.400,00	17.084.600,00							104.060.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan				100 %	100 %	86.975.400,00	11.325.400,00	11.325.400,00	-75.650.000,00			-	-			104.060.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				55 Makam	55 Makam	86.975.400,00	11.325.400,00	11.325.400,00	-75.650.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			104.060.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.017.482.250,00	1.466.233.650,00	1.386.294.700,00	368.812.450,00							1.474.525.326,00	
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.017.482.250,00	1.466.233.650,00	1.386.294.700,00	368.812.450,00							1.474.525.326,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				36 %	36 %	453.773.450,00	439.498.900,00	439.498.900,00	117.278.177,00							571.051.627,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG				10 SKPD	10 SKPD	34.274.500,00	36.326.000,00	36.326.000,00	2.051.500,00			-	-			48.237.060,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	18.772.000,00	36.326.000,00	36.326.000,00	17.554.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			20.793.050,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	15.502.500,00	0,00	0,00	-15.502.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.444.010,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya organisasi perempuan				19 Organisasi	19 Organisasi	390.202.700,00	370.497.900,00	370.497.900,00	-19.704.800,00			-	-			472.938.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				19 Organisasi	19 Organisasi	390.202.700,00	370.497.900,00	370.497.900,00	-19.704.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			472.938.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum Puspa Kabupaten Belitung				1 Lembaga	1 Lembaga	29.296.250,00	32.675.000,00	32.675.000,00	3.378.750,00			-	-			49.875.667,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	14.994.250,00	16.993.000,00	16.993.000,00	1.998.750,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.035.667,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	14.302.000,00	15.682.000,00	15.682.000,00	1.380.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.840.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perlindungan perempuan				100 %	100 %	190.575.850,00	677.575.850,00	394.720.850,00	136.424.150,00							327.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan				100 %	100 %	72.668.850,00	72.668.850,00	72.668.850,00	0,00			-	-			192.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	72.668.850,00	72.668.850,00	72.668.850,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			192.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terfasilitasi				3 Lembaga	3 Lembaga	117.907.000,00	604.907.000,00	322.052.000,00	204.145.000,00			-	-			134.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Layanan	11 Layanan	117.907.000,00	604.907.000,00	322.052.000,00	204.145.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			134.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani				100 %	100 %	27.317.500,00	21.797.500,00	12.132.500,00	6.814.573,00							34.132.073,00	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga keluarga yang dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	27.317.500,00	21.797.500,00	12.132.500,00	-15.185.000,00			-	-			34.132.073,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	27.317.500,00	21.797.500,00	12.132.500,00	-15.185.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.132.073,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)				65 %	65 %	45.671.700,00	45.671.700,00	45.671.700,00	7.829.926,00							53.501.626,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak				1 Dok	1 Dok	45.671.700,00	45.671.700,00	45.671.700,00	0,00			-	-			53.501.626,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	45.671.700,00	45.671.700,00	45.671.700,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			53.501.626,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)				Madya undefined	Madya undefined	292.749.800,00	274.295.750,00	270.743.750,00	187.950.200,00							480.700.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan status KLA				Madya undefined	Madya undefined	17.265.850,00	17.265.850,00	13.713.850,00	-3.552.000,00			-	-			57.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17.265.850,00	17.265.850,00	13.713.850,00	-3.552.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung				1 Dok	1 Dok	275.483.950,00	257.029.900,00	257.029.900,00	-18.454.050,00			-	-			423.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	52.454.050,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-18.454.050,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			121.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	223.029.900,00	223.029.900,00	223.029.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			302.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten				-	100 100,00 % %	7.393.950,00	7.393.950,00	223.527.000,00	746.050,00							8.140.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan dan SDM dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				-	100 %	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	510 Orang	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan				-	100 %	7.393.950,00	7.393.950,00	5.127.000,00	-2.266.950,00			-	-			8.140.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				1 Orang	1 Orang	7.393.950,00	7.393.950,00	5.127.000,00	-2.266.950,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.140.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan				100 %	100 %	0,00	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00			-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	48 Orang	0,00	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
J U M L A H									8.579.368.613,00	9.503.811.091,00	10.314.852.053,00	-80.632.669.271,00							14.093.854.349,00	



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **MIKRON ANTARIKSA**

Jabatan : **Pj. BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BELITUNG,
MIKRON ANTARIKSA



Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS,
KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Utama Muda
NIP. 196908241990031004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,50
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	98,79%
3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,43
4	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Level Anugerah Paruhita Ekapraya (APE)	Pratama
5	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	3,20

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 348.934.400	P-APBD & Fiskal
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 41.256.200	P-APBD
3.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 355.284.512	P-APBD & Fiskal
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 644.184.050	P-APBD & Fiskal
5.	Penanganan Bencana	Rp. 438.517.700	P-APBD
6.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 11.325.400	P-APBD
7.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 439.498.900	P-APBD
8.	Perlindungan Perempuan	Rp. 394.720.850	P-APBD & DAK Non Fisik
9.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 12.132.500	P-APBD
10.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 45.671.700	P-APBD
11.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 270.743.750	P-APBD
12.	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 223.527.000	P-APBD & DAK Non Fisik
13.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.089.055.091	P-APBD & Fiskal
JUMLAH		Rp. 10.314.852.053	



Tanjungpandan, 14 Oktober 2024

KASIMIN, S.IP, MAB
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196908241990031004

FORM 2 : PENGUKURAN KINERJA

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

1. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan 1. "Meningkatnya Kesejahteraan PMKS" ; Sasaran Strategis Ke 1. "Meningkatnya penanganan PMKS"

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/K ualitatif)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.
								Capaian	%	
1		2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	Kualitatif	0.5	(Jumlah PMKS Tahun n-1 - Jumlah PMKS Tahun n) / Jumlah PMKS Tahun n-1 x 100%	Tabel Jenis PMKS tahun 2023 dan Triwulan IV 2024	= (11986 - 8324) / 11986 x 100% = 3662 / 11.986 x 100% = 30,55	30.55	6,110.00	Eselon II (Indikator IKU)
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	Kuantitatif	98.79%	= Jumlah PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan / Jumlah PMKS x 100%	Tabel Jenis PMKS yang menerima bantuan dan yang seharusnya menerima bantuan sd. Triwulan IV Tahun 2024	= 8136/8324 x 100% = 97,62%	97.62	98.82	Eselon II (Indikator IKU)
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Kuantitatif	100%	(Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial /Jumlah PMKS)x100%	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin (Data BPNT :7336 dan Data PMKS 8324)	= 7336/8324 *100 = 88,13	88.13	88.13	Eselon III (Indikator Program)
1.1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang aktif	Kuantitatif	165 PSKS	Jumlah PSKS aktif ditingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin (Data BPNT :7336 dan Data PMKS 8324)	Jumlah PSKS Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin : 49 PSM, 5 TKSK, 55 Karang Taruna, 12 LK3, 13 Veteran	134 PSKS	81.21	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	5 Orang	Jumlah TKSK yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Data kinerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	5 Orang TKSK di setiap kecamatan	5 orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	13 Keluarga	Jumlah penerima penghargaan kepada veteran / pejuang	Data kinerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	13 orang veteran/ pejuang/ janda veteran	13 orang	100.00	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	6 Lembaga	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya	Data kinerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	6 Lembaga Karang Taruna di 5 Kecamatan dan 1 Karang Taruna di Kabupaten	6 Lembaga	100.00	
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Sertifikat	Jumlah sertifikat SDM/ Lembaga LK3	Data kinerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-	1 Sertifikat	100.00	

2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	Kuantitatif	100%	(Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani / Jumlah warga Negara migran korban kekerasan) x 100%.		=13/13*100 = 100	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Program)
2.1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kuantitatif	12 Orang	jumlah warga Negara migran tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal.		-	13 Orang	108.33	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kuantitatif	12 Orang	jumlah warga Negara migran tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal.		-	13 Orang	108.33	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	Kuantitatif	100%	(Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti/Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis diluar panti)x100%.	Data kinerja dari bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial (Data SPM triwulan IV Tahun 2024)	=105/105*100 = 100	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Program)
3.1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandaangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Kuantitatif	105 orang	jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	105 orang	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	105 Orang	Jumlah lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai standar gizi minimal		-	105 orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	105 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			105 orang	100.00	
3	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	105 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota			105 orang	100.00	
4	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	12 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Data sampai dengan triwulan I 7 org, Triwulan II 1 org, Triwulan III 8 orang. Total 16 orang	-	16 orang	133.33	
5	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	5 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Data sampai dengan triwulan I 4 orang, triwulan II 1 orang, triwulan III 2 orang. Total 7 orang	-	7 orang	140.00	

4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	Kuantitatif	100%	(Jumlah penerima perlindungan dan jaminan sosial (PBI) / Jumlah Jiwa dalam DTKS) x 100 %		= 38725 / 44794 x 100% = 86,45	86.45	86.45	Indikator Eselon III (Indikator Program)	
4.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar	Kuantitatif	5 Orang	jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya.	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	Triwulan I 0 orang, Tw II 7 org, TW III 1 orang, Tw IV 2 org. Total 10 orang	10 orang	200.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)	
	1	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	5 Orang	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/ Kota	Data Kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	Triwulan I 0 orang, Tw II 7 org, TW III 1 orang, Tw IV 2 org. Total 10 orang	10 orang	200.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	5 Orang	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota	Data Kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	Triwulan I 0 orang, Tw II 7 org, TW III 1 orang, Tw IV 2 org. Total 10 orang	10 orang	200.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4.2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	Kuantitatif	100%	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	Pada Aplikasi SIG-NG : Data DTKS 44794. perlu perbaikan 56	= Data yang tervalidasi / data DTKS x 100% = (44794 - 56) / 44796 x 100% = 99,87%	99.87	99.87	Eselon III (Indikator Kegiatan)	
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	8740 keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	Data BPNT Triwulan IV th 2024 = 7336	= 7336 / 8740 X 100% = 83,94%	7336	83.94	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	10 Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	0	Triwulan II 2 keluarga, triwulan III 3 keluarga, tw IV 13 orang. Total 18 Keluarga	18 keluarga	180.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan) _ Sumber Dana : Insentif Fiskal 2023)
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana	Kuantitatif	100%	(Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/Populasi korban bencana alam dan sosial kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten)x100%	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial, bencana alam 64, dan bencana sosial 1. total bencana 65 org	= 65/65 x 100% = 100%	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Program)	
5.1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	Kuantitatif	100%	jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial.	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial, bencana alam 64, dan bencana sosial 1. total bencana 65 org	=65/65 x 100	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)	
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/ kota	Kuantitatif	45 orang	Jumlah orang yang melaksanakan Koodinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah anggota tagana 2024	45 orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	Kuantitatif	100%	Taman Makam Palawan yang Tertata / Taman Makam Pahlawan yang ada x 100%		=1/1*100%=100%	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Program)
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	Kuantitatif	100%	Jumlah TMP yang dipelihara di bagi jumlah seluruh TMP		=1/1*100% = 100%	100.00	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/ kota	Kuantitatif	55 makam	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota		-	55 makam	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
7.a.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kuantitatif	100	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Persentase dokumen yang telah dilaporkan dibagi persentase keseluruhan	Persentase dokumen yang telah dilaporkan dibagi persentase keseluruhan	100	100.00	Eselon III (Indikator Program)
7.a.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kuantitatif	6 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen perencanaan terdiri dari renstra, renja induk, renja perubahan; dokumen pelaporan terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	Dokumen perencanaan terdiri dari renstra, renja induk, renja perubahan; dokumen pelaporan terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	6 Dok	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kuantitatif	3 Dok	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Terdiri dari Renstra, Renja Induk dan Renja Perubahan	Terdiri dari Renstra, Renja Induk dan Renja Perubahan	3 dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kuantitatif	3 Laporan	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	Terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	3 Laporan	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
7.a.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	Kuantitatif	3 Dok	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen keuangan yang telah selesai di laporkan	Persentase dokumen keuangan yang telah selesai dilaporkan	3 Dok	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Kuantitatif	29 Orang	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Data gaji dan tunjangan pegawai sampai TW I 2024	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	28 orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kuantitatif	2 Dok	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen terdiri dari laporan keuangan, laporan barang	dokumen terdiri dari laporan keuangan, laporan barang	2 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
7.b.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kuantitatif	78.80%	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Dokumen penilaian Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dan dibagikan oleh BKPSDM setiap tahunnya		78.93	100.16	Eselon III (Indikator Program)
7.b.1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kuantitatif	29 Orang	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang telah selesai di laporkan	Persentase dokumen keuangan yang telah selesai dilaporkan	28 Orang	96.55	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kuantitatif	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Data penyediaan pakaian dinas bagi pegawai	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	1 Paket	100.00	Eselon III (Indikator Program)
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kuantitatif	5 Orang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Data Pegawai yang mengikuti diklat atau bimtek	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	3 Orang	60.00	Eselon III (Indikator Program)
7.c.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kuantitatif	100%	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Pelayanan administrasi umum perkantoran dan administrasi jasa pelayanan umum perkantoran		100	100.00	Eselon III (Indikator Program)
7.c.1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kuantitatif	100%	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum, sub kegiatan rutin sekretariat	Administrasi umum, sub kegiatan rutin sekretariat	100	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)

	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kuantitatif	1 Paket	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Data realisasi fisik sd. Sept 2024		1 Paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kuantitatif	2 Paket	Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Data realisasi fisik sd. Sept 2024		2 Paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kuantitatif	1 paket	Peralatan rumah tangga	Data realisasi fisik sd. Sept 2024		1 paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Kuantitatif	2 Paket	Bahan logistik kantor	Data realisasi fisik sd. Sept 2024		2 Paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kuantitatif	1 paket	Barang cetakan dan penggandaan	Data realisasi fisik sd. Sept 2024		1 paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kuantitatif	1 Dok	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Data realisasi fisik sd. Sept 2024		1 Dok	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	7	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kuantitatif	12 Laporan	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Data realisasi fisik sd. Sept 2024		12 Laporan	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
7.c.2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kuantitatif	100%	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Data realisasi fisik sd. Des 2024	Realisasi fisik Tw IV 2024	100%	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kuantitatif	12 Laporan	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat, materai, perangko, dan pengiriman		12 Laporan	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kuantitatif	12 Laporan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 Laporan	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa layanan umum kantor yang disediakan	Kuantitatif	12 Laporan	Jasa layanan umum kantor	Tenaga Non ASN Cleaning Service, Sopir dan Penjaga Malam		12 Laporan	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
7.d.		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kuantitatif	100%	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Data Barang Milik Daerah (BMD)/ Asset DSPPPA		100%	100.00	Eselon III (Indikator Program)
7.d.1.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah	Kuantitatif	3 Jenis	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor	Data Barang Milik Daerah (BMD)/ Asset DSPPPA		3 Jenis	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kuantitatif	2 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas roda dua			2 Unit	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kuantitatif	29 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			29 Unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kuantitatif	36 unit	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			34 Unit	94.44	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
7.d.2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik	Kuantitatif	5 Jenis	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik	5 Jenis	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kuantitatif	2 Unit	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 Unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kuantitatif	21 Unit	Kendaraan dinas roda 2, 3, 4, atau lebih yang dipelihara	Jumlah Kendaraan dinas roda 2, 3, 4, atau lebih yang dipelihara	Kendaraan dinas roda 2, 3, 4, atau lebih yang dipelihara	21 Unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3	Pemeliharaan Mebeleur	Jumlah mebel yang dipelihara	Kuantitatif	10 Unit	Mebeleur yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	4 Unit	40.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kuantitatif	47 Unit	Peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	47 Unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Kuantitatif	3 Unit	Gedung kantor, bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung kantor, bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung kantor, bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

2. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan ke 2. "Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan" ; Sasaran Strategis Ke 2. "Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/K)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.	
							Capaian	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10	
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Kualitatif	53.43%	Persentase perempuan di Parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis, yang dikeluarkan oleh BPS.	Data yang ada yang bersumber dari beberapa instansi	IDG Belitung th 2024 53,47 ; IDG Belitung 2023 53,42	53.47	100.07	Eselon II (IKU)
2	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kuantitatif	Pratama	Hasil penilaian APE yang berlaku dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Penilaian APE 2 tahun sekali, 2024 tidak ada penilaian APE. Jadi masih menggunakan APE 2023 yaitu predikat Pratama		Pratama	100.00	Eselon II (IKU)
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Kuantitatif	36%	(Jumlah anggaran yang serponsive gender seluruh PD / Jumlah belanja operasional dan belanja modal APBD) x 100%	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	= 527.091.670.494 /1.194.818.506.736 x 100% = 44,11	44.11	122.53%	Eselon III (Indikator Program)
1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG	Kuantitatif	10 PD	Jumlah Lembaga Pemerintahan Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan		10 PD	100	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan		1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Kuantitatif	19 Organisasi	Jumlah Organisasi Perempuan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan		19 Organisasi	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)

	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	19 Organisasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi kelembagaan perempuan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan		19 Organisasi	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung	Kuantitatif	1 Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Lembaga	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kuantitatif	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		-	1 Lembaga	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota		-	1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani	Kuantitatif	100%	Jumlah Keluarga yang melapor dan memerlukan pelayanan / jumlah keluarga yang dilayani x 100%.			100%	100.00	Eselon III (Indikator Program)
	2.1.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Lembaga keluarga yang dibina	Kuantitatif	1 Lembaga	Jumlah lembaga keluarga yang dibina		-	1 Lembaga	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kuantitatif	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan		-	1 Lembaga	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi gender dan anak	Kuantitatif	65%	(Komponen data gender dan anak yang terpenuhi / Jumlah komponen data SIGA) x 100%	Data Kinerja bidang PUGPP dan Pemberdayaan Perempuan	= 67/85 x 100 = 78,82	78.82%	121.26	Eselon III (Indikator Program)
	3.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di	Tersedianya data gender dan anak	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah data gender dan anak	Data Kinerja bidang PUGPP dan Pemberdayaan Perempuan		1 Dok	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Data Kinerja bidang PUGPP dan Pemberdayaan Perempuan		1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

3. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan ke-3. "Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan"; Sasaran Strategis ke 3. "Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknik Perhitungan	Kinerja	Ket.
-----	-------------------	--------------	--------	------------------------------	--------------	--------------------	---------	------

			(Kuantitatif/K					Capaian	%	
1		2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan perempuan dan anak	Kualitatif	3.2	Jumlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak / jumlah penduduk perempuan dan anak x 10.000	Simponi PPA, Data penduduk Perempuan dan Anak (Capil)	Data kasus s.d. Desember 2024 : anak laki2 4, anak perempuan 20, perempuan dewasa 18 = Total kasus ank dan perempuan 42 / jumlah anak dan perempuan th 2024 94.482 x 10.000 = 4,45	4.45	71.91	Eselon II (IKU)
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan perempuan dan anak	Kualitatif	3.2	Jumlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak / jumlah penduduk perempuan dan anak x 10.000	Simponi PPA, Data penduduk Perempuan dan Anak (Capil)	Data kasus s.d. Desember 2024 : anak laki2 4, anak perempuan 20, perempuan dewasa 18 = Total kasus ank dan perempuan 42 / jumlah anak dan perempuan th 2024 94.482 x 10.000 = 4,45	4.45	71.91	Eselon II (IKU)
1	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	Kuantitatif	100%	Jumlah korban kekerasan perempuan yang melapor / jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan x 100%.	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak, dan UPT PPA	= 18/18 x 100 = 100%	100%	100.00	Eselon III (Indikator Program)
1.1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak	Kuantitatif	100%	jumlah layanan dibagi jumlah pengaduan dikali 100%.	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak, dan UPT PPA	= 42/42 x 100 = 100%	100%	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	-	1 Dok	100.00	Eselon II (IKU)
1.2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Kuantitatif	3 Lembaga	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	3 Lembaga : Satgas PPA, P2TP2A, Kelompok PKDRT	3 Lembaga	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	11 Layanan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA5NQ== '1. Menerima pelaporan atau penjangkauan korban; 2. menyampaikan informasi terkait hak korban; 3. memfasilitasi pemberian layanan; 4	11 Layanan	100.00	Eselon III (Indikator Program)
2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kualitatif	Madya	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Data bersumber dari Kementerian PPA yang Menetapkan status KLA ;	Kabupaten Belitung memperoleh predikat Madya dari Kementerian PPA RI	Madya	100.00	Eselon III (Indikator Program)

2.1.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan status KLA	Kualitatif	Madya	Jumlah Skor status KLA Pratama	Data bersumber dari Kementerian PPA yang Menetapkan status KLA ;	Kabupaten Belitung meraih KLA Madya (skor 601 - 700)	Madya	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kabupaten/Kota	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
1.2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Kuantitatif	1 Dok	Laporan Fasilitasi Forum anak Kabupaten Belitung	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	0	0.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
3	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Terkait Kabupaten	Kuantitatif	100%	(Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani / Jumlah korban kekerasan yang tercatat) x 100%	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	= 24/24 x 100 = 100	100	100.00	Eselon III (Indikator Program)
3.1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA	Kuantitatif	100%	Jumlah layanan perlindungan anak ditingkat Desa/ kelurahan dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan dikali 100%	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	= 49/49 x 100 = 100	100	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan/ pencegahan KTA	Kuantitatif	510 Orang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan/ pencegahan KTA	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	510 orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3.2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	Kuantitatif	100%	Jumlah layanan perlindungan anak ditingkat Desa/ kelurahan dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan dikali 100%	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	= 49/49 x 100 = 100	100	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kuantitatif	5 Orang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		5 Orang	100.00	Eselon III (Indikator Program)

3.3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	Kuantitatif	100%	Jumlah layanan perlindungan anak ditingkat Desa/ kelurahan dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan dikali 100%	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	= $49/49 \times 100 = 100$	100	100.00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Kuantitatif	48 Orang	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		48 orang	100.00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

Tanjungpandan, 13 Januari 2025



 KEPALA DINAS,
KASMIN, S.I.P., MAB
 Perencana Utama Muda / IV c
 NIP. 19690824 199003 1 004

FORM 1 : LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategi	IKU/Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Kinerja Triwulan III		Program/ Kegiatan	Besaran Anggaran (Rp)		
				Capaian	%		Pagu Anggaran Induk	Pagu Anggaran Perubahan	Yang digunakan
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS Tahunan	0.5	30.55	6110.00				
	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	98.79%	97.62	98.82				
						Program Pemberdayaan Sosial	227,434,400	348,934,400	321,623,110
						Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	227,434,400	348,934,400	321,623,110
						Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,739,000	5,739,000	5,419,900
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	131,175,500	126,175,500	111,711,210
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	126,500,000	124,497,000

							Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	90,519,900	90,519,900	79,995,000
							Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	47,256,200	41,256,200	16,955,668
							<i>Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal</i>	47,256,200	41,256,200	16,955,668
							Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	47,256,200	41,256,200	16,955,668
							Program Rehabilitasi Sosial	386,048,250	355,284,512	316,638,998
							<i>Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	386,048,250	355,284,512	316,638,998
							Penyediaan Permakanan	210,631,000	208,131,000	205,070,000
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11,148,750	11,148,750	5,495,000
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	84,686,000	60,041,400	54,269,850
							Pemberian Layanan Kedaruratan	32,970,000	36,350,862	36,116,500
							Pemberian Layanan Rujukan	46,612,500	39,612,500	15,687,648

								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	677,334,050	644,184,050	513,269,294
								Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	23,258,100	23,258,100	9,955,900
								Penjangkauan Anak-anak Terlantar	7,993,500	7,993,500	1,080,000
								Rujukan Anak-Anak Terlantar	15,264,600	15,264,600	8,875,900
								Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	654,075,950	620,925,950	503,313,394
								Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	392,718,200	367,968,200	366,499,950
								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	261,357,750	252,957,750	136,813,444
								Program Penanganan Bencana	424,517,700	438,517,700	398,107,550
								Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	424,517,700	438,517,700	398,107,550
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	424,517,700	438,517,700	398,107,550
								Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	11,325,400	11,325,400	5,730,400
								Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11,325,400	11,325,400	5,730,400
								Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11,325,400	11,325,400	5,730,400

							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6,263,661,441	7,089,055,091	6,829,527,996
							Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,995,000	4,995,000	4,448,000
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,995,000	2,995,000	2,746,000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	2,000,000	1,702,000
							Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,131,251,041	4,949,864,271	4,838,949,188
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,128,251,041	4,946,864,271	4,836,429,688
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,000,000	3,000,000	2,519,500
							Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,000,000	65,000,000	42,850,913
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15,000,000	15,000,000	14,700,000
							Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	25,000,000	50,000,000	28,150,913
							Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	368,337,400	678,597,975	634,658,581
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	10,000,000	9,959,000
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,620,500	220,121,758	198,430,440

							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,000,000	114,759,317	97,941,500
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119,455,800	119,455,800	118,587,450
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,700,000	40,700,000	36,376,000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	5,000,000	4,885,000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128,561,100	168,561,100	168,479,191
							Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	39,645,000	560,804,845	506,722,000
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	57,720,000	51,020,000
							Pengadaan Mebel	-	90,820,200	86,707,000
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,645,000	412,264,645	368,995,000
							Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220,683,000	239,083,000	228,671,749
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	2,000,000
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,600,000	70,000,000	60,780,749
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166,083,000	166,083,000	165,891,000
							Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458,750,000	590,710,000	573,227,565

							Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	36,326,000	36,326,000	33,966,600
							Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	370,497,900	370,497,900	369,247,284
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	370,497,900	370,497,900	369,247,284
							Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	32,675,000	32,675,000	32,437,450
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	16,993,000	16,993,000	16,863,200
							Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15,682,000	15,682,000	15,574,250
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	21,797,500	12,132,500	11,880,000

							<i>Kegiatan : Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	21,797,500	12,132,500	11,880,000
							Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21,797,500	12,132,500	11,880,000
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	45,671,700	45,671,700	40,377,200
							<i>Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	45,671,700	45,671,700	40,377,200
							Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	45,671,700	45,671,700	40,377,200
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio Kekerasan perempuan dan anak	3.2	4.45	71,91 (Indikator Negatif)				
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio Kekerasan perempuan dan anak	3.2	4.45	71,91 (Indikator negatif)				
							Program Perlindungan Perempuan	677,575,850	394,720,850	195,433,106

								Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72,668,850	72,668,850	66,553,060
								Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72,668,850	72,668,850	66,553,060
								Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	604,907,000	322,052,000	128,880,046
								Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	604,907,000	322,052,000	128,880,046
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	274,295,750	270,743,750	228,070,519
								Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	17,265,850	13,713,850	12,696,100

							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17,265,850	13,713,850	12,696,100
							Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	257,029,900	257,029,900	215,374,419
							Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34,000,000	34,000,000	-
							Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	223,029,900	223,029,900	215,374,419
							Program Perlindungan Khusus Anak	7,393,950	223,527,000	207,991,700
							Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	130,000,000	126,542,500
							Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	130,000,000	126,542,500

								<i>Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	7,393,950	5,127,000	3,073,200
								Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	7,393,950	5,127,000	3,073,200
								<i>Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	88,400,000	78,376,000
								Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	-	88,400,000	78,376,000
TOTAL									9,503,811,091	10,314,852,053	9,521,256,875

Tanjungpandan, 13 Januari 2025


KEPALA DINAS,
KASHIMIN, S.IP, MAB
 Pejabat Utama Muda (IV.c)
 NIP. 19990824 199003 1 004

FORM 3 : ANALISIS KINERJA

**PENJELASAN CAPAIAN KINERJA OPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

1. Penjelasan Capaian Kinerja Tujuan 1. "Meningkatnya Kesejahteraan PMKS" ; Sasaran Strategi Ke-1. "Meningkatnya penanganan PMKS"

No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/ PMKS)
		- Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
		- Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan dibagi jumlah PMKS seluruhnya dikali 100%
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Sudah sesuai target yang direncanakan
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	Kinerja saat ini sudah menggunakan Non Tunai, sehingga lebih mudah pengukuran realisasi program dibandingkan tahun sebelumnya yang masih manual
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	Pelaksanaan program/kegiatan sudah terintegrasi dengan instansi terkait
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Terpenuhinya kebutuhan, tersalurkannya bantuan kepada PMKS
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	Melaksanakan verifikasi dan verifali data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS

2. Penjelasan Capaian Kinerja Tujuan ke 2. "Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan" ; Sasaran Strategi Ke-2. "Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan"

No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pemberdayaan Gender - Pravelensi Kekerasan terhadap Perempuan - Pravelensi ARG pada belanja langsung ARG (Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan ARG, terfasilitasinya organisasi perempuan) - Persentase layanan perlindungan perempuan
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> - % (Persentase perempuan di Parlemen Pegawai, Pegawai Senior, Manager dan Pekerja Profesional dan Teknis) menggunakan data IDG pada Tahun 2023 - 'Rasio Perempuan Korban Kekerasan Perempuan (5.1 %) lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. -ARG = 0,5 % -Organisasi perempuan = 21 organisasi. - Persentase layanan perlindungan perempuan= 100 % sama dengan tahun sebelumnya.
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	Pelaksanaan program/kegiatan sudah terintegrasi dengan instansi terkait
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ' - Indeks pembangunan Gender '- Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan perempuan '- pravelensi kekerasan terhadap perempuan dan Penyerapan anggaran lebih dari 80 %.
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan pemahaman instansi dalam pelaksanaan ARG -Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar lembaga perlindungan perempuan dan anak yang perlu ditingkatkan. -SDM pelaksana layanan masih kurang -Data pemutakhiran informasi gender yang belum terintegrasi.
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk perbaikan tahun yang akan datang, perlu dukungan anggaran dan Sumber daya Manusia.

3. Penjelasan Capaian Kinerja Tujuan ke-3. "Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan" ; Sasaran Strategi Ke-3. "Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan"

No.	Penjelasan	Uraian
1	2	3
a.	Penjelasan umum tentang sasaran dan indikator kinerja serta rumusan penghitungan	Sasaran : " Peningkatan Skor Evaluasi Kabupaten Layak Anak. Indikator Kinerja : Predikat Kabupaten Layak Anak. Rumusan Perhitungan : Skor Evaluasi KLA.
b.	Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target)	Persiapan pelaksanaan Evaluasi KLA Kabupaten Belitung dengan menghimpun data dalam Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2024. Tahun 2023 meraih Predikat KLA Madya
c.	Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten Layak Anak serta koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan baik.
d.	Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar nasional	Koordinasi, fasilitasi, advokasi tentang pemenuhan hak anak terus dilakukan kepada OPD, Media Massa, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak.
e.	Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta penyerapan anggaran	Terpenuhinya percepatan pemenuhan hak anak sesuai dengan 24 indikator Kabupaten Layak Anak, tercapainya peningkatan skor evaluasi Kabupaten Layak Anak.
f.	Faktor pendukung capaian kinerja	Komitmen dan Sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan instansi terkait pemenuhan hak anak.
g.	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Data yang belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan/ kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak.
h.	Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja triwulan/tahun yang akan datang	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada Stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Tanjungpandan, 13 Januari 2025



LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bulan Desember Tahun 2024

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Urusan/Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN APBD/PERGESERAN/APBD				REALISASI		Total Realisasi Fisik		Sisa Pagu	
		1	2	3	4	5	6	Target (%)	Realisasi (%)	Rp	
1	2	7				8	9	16	17	18	
							Total Realisasi	%			
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.089.055.091		6.829.527.996	96,34	100	100	259.527.095
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.995.000		4.448.000	89,05	100	100	547.000
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.995.000		2.746.000	91,69%	100%	100%	249.000
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		1.702.000	85,10%	100%	100%	298.000
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.949.864.271		4.838.949.188	97,76	100	100	110.915.083
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.946.864.271		4.836.429.688	97,77%	100%	100%	110.434.583
0.00.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.000.000		2.519.500	83,98%	100%	100%	480.500
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				65.000.000		42.850.913	65,92	100	100	22.149.087
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				15.000.000		14.700.000	98,00%	100%	100%	300.000
0.00.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		28.150.913	56,30%	100%	100%	21.849.087
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				678.597.975		634.658.581	93,52	100	100	43.939.394
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		9.959.000	99,59%	100%	100%	41.000
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.121.758		198.430.440	90,15%	100%	100%	21.691.318
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				114.759.317		97.941.500	85,35%	100%	100%	16.817.817
0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				119.455.800		118.587.450	99,27%	100%	100%	868.350
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.700.000		36.376.000	89,38%	100%	100%	4.324.000
0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		4.885.000	97,70%	100%	100%	115.000
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168.561.100		168.479.191	99,95%	100%	100%	81.909
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				560.804.845		506.722.000	90,36	100	100	54.082.845
0.00.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.720.000		51.020.000	88,39%	100%	100%	6.700.000
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				90.820.200		86.707.000	95,47%	100%	100%	4.113.200
0.00.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				412.264.645		368.995.000	89,50%	100%	100%	43.269.645
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				239.083.000		228.671.749	95,65	100	100	10.411.251
0.00.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		2.000.000	66,67%	100%	100%	1.000.000
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		60.780.749	86,83%	100%	100%	9.219.251

0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				166.083.000				165.891.000	99,88%	100%	100%	192.000
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				590.710.000				573.227.565	97,04	100	100	17.482.435
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				46.000.000				43.677.500	94,95%	100%	100%	2.322.500
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.250.000				148.378.965	93,17%	100%	100%	10.871.035
0.00.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				3.500.000				3.425.000	97,86%	100%	100%	75.000
0.00.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000				29.410.000	98,03%	100%	100%	590.000
0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				351.960.000				348.336.100	98,97%	100%	100%	3.623.900
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				348.934.400				321.623.110	92,17	100	100	27.311.290
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				348.934.400				321.623.110	92,17	100	100	27.311.290
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				5.739.000				5.419.900	94,44%	100%	100%	319.100
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				126.175.500				111.711.210	88,54%	100%	100%	14.464.290
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				126.500.000				124.497.000	98,42%	100%	100%	2.003.000
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				90.519.900				79.995.000	88,37%	100%	100%	10.524.900
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				41.256.200				16.955.668	41,10	100	100	24.300.532
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				41.256.200				16.955.668	41,10	100	100	24.300.532
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				41.256.200				16.955.668	41,10%	100%	100%	24.300.532
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				355.284.512				316.638.998	89,12	100	100	38.645.514
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial				355.284.512				316.638.998	89,12	100	100	38.645.514
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan				208.131.000				205.070.000	98,53%	100%	100%	3.061.000

1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					11.148.750				5.495.000	49,29%	100%	100%	5.653.750
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					60.041.400				54.269.850	90,39%	100%	100%	5.771.550
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan					36.350.862				36.116.500	99,36%	100%	100%	234.362
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan					39.612.500				15.687.648	39,60%	100%	100%	23.924.852
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					644.184.050				513.269.294	79,68	100	100	130.914.756
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					23.258.100				9.955.900	42,81	100	100	13.302.200
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					7.993.500				1.080.000	13,51%	100%	100%	6.913.500
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar					15.264.600				8.875.900	58,15%	100%	100%	6.388.700
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					620.925.950				503.313.394	81,06	100	100	117.612.556
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					367.968.200				366.499.950	99,60%	100%	100%	1.468.250
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					252.957.750				136.813.444	54,09%	100%	100%	116.144.306
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					438.517.700				398.107.550	90,78	100	100	40.410.150
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					438.517.700				398.107.550	90,78	100	100	40.410.150
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					438.517.700				398.107.550	90,78%	100%	100%	40.410.150
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					11.325.400				5.730.400	50,60	100	100	5.595.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					11.325.400				5.730.400	50,60	100	100	5.595.000
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					11.325.400				5.730.400	50,60%	100%	100%	5.595.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					439.498.900				435.651.334	99,12	100	100	3.847.566
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					36.326.000				33.966.600	93,50	100	100	2.359.400
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					36.326.000				33.966.600	93,50%	100%	100%	2.359.400
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					370.497.900				369.247.284	99,66	100	100	1.250.616
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					370.497.900				369.247.284	99,66%	100%	100%	1.250.616
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					32.675.000				32.437.450	99,27	100	100	237.550
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					16.993.000				16.863.200	99,24%	100%	100%	129.800

2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				15.682.000					15.574.250	99,31%	100%	100%	107.750
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				394.720.850					195.433.106	49,51	100	100	199.287.744
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				72.668.850					66.553.060	91,58	100	100	6.115.790
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				72.668.850					66.553.060	91,58%	100%	100%	6.115.790
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				322.052.000					128.880.046	40,02	100	100	193.171.954
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				322.052.000					128.880.046	40,02%	100%	100%	193.171.954
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				12.132.500					11.880.000	97,92	100	100	252.500
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				12.132.500					11.880.000	97,92	100	100	252.500
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12.132.500					11.880.000	97,92%	100%	100%	252.500
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				45.671.700					40.377.200	88,41	100	100	5.294.500
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				45.671.700					40.377.200	88,41	100	100	5.294.500
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				45.671.700					40.377.200	88,41%	100%	100%	5.294.500
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				270.743.750					228.070.519	84,24	100	75	42.673.231
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				13.713.850					12.696.100	92,58	100	100	1.017.750
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				13.713.850					12.696.100	92,58%	100%	100%	1.017.750
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				257.029.900					215.374.419	83,79	100	50	41.655.481

2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					34.000.000				-	0,00%	100%	0%	34.000.000
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					223.029.900				215.374.419	96,57%	100%	100%	7.655.481
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					223.527.000				207.991.700	93,05	100	100	15.535.300
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					130.000.000				126.542.500	97,34	100	100	3.457.500
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA					130.000.000				126.542.500	97,34%	100%	100%	3.457.500
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.127.000				3.073.200	59,94	100	100	2.053.800
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK					5.127.000				3.073.200	59,94%	100%	100%	2.053.800
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					88.400.000				78.376.000	88,66	100	100	10.024.000
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota					88.400.000				78.376.000	88,66%	100%	100%	10.024.000
	Total					10.314.852.053,00				9.521.256.875,00	92,31%	100,00%	98,08%	793.595.178,00


 KEPALA DINAS,
KASHMIN, S.IP., MAB
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19690824 199003 1 004